

**ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PESISIR  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**MARTA EKA PUTRA**  
**143410063**

**PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

**ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PESISIR  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Nama : Marta Eka Putra

NPM : 143410063

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
TAHUN 2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PESISIR  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**TUGAS AKHIR**

**Disusun Oleh**

**MARTA EKA PUTRA**

**NPM 143410063**

**Disetujui Oleh:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ir. Apriyan Dinata. M.Env**

**Febby Asteriani. ST.,MT**

**Disahkan Oleh:**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Ir. H. Abd. Kudus Zaini, MT.,MS.,TR.,IPM**

**Puji Astuti, ST., MT**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mengakui bahwa tugas akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri kecuali ringkasan dan kutipan (baik secara langsung maupun tidak langsung), saya ambil dari beberapa sumber dan disebutkan sumbernya didalam daftar pustaka. Secara ilmiah saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan fakta tugas akhir ini.

Pekanbaru, 01 Desember 2019

Marta Eka Putra

NPM : 143410063

# ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Marta Eka Putra  
143410063

## ABSTRAK

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan kondisi geografis wilayah yang dipisahkan oleh laut dan sungai-sungai menjadikan daerahnya sangat sulit untuk merasakan pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari persebaran sarana dan prasarana serta jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada pusat pemerintahan yakni kota Tembilahan menjadikan daerah-daerah belakangnya terutama wilayah pesisir yang secara geografis sulit untuk dijangkau terlihat kurang berkembang. Oleh karena itu dibutuhkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, salah satunya melalui analisis pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga analisis, yaitu (i) analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshal untuk mengetahui wilayah pesisir manakah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, (ii) analisis gravitasi dan titik henti untuk mengetahui kekuatan interaksi dan batas pengaruh dari masing-masing wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan terhadap wilayah *hinterland*-nya (iii) analisis indeks sentralitas berdasarkan nilai *konig* dan *shimbel* untuk mengetahui tingkat konektivitas antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian menunjukkan (i) kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kateman sebagai pusat pertumbuhan utama, Kecamatan Reteh dan Tanah Merah sebagai pusat pertumbuhan kedua, Kecamatan Mandah sebagai pusat pertumbuhan ketiga, (ii) kecamatan pusat pertumbuhan dengan nilai kekuatan interaksi tertinggi terhadap wilayah *hinterland*-nya adalah Kecamatan Kateman dengan total nilai interaksi sebesar 4.687.151 satuan interaksi. Selanjutnya disusul Kecamatan Reteh 2.338.701 satuan interaksi, Kecamatan Mandah 1.944.391 satuan interaksi, dan Kecamatan Tanah Merah 1.904.590 satuan interaksi. Sementara itu, untuk kecamatan pusat pertumbuhan dengan batas pengaruh tertinggi adalah kecamatan Kateman. (iii) pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat konektivitas tertinggi adalah kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah. Perbedaan hasil pada masing-masing analisis diatas terjadi berdasarkan variabel dan karakteristik penentu dari masing-masing Teknik analisis yang digunakan, yakni sarana dan prasarana, jumlah penduduk, dan jarak.

**Kata Kunci : Kabupaten Indragiri Hilir, Ketimpangan Pembangunan, Wilayah Pesisir, Pusat Pertumbuhan**

# ***ANALYSIS OF GROWTH CENTERS IN THE COASTAL AREA OF INDRAGIRI HILIR REGENCY.***

**Marta Eka Putra**  
**143410063**

## **ABSTRACT**

*Indragiri Hilir district is the largest district in the Riau Province with geographic conditions separated by sea and rivers. These conditions make it very difficult for the region to feel equitable development. The development imbalance that occurred in Indragiri Hilir Regency can be seen from the distribution of facilities and infrastructure as well as the population concentrated in the central government, in the city of Tembilahan, making the back regions, especially coastal areas that are geographically difficult to reach, look less developed. Therefore, a solution is needed, one of which is through the analysis of growth centers in the coastal area of Indragiri Hilir Regency.*

*Data analysis in this study was carried out with three analyzes, they are (i) scalogram analysis and Marshal centrality index to find out which coastal areas have the potential to be the center of growth in terms of the completeness of facilities and infrastructure, (ii) gravity analysis and stopping points to determine the strength of interactions and the limits of influence of each region which is the center of growth on its hinterland area (iii) analysis of the centrality index based on the values of conig and shimbel to determine the level of connectivity between coastal areas which are the centers of growth in Indragiri Hilir Regency.*

*The results of the research show (i) the districts which have the potential to become centers of growth in the coastal area of Indragiri Hilir Regency consist of four districts, namely Kateman District as the main growth center, Tanah Merah District as the second growth center, Mandah District and Reteh District as the third growth center, ( ii) the growth center district with the highest value of interaction strength to its hinterland area is Kateman District with a total interaction value of 4,687,151 interaction units. Subsequently followed by Reteh District 2,338,701 interaction units, Mandah District 1,944,391 interaction units, and Tanah Merah District 1,904,590 interaction units. Meanwhile, for the growth center sub-district with the highest limit of influence is Kateman sub-district, (iii) growth centers in the coastal area of Indragiri Hilir district with the highest level of connectivity are Mandah sub-district and Tanah Merah sub-district.*

***Keywords: Indragiri Hilir Regency, Development Inequality, Coastal Areas, Growth Centers***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'la atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang berperan penting dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Kedua orang tua dan keluarga atas doa, perhatian, kasih sayang dan dukungan moral serta materiil yang telah diberikan.
2. Bapak Ir.H.Abdul Kudus Zaini.,MT.,Ms.,Tr selaku Dekan Fakultas Teknik yang telah banyak memberikan dukungan serta arahan sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Puji Astuti.,ST.,MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan, nasehat serta masukan-masukan kepada peneliti sehingga bias menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Muhammad Sofwan.,ST.,MT selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan dalam proses administrasi dan pengerjaan skripsi.
5. Bapak Dr.Ir. Apriyan Dinata.,M.Env selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan, motivasi serta masukan-masukan bagi penulis.
6. Ibu Febby Asteriani.,ST.,MT selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan, pemikiran serta motivasi bagi penulis.
7. Bapak Faizan Dalilla.,ST.,M.Si yang telah banyak memberikan koreksi dan saran beserta masukan-masukan terhadap peneliti.

8. Ibu Rona Muliana.,ST.,MT yang telah banyak memberikan masukan-masukan terhadap peneliti sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak-ibu dosen beserta staf di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, atas bantuan dan semua dukungan yang diberikan.
10. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Teknik yang telah banyak membantu mempermudah penulis dalam pengurusan administrasi.
11. Sahabat seperjuangan Rizky Ardiansyah yang telah berbesar hati meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, berbagi saran dan masukan serta membantu proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
12. Sahabat seperjuangan Insani Andre Marton yang banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti.
13. Sahabat seperjuangan Jufrizal Nurman yang Bersama-sama dengan peneliti melakukan survei primer dan saling membantu dalam melengkapi data penelitian.
14. Sahabat seperjuangan Andrean Ongki Saputra yang telah banyak membantu peneliti dalam berbagai waktu dan kesempatan.
15. Kawan-kawan seperjuangan keluarga Planologi 14-A, atas dukungan dan semangat yang diberikan.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	10
1.5.2. Ruang Lingkup Materi .....	10
1.6. Kerangka Berfikir .....	15
1.8. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1. Perencanaan Pembangunan Wilayah.....	18
2.2. Konsep-Konsep Wilayah .....	21
2.3. Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir .....	24
2.3.1. Karakteristik Wilayah Pesisir .....	26
2.3.2. Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	28
2.4. Teori Pusat Pertumbuhan ( <i>Growth Pole</i> ).....	32
2.5. Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru .....	38
2.6. Tinjauan Penentuan Hirarki Wilayah .....	39
2.6.1. Manfaat Hirarki Wilayah.....	41
2.7. Teori Lokasi .....	42

2.8. Teori Interaksi Spasial .....	44
2.9. Teori Gravitasi.....	45
2.10. Wilayah Pengaruh.....	46
2.11. Konektivitas Antar Wilayah.....	48
2.12. Teori Keseimbangan dan Ketidakseimbangan dalam Pembangunan.....	49
2.13. Pengembangan Wilayah Dalam Pandangan Islam .....	51
2.14. Sintesa Teori.....	55
2.15. Penelitian Terdahulu .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>65</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	65
3.2. Jenis Penelitian .....	66
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	66
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	66
3.3.2. Waktu Penelitian .....	67
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	68
3.4.1. Data Primer.....	68
3.4.2. Data Sekunder.....	68
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	69
3.6. Variabel Penelitian .....	70
3.7. Metode dan Teknik Analisis Data .....	71
3.7.1. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall.....	71
3.7.2. Analisis Gravitasi dan Titik Henti .....	79
3.7.3. Analisis Indeks Sentralitas Berdasarkan Nilai <i>Konig</i> dan <i>Shimbel</i> .....	82
3.8. Desain Survei .....	84
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH</b> .....	<b>87</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir .....	87
4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	87
4.1.2. Aspek Kependudukan .....	110
4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	117
4.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif .....	117

4.2.2. Kondisi Sosial .....	140
4.2.3. Penggunaan Lahan .....	142
4.2.4. Sarana dan Prasarana .....	146
4.3. Potensi Pengembangan Wilayah .....	155
4.3.1. Sektor Pertanian .....	155
4.3.2. Perkebunan .....	158
4.3.3. Perikanan .....	159
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>164</b>
5.1. Analisis Wilayah Pesisir Yang Berpotensi Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir .....	164
5.2. Analisis Kekuatan Interaksi dan Batas Pengaruh Antar Wilayah Pesisir Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan Dengan Wilayah <i>Hinterland</i> -nya di Kabupaten Indragiri Hilir .....	183
5.2.1. Analisis Gravitasi .....	185
5.2.2. Analisis Titik Henti ( <i>Break Point</i> ) .....	199
5.3. Analisis Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Pesisir Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir .....	256
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>264</b>
6.1. Kesimpulan .....	264
6.2. Saran .....	266
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>268</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>272</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sintesa Teori .....	55
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu .....	60
Tabel 3.1. Variabel Penelitian .....	70
Tabel 3.2. Desain Survei .....	85
Tabel 4.1. Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 .....	89
Tabel 4.2. Jarak dari Ibu kota kabupaten ke Ibu kota kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir, 2012 .....	91
Tabel 4.3. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan .....	94
Tabel 4.4. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017 .....	104
Tabel 4.5. Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 .....	109
Tabel 4.6. Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 .....	111
Tabel 4.7. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 .....	113
Tabel 4.8. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 .....	114
Tabel 4.9. Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017 .....	116
Tabel 4.10. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pulau Burung, Tahun 2017 .....	119
Tabel 4.11. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kateman Tahun 2017 ....	121
Tabel 4.12. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mandah Tahun 2017 ....	124
Tabel 4.13. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Gaung Anak Serka Tahun 2017 .....	127
Tabel 4.14. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Concong Tahun 2017 ...	129

Tabel 4.15. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2017 .....	132
Tabel 4.16. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tanah Merah Tahun 2017 .....	134
Tabel 4.17. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Sungai Batang Tahun 2017.....	136
Tabel 4.18. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2017.....	138
Tabel 4.19. Pertumbuhan Penduduk Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2017.....	140
Tabel 4.20. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	141
Tabel 4.21. Struktur Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018.....	142
Tabel 4.22. Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	144
Tabel 4.23. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	146
Tabel 4.24. Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	148
Tabel 4.25. Ketersediaan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	149
Tabel 4.26. Ketersediaan Sarana Prasarana Peribadatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	151
Tabel 4.27. Ketersediaan fasilitas Pelabuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	153
Tabel 4.28. Panjang Jalan Menurut Panjang Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Km) Tahun 2014-2017.....	154
Tabel 4.29. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Km) Tahun 2014-2017.....	154
Tabel 4.30. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Km) Tahun 2014-2017 .....	155
Tabel 4.31. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Per Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018.....	156

Tabel 4.32. Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2016-2017 .....	161
Tabel 4.33. Luas Tambak Budidaya Air Payau, Banyaknya Rumah Tangga Dan Produksi Perikanan Tambak di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 .....	162
Tabel 4.34. Luas Budidaya Air Tawar dan Mina Tani Serta Produksi Perikanan Air Tawar di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017 .....	163
Tabel 5.1 Jumlah Ketersediaan Unit dan Jenis Fasilitas di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2018 .....	166
Tabel 5.2. Nilai Indeks Sentralitas Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir ....	167
Tabel 5.3 Hirarki Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir .....	169
Tabel 5.4 Hasil Nilai Interaksi Wilayah Antara Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Belakangnya ( <i>Hinterland</i> ) di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2019 .....	180
Tabel 5.5 Peringkat Daya Tarik Kekuatan Interaksi Masing-Masing Kecamatan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2019 .....	187
Tabel 5.6 Nilai Titik Henti ( <i>Break Point</i> ) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman Terhadap Wilayah <i>Hinterland</i> -nya.....	189
Tabel 5.7 Nilai Titik Henti ( <i>Break Point</i> ) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah Terhadap Wilayah <i>Hinterland</i> -nya .....	200
Tabel 5.8 Nilai Titik Henti ( <i>Break Point</i> ) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh Terhadap Wilayah <i>Hinterland</i> -nya .....	213
Tabel 5.9 Nilai Titik Henti ( <i>Break Point</i> ) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah Terhadap Wilayah <i>Hinterland</i> -nya .....	223
Tabel 5.10 Jumlah Penduduk dan Jarak Kecamatan Pusat Pertumbuhan.....	232
Tabel 5.11 Batas Pengaruh/Titik Henti Wilayah Pusat Pertumbuhan .....	258
Tabel 5.12 Rekapitulasi Hasil Masing-Masing Analisis.....	261

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Riau .....	12
Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir .....	13
Gambar 1.3. Peta Lokasi Penelitian.....	14
Gambar 1.4. Kerangka Berfikir .....	15
Gambar 2.1. Sistematika Konsep-Konsep Wilayah .....	22
Gambar 2.2. Luas Jangkauan <i>Range</i> dan <i>Threshold</i> .....	47
Gambar 3.1. Ilustrasi Rute Terdekat dan Jumlah Rute Antar Wilayah K = Konig dan S = Shimbel .....	83
Gambar 4.1. Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	88
Gambar 4.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2017 .....	90
Gambar 4.3. Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir .....	92
Gambar 4.4. Peta Topografi Kabupaten Indragiri Hilir .....	96
Gambar 4.5. Peta Geologi Kabupaten Indragiri Hilir .....	102
Gambar 4.6. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017.....	110
Gambar 4.7. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pulau Burung .....	119
Gambar 4.8. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pulau Kateman Tahun 2017 .....	122
Gambar 4.9. Kota Guntung Kecamatan Kateman .....	123
Gambar 4.10. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mandah....	125
Gambar 4.11. Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah .....	126
Gambar 4.12. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Gaung Anak Serka .....	128
Gambar 4.13. Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka .....	128
Gambar 4.14. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Concong...	130

Gambar 4.15. Concong Luar, Kecamatan Concong .....	130
Gambar 4.16 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kuala Indragiri .....	132
Gambar 4.17 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tanah Merah.....	134
Gambar 4.18 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Sungai Batang.....	136
Gambar 4.19 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Reth.....	139
Gambar 4.20. Pulau Kijang, Kecamatan Reth.....	139
Gambar 4.21 Persentase Jenis Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	145
Gambar 4.22. Sarana Pendidikan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir ...	147
Gambar 4.23. Fasilitas Kesehatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir ..	148
Gambar 4.24. Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	150
Gambar 4.25. Fasilitas Peribadatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir..	151
Gambar 4.26 Fasilitas Pelabuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	153
Gambar 4.27 Potensi Perkebunan Kelapa di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	159
Gambar 4.28 Potensi Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	163
Gambar 5.1 Perusahaan Pengolahan Kelapa PT.Pulau Sambu di Kecamatan Kateman.....	172
Gambar 5.2. Kota Guntung, Kecamatan Kateman.....	173
Gambar 5.3. Peta Pusat-Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	178
Gambar 5.4. Grafik Kekuatan Interaksi Kecamatan Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah <i>Hinternd</i> -nya di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.....	189
Gambar 5.5. Aktifitas Pelabuhan di Kecamatan Kateman.....	192

Gambar 5.6. Aktivitas Pelabuhan di Kota Pulau Kijang Kecamatan Reteh. ....	194
Gambar 5.7. Objek Wisata Pantai Solop Kecamatan Mandah.....	195
Gambar 5.8. Industri Pengolahan Kelapa di Kecamatan Tanah Merah.....	197
Gambar 5.9. Peta Kekuatan Interaksi Masing-Masing Wilayah Pusat Pertumbuhan. ....	198
Gambar 5.10. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Tanah Merah.....	202
Gambar 5.11. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Mandah.....	203
Gambar 5.12. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Reteh. ....	205
Gambar 5.13. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Concong. ....	206
Gambar 5.14. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Pulau Burung. ....	208
Gambar 5.15. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Gaung Anak Serka.....	209
Gambar 5.16. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Kuala Indragiri.....	211
Gambar 5.17. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Sungai Batang.....	212
Gambar 5.18. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Kateman.....	215
Gambar 5.19. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Mandah. ....	216
Gambar 5.20 Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Reteh.....	217
Gambar 5.21. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Concong.....	218
Gambar 5.22. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Pulau Burung. ....	219

Gambar 5.23. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Gaung Anak Serka .....	220
Gambar 5.24. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Kuala Indragiri. ....	221
Gambar 5.25. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Sungai Batang. ....	222
Gambar 5.26. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Kateman. ....	224
Gambar 5.27. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Tanah Merah.....	225
Gambar 5.28. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Reteh. ....	226
Gambar 5.29. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Concong. ....	227
Gambar 5.30. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Pulau Burung. ....	228
Gambar 5.31. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Gaung Anak Serka.....	230
Gambar 5.32. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Kuala Indragiri.....	231
Gambar 5.33. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Sungai Batang.....	232
Gambar 5.34. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Kateman.....	234
Gambar 5.35. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Tanah Merah .....	235
Gambar 5.36. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Mandah. ....	236
Gambar 5.37. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Concong.....	237

Gambar 5.38. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Pulau Burung. ....	238
Gambar 5.39. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Gaung Anak Serka .....	239
Gambar 5.40. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Kuala Indragiri. ....	240
Gambar 5.41. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Sungai Batang. ....	242
Gambar 5.42. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Tanah Merah. ....	244
Gambar 5.43. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Mandah. ....	245
Gambar 5.44. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Reteh .....	246
Gambar 5.45. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Kateman .....	247
Gambar 5.46. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Mandah .....	248
Gambar 5.47. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Reteh. ....	249
Gambar 5.48. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Kateman .....	250
Gambar 5.49. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Tanah Merah. ....	251
Gambar 5.50. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Reteh .....	252
Gambar 5.51. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Kateman .....	253
Gambar 5.52. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Tanah Merah. ....	254

Gambar 5.53. Peta Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh –  
Kecamatan Mandah..... 255

Gambar 5.54. Peta Trayek Transportasi Sungai Kabupaten Indragiri Hilir..... 257



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan atau pembangunan suatu wilayah tidak selamanya diikuti oleh pemerataan pembangunan ekonomi maupun pemerataan pendapatan. Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Apabila tingkat pembangunan di berbagai daerah dibandingkan, maka pembangunan yang dicapai oleh daerah yang maju selalu lebih cepat dari pada yang terjadi di daerah lain. Hal ini dalam jangka panjang akan menyebabkan tingkat ketimpangan yang cukup lebar (Sukirno, 1985 dalam Hasan, 2017).

Di Indonesia, masih adanya pembangunan nasional yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terlihat timpang antara daerah satu dengan daerah lainnya, hal tersebut terlihat jelas apabila membandingkan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten dan kota, dimana kondisi ekonomi kota lebih berkembang dibandingkan dengan kabupaten. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah yaitu tingkat kemiskinan dan besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Apabila dikaji keduanya maka akan terlihat kesenjangan di wilayah tersebut, namun apabila dikaji dari sisi kebijakan ternyata pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dikarenakan oleh kebijakan pembangunan dari pemerintah yaitu adanya pembentukan daerah-daerah nodal (Sari, 2016).

Menurut Rustiadi *et al* (2011), daerah nodal adalah areal-areal yang strukturalnya terdiri atas areal inti dengan areal sekitarnya yang melingkapi. Daerah

nodal akan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan terutama pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan kabupaten atau wilayah di sekitar kota hanya sebagai daerah pendukung, akibatnya kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di kota.

Terciptanya daerah nodal tidak hanya terjadi pada wilayah propinsi, tetapi juga pada wilayah kabupaten/kota dan umumnya terjadi pada kabupaten-kabupaten yang mempunyai wilayah yang luas. Kabupaten yang mempunyai wilayah yang luas biasanya membagi dua wilayah secara administratif, yaitu wilayah kotamadya dan wilayah kabupaten, dan umumnya pusat kegiatan ekonomi terjadi di daerah kota. Daerah nodal terbentuk dengan harapan kota akan mendorong pertumbuhan di kabupaten atau wilayah di sekitarnya dan terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi, namun yang terjadi justru sebaliknya sehingga yang terlihat adalah kesenjangan antara kedua wilayah tersebut.

Menurut Myrdal 1957, dalam Tarigan (2005), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Menurut Williamson 1965, dalam Muta'ali (2015), ketimpangan wilayah selalu pada tahap awal pembangunan, yang kemudian semakin membesar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Ketimpangan wilayah meliputi ketimpangan pusat dan pinggiran, desa dan kota, dan antar kawasan, seperti yang terjadi di Indonesia yakni ketimpangan perekonomian antara pulau jawa dan luar pulau jawa, dan antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia.

Beberapa penyebab ketimpangan antar wilayah di antaranya, migrasi tenaga kerja oleh kalangan terdidik yang masuk wilayah maju, migrasi kapital antar daerah yang tidak seimbang, aglomerasi perkotaan, pengembangan infrastruktur yang bias kota, dan kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya ketimpangan yang terjadi (Williamson 1965, dalam Muta'ali, 2015).

Menurut Syafrizal (2008), di Indonesia faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan juga alokasi dana pembangunan antar wilayah. Salah satu kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menanggulangi ketimpangan antar daerah dalam suatu wilayah atau negara yaitu melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru (*Growth Pole*) secara menyebar, karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah secara cepat dan signifikan (Santoso, 2014).

Propinsi Riau merupakan salah satu propinsi di Pulau Sumatera yang sangat kaya akan sumberdaya alamnya. Letak Provinsi Riau yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan wilayahnya sebagai pintu masuk (*gateway*) jalur lalu lintas internasional di kawasan ASEAN. Selain letak wilayah yang strategis, Provinsi Riau juga termasuk sebagai salah satu propinsi dengan wilayah pesisir yang cukup luas, hal ini dapat di lihat pada

kabupaten-kabupaten di Propinsi Riau yang terletak di sebelah selatan, salah satunya adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten terluas di Propinsi Riau, dengan total luas wilayah sebesar 12.614,78 km<sup>2</sup>. Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dan berada di pesisir timur Pulau Sumatera, dengan kondisi tersebut maka kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 km dengan luas total wilayah 18.812,94 km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah daratan 11.605,97 km<sup>2</sup>, wilayah perairan umum 888,97 km<sup>2</sup> dan perairan laut 6.318 Km<sup>2</sup> sehingga Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah perairan sekitar 38,31 % dari total luas wilayah dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau.

Berdasarkan kondisi geografis yang secara umum berhadapan langsung dengan laut menjadikan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tergolong sebagai salah satu kabupaten pesisir di Propinsi Riau yang memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial dan tersebar diseluruh wilayah kecamatannya. Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan sebagaimana diamanatkan di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Melalui ditetapkannya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu kawasan minapolitan diharapkan dapat merangsang perkembangan wilayah agar semakin maju dan sejahtera, dimana peran dari dibentuknya kawasan minapolitan adalah meningkatkan percepatan pembangunan wilayah dan meningkatkan keterkaitan desa

dan kota serta mendorong berkembangnya sistem dan usaha minabisnis pada daerah-daerah potensi sebagai kawasan pengembangan minapolitan (Astuti, 2017).

Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis mengalami ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan wilayah perdesaan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari beberapa wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti wilayah pesisir utara dan selatan yang mencatat kemiskinan yang cukup tinggi yakni 22.933 kepala keluarga dari total 57.649 kepala keluarga penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir (Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 2018) dengan kondisi wilayah yang cukup tertinggal dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir lainnya terutama yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten dalam hal ini adalah Kecamatan Tembilahan.

Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir juga dapat dilihat melalui persebaran penduduk dan kelengkapan sarana prasarana di masing-masing wilayahnya, dimana konsentrasi penduduk dan sarana prasarana pada umumnya terpusat pada ibu kota kabupaten dan wilayah sekitarnya yang berdekatan, sedangkan persebaran penduduk dan sarana prasarana di wilayah utara dan selatan Kabupaten Indragiri Hilir relatif rendah (RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2013-2018).

Terpusatnya sarana prasarana di daerah perkotaan yakni Kota Tembilahan sebagai pusat pemerintahan, menjadikan daerah sentra produksi pertanian dan perikanan yang umumnya berada di wilayah pesisir cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan dari fasilitas-fasilitas tersebut, karena interaksinya sangat terbatas ke pusat-pusat pelayanan tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya ketimpangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan sebagai daerah

belakangnya, dan khususnya wilayah pesisir yang secara geografis sangat sulit untuk dijangkau.

Selain itu, kondisi Kabupaten Indragiri Hilir yang sangat luas dan di dominasi oleh daerah rawa, sungai-sungai, dan pulau-pulau menjadi salah satu faktor mengapa wilayahnya sangat sulit untuk merasakan pemerataan pembangunan. Terbatasnya akses infrastruktur di masing-masing wilayah Kecamatan di daerah ini menjadikan proses pembangunan sangat terhambat, dimana untuk menjangkau satu daerah ke daerah lainnya harus menggunakan alat transportasi air yang secara umum menekan biaya yang cukup tinggi bagi masyarakatnya, terutama untuk bepergian ke pusat pelayanan yang ada di ibu kota kabupaten yaitu Kota Tembilahan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka sehari-hari.

Adanya permasalahan ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir bahkan menimbulkan adanya isu pemekaran wilayah Indragiri Utara dan Indragiri Selatan yang menuntut untuk diberikan otonomi sendiri guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Indragiri Utara dan Indragiri Selatan yang secara umum merupakan wilayah pesisir, yakni Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung, Sungai Batang, Reteh, Tanah Merah, Concong, dan lain-lain (Putra, 2012).

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru, dimana setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, dan turut berperan dalam munculnya disparitas antar wilayah apabila tidak direncanakan dengan baik. Melalui pusat pertumbuhan baru diharapkan hasil

pembangunan serta ekonomi wilayahnya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan di setiap kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan kondisi geografis wilayah yang dipisahkan oleh laut dan sungai-sungai menjadikan daerahnya sangat sulit untuk merasakan pemerataan pembangunan. Adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari persebaran sarana dan prasarana serta jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada pusat pemerintahan yakni Kota Tembilahan menjadikan daerah-daerah belakangnya terutama wilayah pesisir yang secara geografis sulit untuk dijangkau terlihat kurang berkembang.

Berdasarkan uraian masalah tersebut diatas maka salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan ketimpangan dalam upaya pengembangan wilayah adalah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Dari hal tersebut, maka analisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir di kabupaten Indragiri Hilir dinilai penting untuk dilakukan guna untuk mengetahui wilayah pesisir yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, kekuatan interaksi spasial, dan tingkat konektivitas antar wilayahnya.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka permasalahan pokok yang dapat disimpulkan adalah :

- a. Adanya permasalahan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan pada kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti wilayah pesisir utara dan selatan yang cenderung tertinggal.
- b. Tidak meratanya persebaran sarana dan prasarana serta jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada pusat pemerintahan yakni kota Tembilahan.
- c. Belum diketahuinya pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. Belum diketahuinya interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Belum diketahuinya tingkat konektivitas antar wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Wilayah pesisir manakah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ?
- b. Bagaimana interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*) di Kabupaten Indragiri Hilir ?
- c. Bagaimana tingkat konektivitas antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengidentifikasi interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*) di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengidentifikasi tingkat konektivitas antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai rujukan bagi mahasiswa perencanaan wilayah dan kota di fakultas teknik Universitas Islam Riau yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang dan perencanaan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi wilayah kajian, dan ruang lingkup materi bertujuan untuk membatasi materi pembahasan. Untuk lebih jelasnya ruang lingkup penelitian dijelaskan sebagai berikut :

### 1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah pada wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu : Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Concong, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Sungai Batang, dan Kecamatan Reteh.

Pemilihan lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini di dasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 yang menyebutkan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Sembilan kecamatan sebagaimana telah di sebutkan di atas.

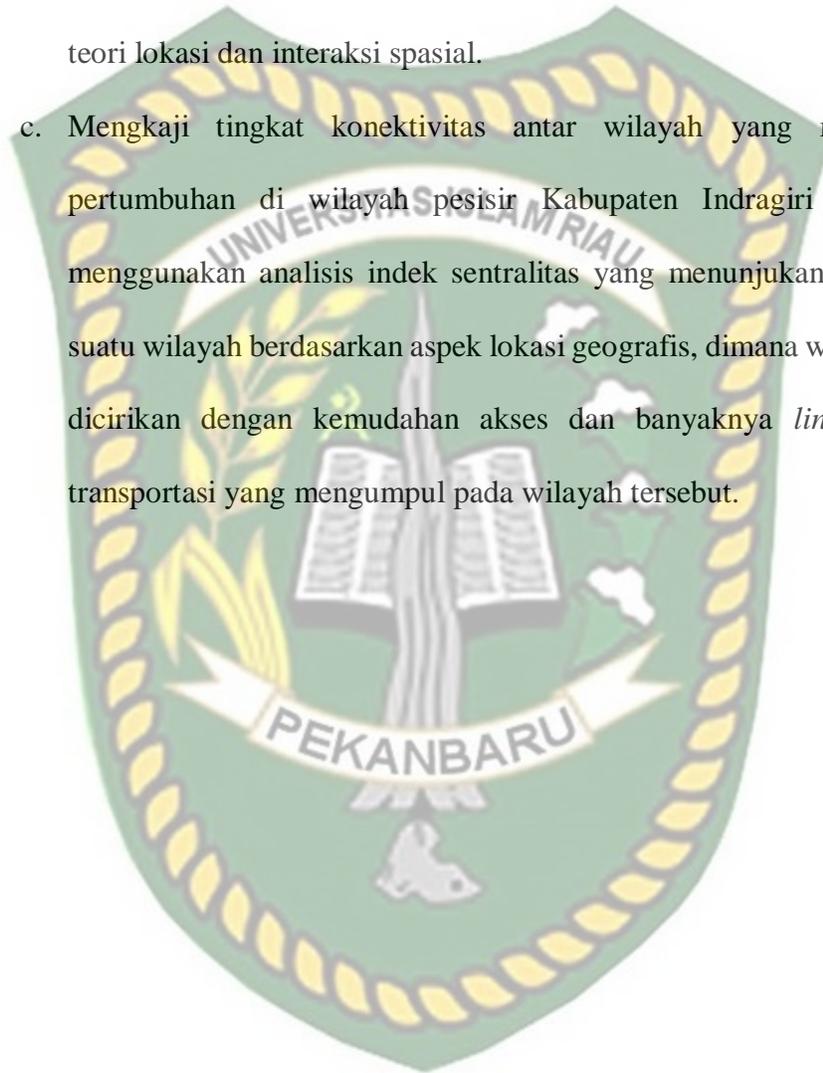
### 1.5.2. Ruang Lingkup Materi

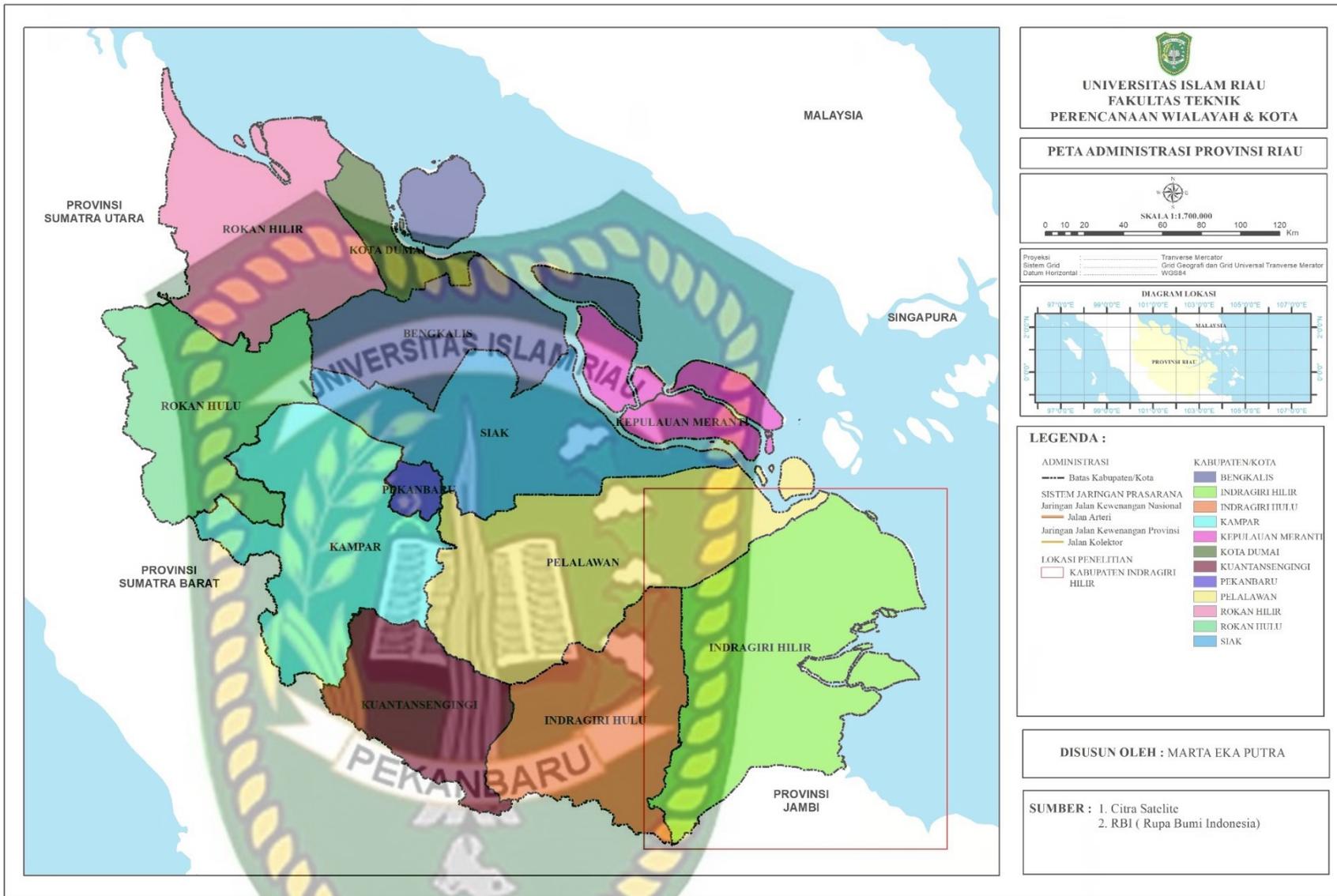
Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji teori-teori dan literatur yang berkaitan dalam menetapkan sebuah pusat pertumbuhan, guna untuk menarik variabel-variabel dan indikator yang sesuai, yang kemudian di analisis untuk kemudian ditentukan hirarki

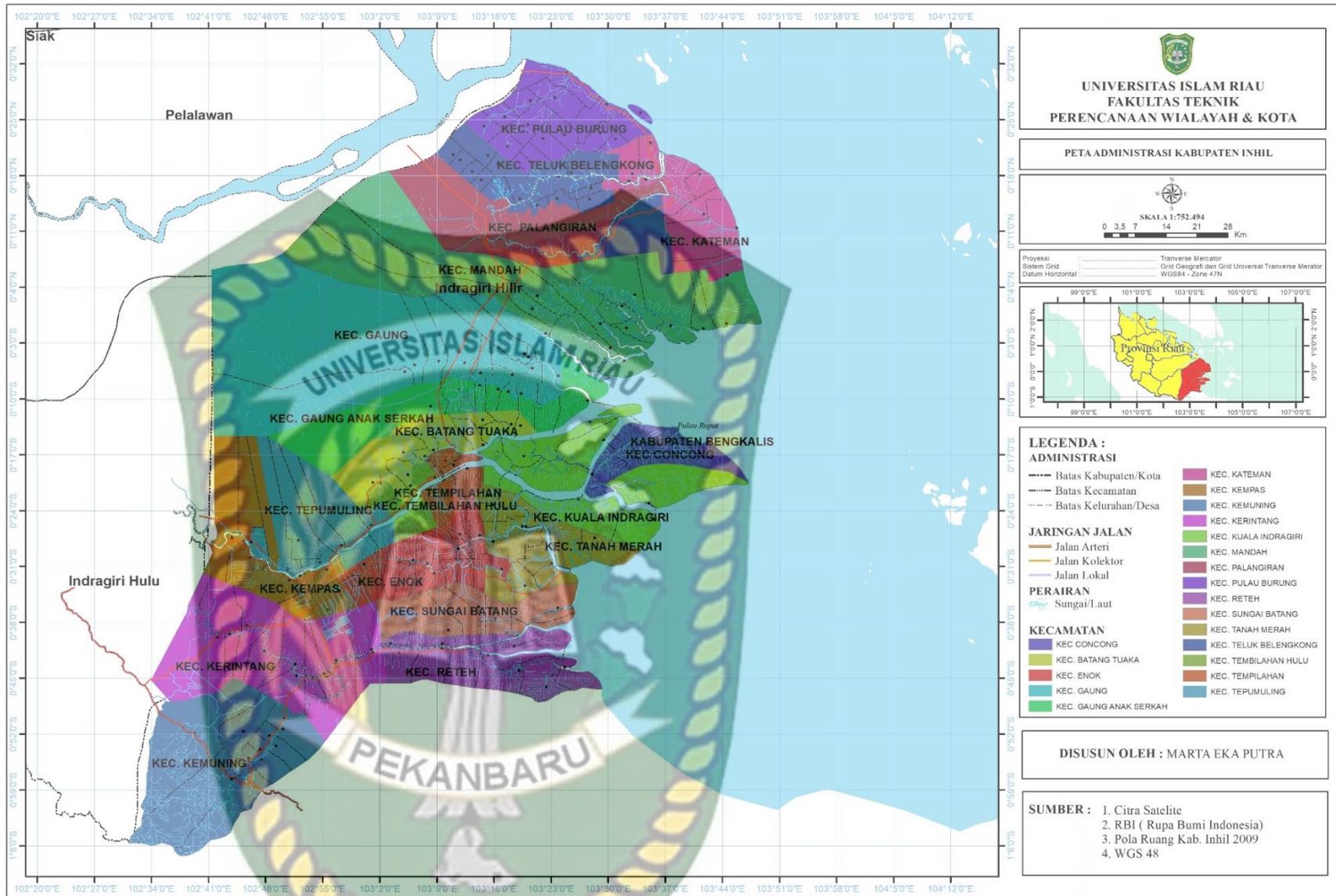
wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

- b. Mengkaji kekuatan interkasi dan batas pengaruh antar wilayah pusat pertumbuhan dan hinterlandnya di Kabupaten Indragiri Hilir melalui teori-teori lokasi dan interaksi spasial.
- c. Mengkaji tingkat konektivitas antar wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan analisis indek sentralitas yang menunjukkan nilai strategis suatu wilayah berdasarkan aspek lokasi geografis, dimana wilayah tersebut dicirikan dengan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang mengumpul pada wilayah tersebut.

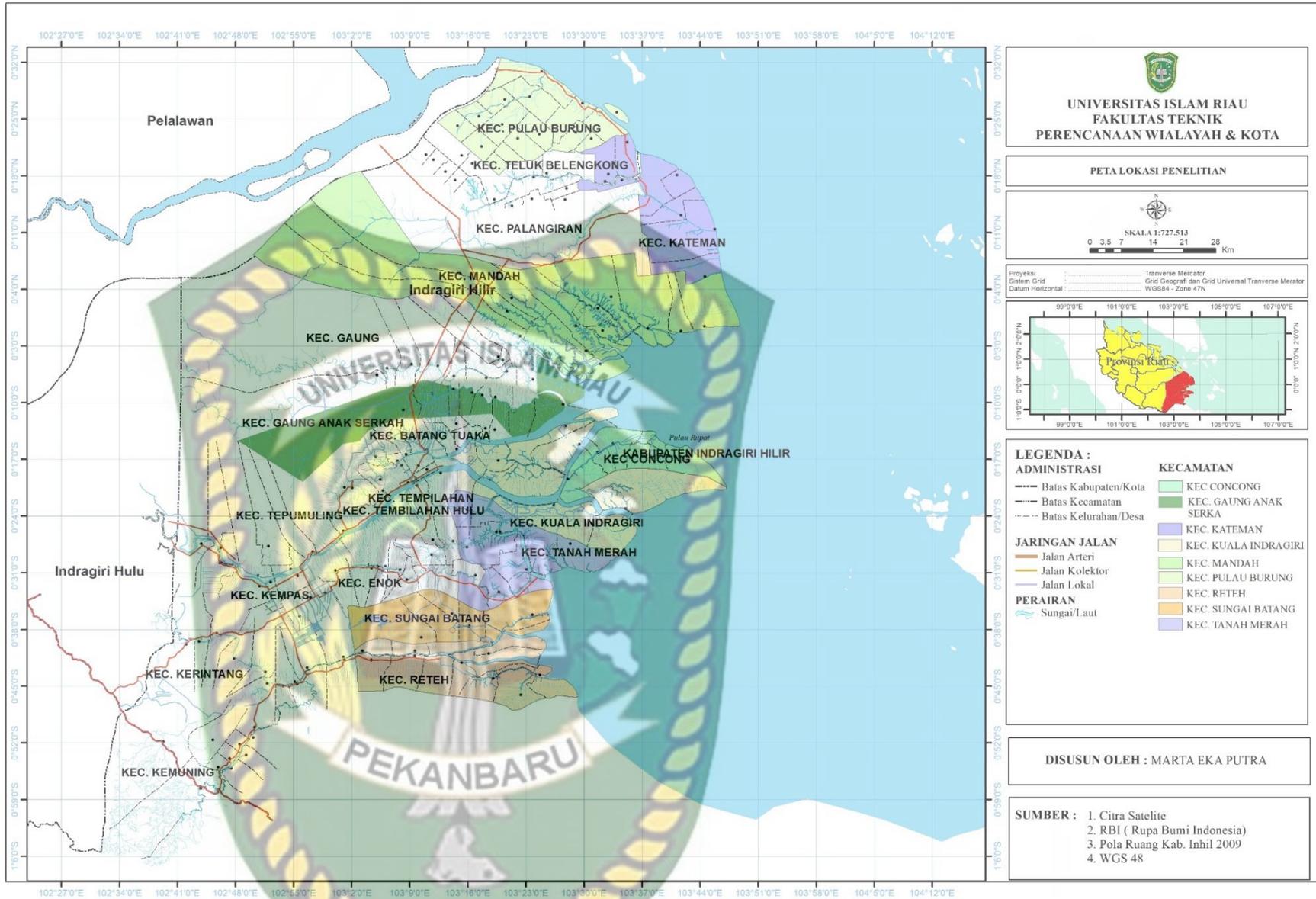




GAMBAR 1.1 PETA ADMINISTRASI PROVINSI RIAU

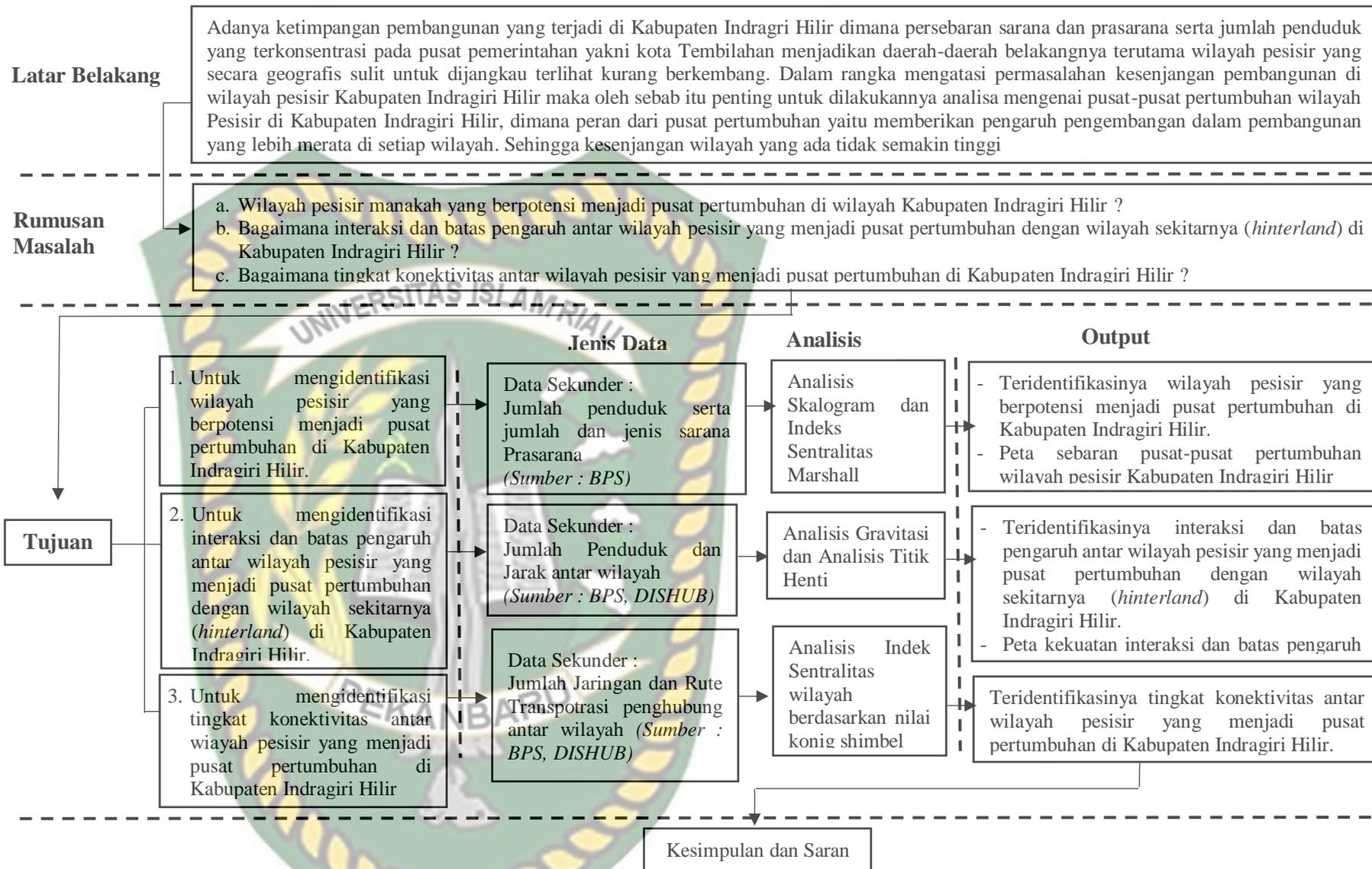


GAMBAR 1.2 PETA ADMINISTRASI KABUPTEN INDRAGIRI HILIR



GAMBAR 1.3 PETA LOKASI PENELITIAN

## 1.6. Kerangka Berfikir



Gambar 1.4. Kerangka Berfikir

Sumber : Peneliti 2019

## 1.8. Sistematika Penulisan

Penyajian penelitian ini dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TEORI**

Bab ini mengemukakan tentang pengertian umum terkait pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode pengolahan dan analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang deskripsi wilayah penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir dan lokasi penelitian yang terdiri dari 9 kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang analisis-analisis yang dilakukan untuk tercapainya tujuan penelitian, yaitu (i) analisis wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir, (ii) analisis kekuatan interaksi dan batas pengaruh masing-masing wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan terhadap wilayah *hinterland*-nya, dan (iii) analisis tingkat konektivitas antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian serta usulan-usulan yang berupa saran yang perlu dilakukan terkait hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan ruang di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misalnya dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang (25-30 tahun), perencanaan menengah (5-6 tahun), dan perencanaan pendek (1-2 tahun). Kedua bentuk perencanaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bersifat saling mengisi antara yang satu dengan lainnya. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2014).

Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencanaan pusat. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat suatu pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan yang lain.

Menurut Arsyad 1999, dalam Dewi, (2008), ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan adalah :

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*Steady Social Economic Growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini sering disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
- e. Usaha pemeratan pembangunan, sering disebut sebagai “ *Distributive Justice*”.
- f. Usaha pembangunan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g. Usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Selain ciri-ciri yang telah dijelaskan diatas, menurut Arsyad, 1999 dalam Dewi, (2008), setiap perencanaan pembangunan juga harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan yang lain.
- b. Adanya kerangka perencanaan makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
- d. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan.
- e. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral.
- f. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Menurut Muljarjadi (2000) yang perlu diingat dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan wilayah adalah bahwa penerapan seutuhnya dari suatu pola pembangunan wilayah lain terhadap suatu wilayah, belum tentu akan mencapai hasil yang sama seperti di wilayah asalnya.

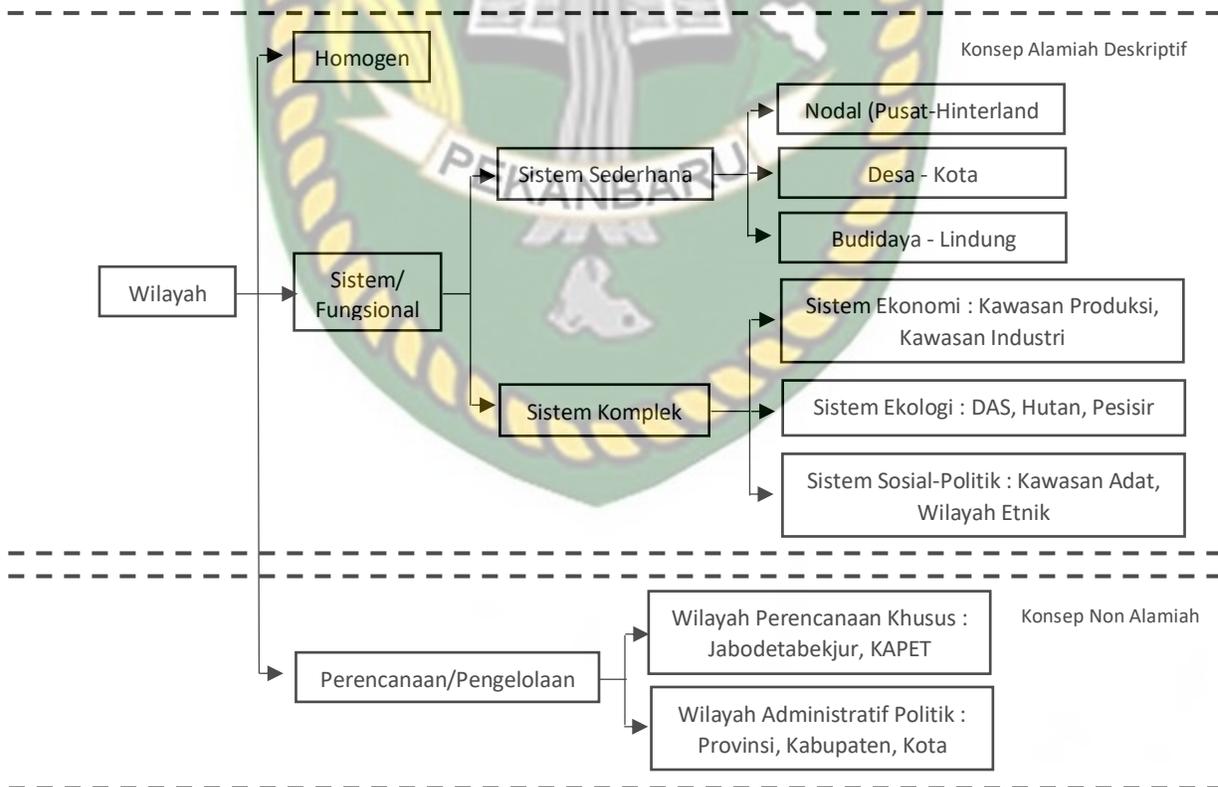
Baik dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional/wilayah. Pendekatan sektoral adalah dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam. Pendekatan regional adalah melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan di dalam ruang wilayah. Jadi dalam hal ini melihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan pada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi itu karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi dan perbedaan aktivitas utama di masing-masing ruang dimana perbedaan tersebut harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung menciptakan pertumbuhan yang serasi dan seimbang (Tarigan, 2005).

## **2.2. Konsep-Konsep Wilayah**

Konsep perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan wilayah. Menurut Rustiadi *et al.* (2011) wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sedangkan wilayah menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Pengembangan konsep wilayah dan penerapannya dalam dunia nyata akan menghasilkan suatu perwilayahan. Dengan demikian, klasifikasi spasial (pewilayahan) merupakan alat (*tools*) untuk mempermudah menjelaskan keragaman dan berbagai karakteristik fenomena yang ada. Pewilayahan digunakan sebagai alat untuk mengolah dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan pewilayahan digunakan untuk penerapan pengelolaan (manajemen) sumberdaya yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakteristik secara spasial.

Menurut Rustiadi *et al.* (2011) klasifikasi konsep wilayah adalah: (i) wilayah homogen (*uniform*), (ii) wilayah sistem/fungsional, dan (iii) wilayah perencanaan atau pengelolaan (*planning region atau programming region*). Berikut adalah deskripsi sistematis konsep-konsep wilayah.



Sumber : Rustiadi *et al.*, 2011

Gambar 2.1. Sistematika Konsep-Konsep Wilayah

Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, dengan kata lain wilayah homogen adalah wilayah-wilayah yang diidentifikasi berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor perinci yang menonjol di wilayah tersebut.

Konsep wilayah sistem/fungsional menekankan pada perbedaan dua komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. Wilayah dapat dipilah atas wilayah sistem sederhana (dikotomis) dan sistem kompleks (non dikotomis). Sistem sederhana adalah sistem yang bertumpu atas konsep ketergantungan atau keterkaitan antara dua bagian atau komponen wilayah. Berbeda dengan konsep wilayah sederhana, konsep wilayah suatu sistem kompleks mendeskripsikan wilayah sebagai suatu sistem yang bagian-bagian (komponen-komponen) di dalamnya bersifat kompleks. Sifat kompleks ditujukan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta keragaman bentuk hubungan antara komponen-komponen tersebut. Konsep-konsep wilayah system kompleks dapat dibagi atas wilayah sebagai (i) sistem ekologi (ekosistem), (ii) sistem sosial, (iii) sistem ekonomi atau gabungan atas dua atau lebih sistem.

Wilayah perencanaan/pengelolaan tidak selalu berwujud wilayah administratif tapi wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan/pengelolaan. Perwilayahan komoditas adalah contoh penetapan wilayah perencanaan/pengelolaan yang berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Suatu perwilayahan komoditas pertanian harus didasarkan pada kehomogenan faktor alamiah dan non alamiah. Adanya sistem perwilayahan

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi komoditas, karena perwilayahan komoditas pada dasarnya adalah suatu upaya memaksimalkan “*comparative advantage*” setiap wilayah (Rustiadi *et al.*, 2011).

### 2.3. Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir

Menurut Soegiarto 1976, dalam Rif'an.,*et al* (2017), wilayah pesisir merupakan suatu zona pertemuan antara darat dan laut, kearah darat mencakup bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang masih terpengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti Rob surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang terpengaruh oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat ditandai dengan 4 ciri (Rif'an *et al*, 2017) :

- a. Merupakan wilayah pencampuran atau pertemuan antara laut, darat dan udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses pembangunan ketiga unsur tersebut.
- b. Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan merupakan habitat dari berbagai jenis biota, tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan dan tempat berlindung bagi jenis biota laut dan pantai.

- c. Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat ekologi yang berbeda.
- d. Pada umumnya wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam suatu siklus rantai makanan di laut.

Untuk kepentingan pengelolaan, batas kearah darat dari suatu wilayah pesisir dapat ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day-today management*). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan. Batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan.

Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, kearah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografi (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan lain-lain) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, kearah laut daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar, dan lain-lain), maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Hasan, 2017).

Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan masa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang dinyatakan bahwa secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan

nutrien (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi perusakan lingkungan secara massif karena pencemaran maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*) ( Hasan, 2017).

### 2.3.1. Karakteristik Wilayah Pesisir

Menurut Marfa'i (2013), wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Berbagai karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir tersebut antara lain :

- a. Sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan fisik yang dipengaruhi angin dan gelombang.
- b. Termasuk ekosistem yang memiliki nilai tinggi karena produktivitas dan biodiversitas yang dimiliki sangat tinggi.
- c. Mempunyai sumberdaya yang dapat melindungi wilayah dari banjir, gelombang badai dan tsunami.
- d. Memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi banyak terdapat permukiman.
- e. Pusat kegiatan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia di lautan.

Menurut Marfa'I (2013), salah satu metode untuk melakukan identifikasi tentang kearifan lokal yang berkembang dalam suatu komunitas, dan untuk mengetahui potensi modal sosial (*social capital*) dalam suatu wilayah dapat diawali dengan menemukenali dan mengkaji karakteristik lokal dan potensi suatu wilayah pesisir. Karakteristik suatu wilayah, baik berupa karakteristik fisik, karakteristik sosial, karakteristik ekonomi, karakteristik budaya, karakteristik kependudukan,

maupun karakteristik lingkungan, dan lain sebagainya akan memengaruhi perilaku, pola adaptasi, dan bentuk-bentuk kearifan dalam suatu masyarakat. Banyak pendekatan dan perspektif yang dapat digunakan untuk dapat menemukenali berbagai karakteristik suatu wilayah. dalam disiplin keilmuan geografi, karakteristik wilayah dapat diketahui melalui data sekunder berupa telaah dan kajian-kajian literatur, laporan-laporan penelitian, dan lain sebagainya.

Data sekunder dapat diperoleh dari survei instansional dengan jalan mengunjungi instansi-instansi pemerintah untuk dapat memperoleh data dan monograf. Pemerolehan data juga dapat dilakukan melalui pengukuran-pengukuran dan observasi di lapangan. Pemerolehan data dengan cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, angket, dan alat-alat untuk pengukuran karakteristik fisik (Marfai, 2013).

Pada bagian ini dijabarkan dua sebagian besar, yaitu tentang karakteristik suatu wilayah yang disajikan dalam bentuk data-data kewilayahan dan tentang dinamika pesisir. Dinamika pesisir akan membahas berbagai proses fisik yang memengaruhi perubahan lingkungan dan dapat mengganggu, mengusik, dan mengubah kondisi suatu ekosistem dan sistem kehidupan lainnya, misalnya sistem sosial (Marfai, 2015).

Data terkait karakteristik dan potensi kewilayahan dapat membantu menemukenali dan membantu untuk melakukan analisis dalam mengidentifikasi kearifan lokal (terutama data-data terkait kondisi sosial ekonomi) dalam suatu wilayah. Uraian yang disajikan pada bagian ini berupa sajian contoh data dan

karakteristik suatu wilayah pesisir, Dengan menggunakan pertimbangan kompleksitas permasalahan, adanya pengaruh berbagai faktor kehidupan di pesisir, dan adanya perubahan-perubahan di lingkungan pesisir yang sangat kontras dan jelas terlihat (Marfai, 2015).

### 2.3.2. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Program pengelolaan multi-sektor di wilayah pesisir yang rentan membutuhkan keterpaduan sehingga semua *stakeholder* dan lembaga pemerintah yang dipengaruhi terlibat didalam pengelolaan wilayah pesisir ini merupakan tindakan kuratif, yaitu “masalah wilayah pesisir sudah terjadi” kemudian dicarikan solusinya. Beberapa alasan menginisiasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah munculnya beberapa masalah lingkungan seperti penurunan sumberdaya, pencemaran atau kerusakan ekosistem. Alasan-alasan tersebut berbeda yang terjadi di negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara maju.

Di negara berkembang dan sedang berkembang, alasan utama menginisiasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah menyangkut isu-isu lingkungan, sedang alasan menginisiasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu di negara maju lebih umum disebabkan kegiatan pembangunan ekonomi (manfaat ekonomi) dari pesisir dan laut (Cicin-Sain dan Kencht, 1998, dalam Hasan 2017). Selanjutnya cicin-sain, *et al.* menjelaskan bahwa pengelolaan pesisir dan laut terpadu dibutuhkan karena 2 alasan utama, yaitu : (1) pengaruh pemanfaatan pesisir dan laut, seperti juga kegiatan jauh ke hulu (*upland*) dapat mencapai lingkungan pesisir dan laut, dan (2) pengaruh

pengguna (*users*) pesisir dan laut dan mempengaruhi salah satu diantaranya. Aspek sentral pengelolaan pesisir terpadu adalah konsep “terpadu”.

Wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administrasi dan wilayah perencanaan. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah sentra produksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya tergolong di bawah garis kemiskinan (Hasan, 2017). Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkoataan sebagai intinya, bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubungan dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan penyedia input (pasar input) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (*output*) dari inti. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir juga dapat berupa wilayah yang relatif kecil kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota dalam bentuk pulau kecil.

Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan oleh ekologis sehingga melewati batas-batas satuan wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan biofisik-ekologis dalam wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah tersebut tapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem (kawasan). Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan wilayah diperlukan suatu perencanaan

terpadu yang tidak menutup kemungkinan adalah lintas batas administratif. (Hajrah, dalam Hasan 2017).

Kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki *locational rent* yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh nilai lokasi (*locational rent*), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur *economic rent* lainnya, yakni : *ricardian rent*, *environmental rent*, dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah nilai berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan-kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu. Dalam mekanisme pasar umumnya, hanya *locational* dan *ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya (Hajrah, dalam Hasan 2017).

Menurut Hajrah 2016 dalam Hasan, (2017), peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

- a. Basis ekonomi wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaru,
- b. Memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan,
- c. Efek ganda yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah,
- d. Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian dan
- e. Terjadinya secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan

Pengelolaan pembangunan wilayah sangat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan sumberdaya alam yang baik dapat memberikan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik berdampak buruk bagi umat manusia. Oleh karena itu pertanyaan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana mengelola sumberdaya alam tersebut di dalam suatu wilayah untuk dapat

menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya alam. Tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir adalah :

- a. Pendayagunaan potensi pesisir dan lautan, untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan pelaku pengelolaan dan pengembangan pesisir dan dapat bermanfaat bagi perekonomian daerah,
- b. Adanya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan ekosistem wilayah pesisir dalam mendukung kelestarian sumberdaya pesisirnya dan lautan khususnya.

Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat memberikan ruang lingkup antar sektor yang ada di wilayah pesisir untuk bersinergi secara total guna memanfaatkan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan (Hajrah, dalam Hasan 2017).

#### **2.4. Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)**

Teori pusat pertumbuhan atau *Growth Poles Theory* diperkenalkan oleh ekonom asal Perancis, Francis Perroux. Sjafrizal (2008) menjelaskan teori Perroux tentang *pole croisanse* atau *pole de development* yang artinya pusat pertumbuhan sebagai perangkat industri-industri yang sedang mengalami perkembangan dan berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya.

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi (*Agglomeration Economies*) yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi. Munculnya beberapa konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut selanjutnya mendorong pula pada peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi yang berdampak positif pada pembangunan ekonomi nasional (Priyadi, U. dan Eko Admadji, 2017).

Menurut Tarigan (2005) pusat pertumbuhan dapat di artikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Pusat pertumbuhan secara fungsional adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (wilayah belakangnya). Sedangkan pusat pertumbuhan secara geografis adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut.

Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu sebagai berikut (Tarigan, 2005) :

- a. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

- b. Ada efek pengganda, keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari daerah belakangnya akan meningkat juga.
- c. Adanya konsentrasi geografis, konsentrasi berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Sehingga dapat meningkatkan *economic of scale*.
- d. Bersifat mendorong wilayah belakangnya, Hal ini berarti kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Menurut Samsudin 2003 dalam Yulianto (2015), beberapa hal yang dapat dicapai melalui konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru antara lain adalah :

- a. Pendapatan daerah secara keseluruhan akan meningkat dan merata seperti yang dikatakan Richardson bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan akan mencapai maksimal apabila pembangunan dipusatkan di pusat-pusat pertumbuhan daripada pembangunan itu dipencar-pencar secara terpisah di seluruh daerah.

- b. Penyediaan prasarana dan perumahan lebih mudah dan murah apabila dipusatkan pada titik-titik pertumbuhan daripada terpecah.
- c. Yang terpenting adalah titik pertumbuhan baru dapat menampung tenaga kerja sehingga persoalan pengangguran di pusat utama maupun daerah sekitarnya dapat ditanggulangi.
- d. Titik-titik pertumbuhan dapat berfungsi sebagai pembendung arus pendatang ke pusat utama karena umumnya pendorong arus migrasi adalah rendahnya tingkat kehidupan. Dengan demikian arus migrasi ke pusat utama dapat dibendung di titik ini.
- e. Konsentrasi penduduk tidak terjadi pada pusat utama saja sehingga beban kota utama dalam penyediaan fasilitas dan lapangan kerja dapat dikurangi.

Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya.

Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu (Danastri, 2011 dalam Hasan, 2017) :

- a. Pusat Pertumbuhan Primer (utama)

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya

b. Pusat Pertumbuhan Sekunder (kedua)

Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

c. Pusat Pertumbuhan Tersier (ketiga)

Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut :

a. Pusat pertumbuhan menurut Perroux

Menurut Perroux (dalam Ginting, 2018), berdasarkan fakta dasar perkembangan keruangan (spasial), pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik ataupun kutub-kutub perkembangan, dengan kadar intensitas yang berubah-ubah, dan pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian.

b. Pusat Pertumbuhan menurut Richardson

Richardson memberi definisi pusat pertumbuhan sebagai: “A *growth pole* was defined as a set of industries capable of generating dynamic growth in the industry (*propulsive industry*)”. Dari definisi tersebut Richardson menjabarkan empat karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan, yaitu :

- i. Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu.
- ii. Konsentrasi ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian.
- iii. Terdapat keterkaitan *input* dan *output* yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.
- iv. Dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pusat tersebut.

c. Pusat pertumbuhan menurut Alonso

Alonso (dalam Ginting, 2018) menyatakan bahwa teori pusat pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota. Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya *trickle down effect* (dampak penetasan ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan.

## 2.5. Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru

Untuk menentukan dan mengembangkan sebuah pusat pertumbuhan secara baik dan terarah, maka diperlukan beberapa langkah atau tahapan dalam kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya antara daerah pusat pertumbuhan dan daerah dibelakangnya (*hinterland*). Untuk itu, dalam pelaksanaan penentuan dan pengembangan suatu wilayah perlu dilakukan secara berurutan mulai dari kegiatan pertama sampai dengan terakhir.

Menurut Sjahrizal (2008), Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam penentuan dan pengembangan pusat pertumbuhan suatu daerah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini perhatian pertama perlu diarahkan pada ketersediaan jaringan jalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah cangkupan. Langkah kedua adalah meneliti potensi ekonomi wilayah terkait berikut komoditas unggulan yang sudah dimiliki dan atau potensial untuk dikembangkan. Langkah ketiga meneliti keterkaitan hubungan input output dari masing-masing industri dan kegiatan potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan bersangkutan. Langkah keempat menentukan jenis sarana prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan tersebut. Langkah kelima merupakan langkah terakhir adalah membentuk sebuah organisasi yang akan mengelola dan mengkoordinasi kompleks industri atau pusat pertumbuhan tersebut.

## 2.6. Tinjauan Penentuan Hirarki Wilayah

Hirarki wilayah berfungsi untuk menggambarkan urutan tingkat perkembangan wilayah yang bermanfaat bagi perencanaan organisasi struktur ruang dan pusat pertumbuhan. Hirarki wilayah juga sangat terkait dengan hirarki fasilitas kepentingan umum yang ada pada masing-masing wilayah. Hirarki wilayah dapat membantu untuk menentukan fasilitas apa yang ada dan perlu dibangun di suatu wilayah. Fasilitas kepentingan umum bukan hanya menyangkut jenisnya, tetapi juga kapasitas pelayanan dan kualitasnya (Tarigan, 2005).

Menurut Tarigan (2005), ada beberapa metode untuk menetapkan hirarki/orde suatu wilayah yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

### a. Hanya Menggunakan Variabel Penduduk

Terdapat beberapa metode analisis yang hanya menggunakan variabel penduduk dalam kelompok ini diantaranya adalah *Christaller*, *Rank Size Rule*, dan metode *Zipf*. Setelah seluruh kota dalam wilayah analisis diidentifikasi, kemudian dihitung jumlah penduduk disetiap kota. Kemudian, kota diurutkan berdasarkan jumlah penduduknya mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu, kota-kota itu dibagi kedalam beberapa kelas. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah, kelompok ini dinilai terlalu sederhana karena hanya menggunakan satu variabel jumlah penduduk dalam analisisnya.

b. Persentase Hubungan Keluar

Sebuah wilayah tidak mungkin tidak melakukan hubungan keluar, hubungan keluar tersebut dapat berupa hubungan dengan daerah belakangnya (termasuk dengan wilayah orde/hirarki lebih tinggi). Hubungan ini dapat berupa membeli bahan baku, menyediakan kebutuhan daerah belakang termasuk pemanfaatan berbagai fasilitas yang ada di wilayah oleh masyarakat di daerah belakangnya, dan arus tenaga kerja.

Banyaknya hubungan keluar ini dinyatakan dengan jumlah trip masuk, karena setiap trip pergi akan diikuti dengan trip pulang. Perbedaannya untuk hari tertentu hanya apabila hari pergi dan hari pulang tidak sama, akan tetapi apabila masa pengamatan diperpanjang maka jumlah trip pergi dan trip pulang semestinya sama. Trip dalam hal ini dapat dinyatakan dalam satuan orang atau mobil penumpang (SMP). Dalam praktik yang banyak digunakan adalah SMP karena mudah menghitungnya. Pada setiap wilayah dapat dihitung jumlah trip keluar dari wilayah tersebut. Persentase trip keluar di antara pasangan wilayah dapat digunakan untuk menentukan perbedaan orde/hirarki dari kedua wilayah tersebut, artinya dapat ditentukan wilayah mana yang lebih tinggi orde/hirarkinya di antara kedua wilayah tersebut. Wilayah dengan persentase keluar ke wilayah pasangannya yang lebih rendah dinyatakan memiliki orde/hirarki lebih tinggi.

Permasalahan dalam penggunaan metode ini adalah tidak semua wilayah berhubungan erat. Walaupun bisa ditetapkan perbedaan orde/hirarki

antara pasangan wilayah tetapi tetap sulit untuk membandingkan orde/hirarki keseluruhan wilayah-wilayah yang di analisis tersebut.

c. Gabungan Beberapa Variabel

Penentuan orde/hirarki wilayah dapat didasarkan pada beberapa variabel. Variabel yang umum dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde/hirarki wilayah adalah jumlah penduduk, banyaknya fasilitas yang dimiliki, dan tingkat aksesibilitas dari wilayah tersebut. Adapun beberapa metode analisis yang biasa digunakan dalam kelompok ini adalah dengan metode Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall. Ada beberapa faktor yang tidak diragukan lagi dalam menciptakan daya tarik bagi sebuah kota, seperti pasar, kompleks pertokoan, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan perbankan, pemerintahan. Dalam analisis ini untuk mengukur fasilitas yang tersedia di suatu wilayah, jumlah dan kualitas dari masing-masing fasilitas perlu di data dan dihitung jumlahnya.

**2.6.1. Manfaat Hirarki Wilayah**

Menurut Tarigan (2005), beberapa manfaat dari penetapan hirarki suatu wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Hirarki wilayah dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan program, yaitu menentukan jenis dan besarnya fasilitas yang perlu dibangun di suatu wilayah tersebut sesuai dengan luas wilayah belakang dari pusat pertumbuhan.

- b. Hirarki wilayah bersama-sama dengan unsur pembentuk struktur ruang lainnya dapat digunakan untuk meramalkan bagian wilayah mana yang akan cepat berkembang. Hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi dari berbagai fasilitas yang sesuai dengan luas daerah yang hendak dilayani, apabila ada dari bagian kota/wilayah yang diramalkan akan cepat berkembang/naik ke hirarki yang lebih tinggi. Makin tinggi hirarki suatu wilayah makin tinggi fasilitas yang harus disediakan.
- c. Mudah memonitor apakah terjadi perubahan bentuk hubungan antara wilayah hirarki yang lebih tinggi dengan wilayah hirarki yang lebih rendah. Sejalan dengan itu, dapat memonitor wilayah-wilayah yang bertumbuh cepat dan lambat.
- d. Sebagai bahan masukan untuk perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penetapan kebijakan tentang keseimbangan pertumbuhan antar wiayah dan antara wilayah dengan daerah belakangnya.

### **2.7. Teori Lokasi**

Teori lokasi atau tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan dikenal sebagai teori pertumbuhan. Teori lokasi menurut Christaller pada dasarnya menyatakan bahwa pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan). Menurut Christaller (dalam Sugianto dan Sukesni, 2010) terdapat empat faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan : (1) faktor lokasi ekonomi,

(2) faktor ketersediaan sumberdaya, (3) kekuatan aglomerasi, dan (4) faktor investasi pemerintah.

Menurut Tarigan (2005), landasan dari lokasi adalah ruang. Tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawahnya sepanjang manusia bisa menjangkaunya (Tarigan, 2005). Namun dalam studi ruang, yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan kita untuk membuat daftar tentang posisi berbagai benda/kegiatan yang ada dalam satu ruang wilayah melainkan analisis atas dampak/keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan lain pada lokasi lain. Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan/berjauhan tersebut.

Menurut Tarigan (2005), teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu sosial yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai usaha/kegiatan lain baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja/acak berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan (mekanisme) yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti.

## 2.8. Teori Interaksi Spasial

Interaksi sepasial adalah hubungan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, interaksi yang dimaksud seperti interaksi perdagangan dengan motif ekonomi. Adapun beberapa interaksi menurut Rondinelli (dalam Yulianto, 2015) terdiri dari :

- a. Keterkaitan fisik, berbentuk integrasi manusia melalui jaringan transportasi baik alami, maupun rekayasa.
- b. Keterkaitan ekonomi, berkaitan erat dengan pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur serta modal dan keterkaitan produksi ke depan (*forward linkages*) maupun ke belakang (*backward linkages*) diantara berbagai kegiatan ekonomi.
- c. Keterkaitan penduduk, terjadi dari pola migrasi baik permanen maupun kontemporer.
- d. Keterkaitan teknologi, terutama peralatan yaitu cara dan metode produksi harus integrasi secara spasial dan fungsional.
- e. Keterkaitan sosial yang merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi terhadap pola hubungan sosial penduduk.
- f. Keterkaitan pelayanan sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, dan sebagainya.
- g. Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan misalnya pada struktur perbatasan administrasi maupun sistem anggaran dan biaya pembangunan.

Pengertian interaksi menurut Edward Ullman diestimasikan berdasarkan tiga faktor, yaitu (Daldjoeni, 1992) :

- a. Adanya wilayah yang saling melengkapi, yaitu wilayah yang berbeda sumber daya sehingga terjadi aliran yang sangat besar dan membangkitkan interaksi spasial yang sangat tinggi.
- b. Kesempatan berinteraksi, yaitu kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya interaksi.
- c. Kemudahan transfer dalam ruang, yaitu fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata, yang termasuk karakteristik khusus dari komoditi yang ditransfer. Arus transfer yang dapat terjadi antara lain berupa :
  - i. Arus ekonomi : barang, penumpang kereta api, jalan.
  - ii. Arus sosial : pelajar, mahasiswa, pedagang.
  - iii. Arus politik : pengeluaran pemerintah.
  - iv. Arus informasi : telegram, telepon.

## 2.9. Teori Gravitasi

Salah satu model yang banyak digunakan dalam perencanaan wilayah adalah model gravitasi (*gravity model*). Model ini dapat membantu perencana wilayah untuk memperkirakan daya Tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lain di sekitarnya. Hal ini biasa dimanfaatkan untuk simulasi apakah suatu fasilitas yang dibangun pada lokasi tertentu akan menarik cukup pelanggan atau tidak (Tarigan, 2005).

Teori gravitasi pertama kali diperkenalkan dalam ilmu fisika oleh Sir Issac Newton. Utoyo 2007 dalam Priyadi, U. dan Eko Admadji (2017), memaparkan inti dari teori gravitasi bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. W.J. Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut.

Teori gravitasi ini dapat digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh interaksi antar wilayah yang berdekatan secara kuantitatif, dengan asumsi bahwa suatu wilayah sebagai benda dan jumlah penduduk dari wilayah yang bersangkutan sebagai massanya. Besarnya kekuatan interaksi dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan atau transportasi dan komunikasi antara dua wilayah. Wujud dari perpindahan tersebut dapat berbentuk orang, barang, jasa, ataupun berupa informasi (Hartono, 2007).

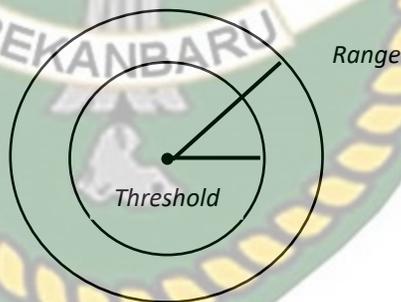
#### **2.10. Wilayah Pengaruh**

Analisis wilayah pengaruh digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sebuah daerah terhadap daerah dibelakangnya (*hinterland*). Pengaruh yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaruh keruangan. Yaitu pengaruh pusat kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan berorde tinggi terhadap daerah – daerah pengaruhnya. Sebuah wilayah apabila dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan-kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi serta dalam menjual hasil produksinya-cenderung bergantung pada pusat pertumbuhan/kota tersebut dikatakan sebagai wilayah pengaruh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Daerah ini seperti daerah

pedalaman, wilayah belakang (*hinterland*), dan daerah pertanian atau daerah perdesaan (Tarigan, 2005).

Jarak tempuh dari pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya akan menjadi pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk di wilayah pengaruhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Richardson (2001) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Menurut Tarigan (2005) jangkauan wilayah pemasaran/pengaruh mempunyai batasan yang dinamakan *range* dan batas minimal pengaruh disebut *threshold*. Tidak boleh ada produsen untuk komoditas yang sama dalam ruang *threshold* tersebut. Apabila ada salah satu akan gulung tikar atau kedua - duanya akan gulung tikar. Hubungan *range* dan *threshold* digambarkan sebagai berikut.



Sumber : Tarigan, 2005

Gambar 2.2. Luas Jangkauan *Range* dan *Threshold*

Untuk mengetahui batas pengaruh dari suatu wilayah pusat pertumbuhan terhadap wilayah belakangnya dapat ditentukan dengan analisis *Break Point*, dimana batas pengaruh suatu wilayah sangat ditentukan oleh besar kecilnya bobot daya Tarik wilayah, tingkatan (orde) dan jarak, semakin besar daya Tarik suatu wilayah maka akan semakin jauh batas pengaruhnya (Muta'ali, 2015).

### **2.11. Konektivitas Antar Wilayah**

Konektivitas antar wilayah merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan, dimana semakin tinggi tingkat konektivitas suatu wilayah maka semakin strategis wilayah tersebut, begitu pula tingkat perkembangannya (Muta'ali, 2015). Konektivitas wilayah dapat di ukur berdasarkan aspek lokasi geografis, dimana wilayah tersebut dicirikan dengan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang menghubungkan dan mengumpul pada wilayah tersebut (Nurhadi, 2018).

Konektivitas wilayah memiliki tiga konsep utama yaitu sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keragaman (*Inclusive Development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan.
- b. Memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supply chain system* yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat pertumbuhan.

- c. Mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

## 2.12. Teori Keseimbangan dan Ketidakseimbangan dalam Pembangunan

Secara geografis pertumbuhan tidak seimbang terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada satu atau beberapa pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*) itu akan memberikan dampak penitisan (*trickling down effect*). Menurut LPEM dalam Yulianto (2015), teori pertumbuhan tidak seimbang dikemukakan oleh Hirschman, Myrdall dan Perroux sebagai tokoh-tokoh pendukungnya. Hirschman mengemukakan bahwa strategi pembangunan harus konsentrasi pada beberapa sektor dari pada proyek yang tersebar luas, sektor kunci ditentukan dengan mengukur dampak *backward linkage* dan *forward linkage* yang memaksimalkan *input-output*. Pertumbuhan dijalankan dari sektor-sektor ekonomi unggulan ke sektor-sektor lainnya dari satu perusahaan ke yang lain. Keuntungan dari pendekatan ini dibandingkan “pertumbuhan berimbang” adalah lebih ekonomis dalam pemakaian sumberdaya yang langka.

Menurut Hirschman dalam Hasan (2017), secara geografis pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Selalu dapat dilihat bahwa kemajuan di suatu tempat menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dorongan kearah perkembangan pada tempat originalnya sebelum disebarkan keberbagai tempat atau pusat pertumbuhan (*growing centre*) dan bukan kutub pertumbuhan (*growth pole*) seperti yang digunakan oleh Perroux dan ahli-ahli lainnya. Di suatu negara terdapat

titik pertumbuhan, dimana industri-industri berkelompok di tempat-tempat itu karena diperolehnya berbagai manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja, dan upah buruh yang relatif tinggi, lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan dari pada di daerah-daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh polarisasi yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorbi tenaga kerja yang terampil dan dilain pihak akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat komplementaris antara dua tempat tersebut. (Rahardjo 2004, dalam Hasan 2017).

Jika komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah - daerah belakang (*trickling down effect*) dan sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi dampak polarisasi, (*polarization effect*) (J.Friedman dan Alonso). Jika polarisasi lebih kuat dari dampak penyebaran pembangunan maka akan timbul masyarakat yang dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki ciri-ciri daerah pedesaan terbelakang. Walaupun terlihat suatu kecenderungan yang suram, namun Hirschman optimis dan percaya bahwa pada akhirnya pengaruh *trickling down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya, jika daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah pedesaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong perkembangan daerah pedesaan, tetapi ada yang terjadi mungkin tidak selancar seperti itu.

Pada khususnya ada kemungkinan besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah pedesaan adalah sedemikian rendahnya sehingga dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah perkotaan. Dalam jangka panjang penghematan - penghematan eksternal dan tersedianya komplementaris di pusat-pusat akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah di sekitarnya (Nursyam, 2013).

### **2.13. Pengembangan Wilayah Dalam Pandangan Islam**

Manusia di dalam Al-Qur'an disebut sebagai pemimpin (Khalifah) di muka bumi, dimana seorang manusia diciptakan harus mampu memimpin dunia, antara lain berarti bahwa manusia diberikan kekuasaan penuh dalam mengelola segala potensi alam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahuwata'ala. Sebagai makhluk yang diberikan kekuasaan untuk mengelola segala potensi yang ada di bumi, tentunya manusia harus mampu menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan pengelolaan yang baik dan didasari ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahuwata'ala memerintahkan manusia untuk mengadakan perbaikan/penataan terhadap bumi dan potensi alam yang dikaruniakan kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut :

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرًا لِمُسْرِفِينَ ۖ الَّذِينَ يَنفُسِدُ وَاغْيَالًا رَّضْوًا لَا يُصْلِحُونَ ۖ

Artinya :

“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan ( Q.S. Asy-Syu’ara’ Ayat : 151-152 )

Menurut Tafsir Al-Misbah ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat melarang menaati perintah orang yang melampaui batas, yang melakukan kerusakan di bumi dan tidak melakukan perbaikan, yang dijelaskan dalam kata al-musrifin di ambil dari kata saraf, yakni pelampauan batas yang ditujukan kepada kaum-kaum kafir. Jika dipahami demikian, maka perintah dan nasihat itu hanya untuk masyarakat umum, (Shihab, 2012 dalam Hasan 2017).

Perkembangan wilayah di barengi dengan penambahan penduduk yang terjadi selama ini menjadikan semakin sempitnya lahan di daerah-daerah perkotaan bahkan desa, berharap pembangunan dan perkembangan wilayah menuju *Button Up Top Down* yaitu perkembangan yang mengarah kepada masyarakat lapisan bawah, harapannya perkembangan wilayah merupakan investasi masa depan yang diperuntukkan untuk-generasi 10-30 tahun ke depan, tetapi terkadang hal itu menjadi sebuah konsep di atas kertas saja, yang artinya tidak pernah terealisasikan di lapangan.

Kebijakan pembangunan yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam terkadang akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar, sudah banyak kasus-kasus Tata Ruang kota yang perencanaannya tidak berpedomana pada nilai-nilai islam, akhirnya yang terjadi adalah kerusakan, dan bencana, yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Konsep perencanaan pembangunan didalam Islam sudah lama terkonsep dengan baik terbukti bahwa adanya kerajaan-kerajaan Islam dimasa kekhalfahan seperti Bani Ummayyah dan Abbasyah dimana rakyat yang dipimpin pada masa itu sangat sejahtera dan jauh dari kelaparan. Umat manusia yang telah di dahului oleh pemimpin-pemimpin seperti Rasulullah hingga kepada masa kekhalfahan lainnya patut untuk meneladani sikap-sikap yang dicontohkan sebelumnya tersebut baik dari segi kepemimpinan dan juga kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan kepada setiap pemimpin dan seluruh umat manusia untuk berlaku jujur dan adil dalam segala tindakan dan perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah di dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan untuk bersikap adil adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ تَحَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ ۖ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِ  
يْنَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلِلَّهِ أُولِيَّ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ أَن تَعْدُوا وَإِ  
ن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۖ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa : 135).*

Ketidakadilan hanya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, dimana orang yang salah yang diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar. Ketidakadilan akan semakin mempercepat terjadinya kerucuhan, kegaduhan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa, sementara tidak ada satu pihakpun yang memberi pertimbangan pendapat.

Kemiskinan dan persoalan-persoalan pembangunan yang selama ini terjadi lebih disebabkan pada persoalan struktural dan malfungsi kebijakan, baik yang berdimensi Regional, Nasional maupun Internasional. Yang terjadi pembangunan didunia Islam yang bercorak kepada liberalistik dan kapitalistik sehingga strategi pilihannya adalah pertumbuhan bukan kemakmuran rakyat kecil. Oleh sebab itu manusia baik sebagai rakyat biasa dan terutama yang berperan sebagai pemimpin yang memiliki kuasa untuk membuat suatu kebijakan tertentu wajib untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan tetap berlandaskan kepada sikap-sikap jujur dan berkeadilan,

sehingga tujuan dari pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat bias terwujud.

## 2.14. Sintesis Teori

Untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan kesimpulan, maka teori-teori yang telah disajikan sebelumnya dibuat dalam bentuk tabel ringkasan sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sintesis Teori**

No.	Teori	Sumber	Tahun	Sinopsis Hasil Pneliti
1	Perencanaan Pembangunan Wilayah	- Tarigan (2005), Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi. Dan - Sjafrizal (2014), Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi	2005 dan 2014	Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencana pergerakan ruang di dalam ruang wilayah) dan perencana kegiatan pada ruang wilayah tersebut (Tarigan, 2005). Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencanaan pusat. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat suatu pembangunan tertentu (Sjafrizal, 2014).
2	Konsep-Konsep Wilayah	Rustiadi et al, (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	2011	Menurut Rustiadi <i>et al.</i> (2011) wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Rustiadi <i>et al</i> mengklasifikasikan konsep-konsep wilayah sebagai berikut :

No.	Teori	Sumber	Tahun	Sinopsis Hasil Pnleiti
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah wilayah homogen (<i>uniform</i>),</li> <li>b. wilayah sistem/fungsional, dan</li> <li>c. wilayah perencanaan atau pengelolaan (<i>planning region atau programming region</i>)</li> </ul>
3	Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir	UU No. 1 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau	2014	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut.
4	Karakteristik Wilayah Pesisir	Aris Marfa'I (2013). Bencana Banjir ROB : Studi Pendahuluan Banjir Pesisir Jakarta	2013	Menurut Marfa'I (2013), Karakteristik Wilayah Pesisir adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan fisik yang dipengaruhi angin dan gelombang.</li> <li>b. Termasuk ekosistem yang memiliki nilai tinggi karena produktivitas dan biodiversitas yang dimiliki sangat tinggi.</li> <li>c. Mempunyai sumberdaya yang dapat melindungi wilayah dari banjir, gelombang badai dan tsunami.</li> <li>d. Memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi banyak terdapat permukiman.</li> <li>e. Pusat kegiatan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas manusia di lautan.</li> </ul>
5	Pengelolaan Wilayah Pesisir	Hajrah (Dalam Hasan, 2017)	2017	Hajrah (Dalam Hasan, 2017) Menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu. Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat memberikan ruang lingkup antar sektor yang ada di wilayah pesisir untuk bersinergi secara total guna memanfaatkan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

No.	Teori	Sumber	Tahun	Sinopsis Hasil Pneliti
6	Teori Pusat Pertumbuhan ( <i>Growth Pole</i> )	Tarigan (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah	2005	Menurut Tarigan (2005) pusat pertumbuhan dapat di artikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Pusat pertumbuhan secara fungsional adalah suatu lokasi kosentrasi kelompok usaha atau cabang indrustri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (wilayah belakangnya). Sedangkan pusat pertumbuhan secara geografis adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya 57atin ( <i>pole of attraction</i> ) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang 57ating memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut
7.	Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru	Sjafrizal (2008). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi	2008	Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam penentuan dan pengembangan pusat pertumbuhan suatu daerah menurut Sjahrizal (2008) menyebutkan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Langkah kedua adalah meneliti potensi ekonomi wilayah terkait berikut komoditas unggulan yang sudah dimiliki dan atau potensial untuk dikembangkan. Langkah ketiga meneliti keterkaitan hubungan input output dari masing-masing industri dan kegiatan potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan bersangkutan. Langkah keempat menentukan jenis sarana prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan tersebut. Langkah kelima merupakan langkah terakhir adalah membentuk sebuah organisasi yang akan mengelola dan mengkoordinasi komplek industri atau pusat pertumbuhan tersebut.

No.	Teori	Sumber	Tahun	Sinopsis Hasil Pneliti
8	Teori Gravitasi	Tarigan (2005) Perencanaan Pembangunan Wilayah	2005	Salah satu model yang banyak digunakan dalam perencanaan wilayah adalah model gravitasi ( <i>Gravity model</i> ). Model ini dapat membantu perencana wilayah untuk memperkirakan daya Tarik suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lain di sekitarnya. Hal ini biasa dimanfaatkan untuk simulasi apakah suatu fasilitas yang dibangun pada lokasi tertentu akan menarik cukup pelanggan atau tidak (Tarigan, 2005). Teori gravitasi ini dapat digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh interaksi antar wilayah yang berdekatan secara kuantitatif, dengan asumsi bahwa suatu wilayah sebagai benda dan jumlah penduduk dari wilayah yang bersangkutan sebagai massanya.
9	Wilayah Pengaruh	Tarigan (2005) Perencanaan Pembangunan Wilayah	2005	Analisis wilayah pengaruh digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sebuah daerah terhadap daerah dibelakangnya ( <i>hinterland</i> ). Pengaruh yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaruh keruangan. Yaitu pengaruh pusat kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan berorde tinggi terhadap daerah – daerah pengaruhnya.
10	Teori Interaksi Spasial	Yulianto (2015)	2015	Interaksi sepasial adalah hubungan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, interaksi yang dimaksud seperti interaksi perdagangan dengan motif ekonomi.
11	Teori Lokasi	Christaller (dalam Sgiantto dan Sukesni, 2010)	2010	Teori lokasi atau tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan dikenal sebagai teori pertumbuhan. Teori lokasi menurut Christaller pada dasarnya menyatakan bahwa pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan -

No.	Teori	Sumber	Tahun	Sinopsis Hasil Pneliti
				perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan).
12	Teori Keseimbangan dan Ketidakseimbangan Dalam Pembangunan	Yulianto (2015)	2015	Secara geografis pertumbuhan tidak seimbang terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada satu atau beberapa pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan ( <i>growth pole</i> ) itu akan memberikan dampak penitisan ( <i>trickling down effect</i> ).

Sumber : Peneliti, 2019

### 2.15. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan analisis pusat-pusat pertumbuhan bukan pertama kali dilakukan di Indonesia, dan untuk menilai keaslian penelitian yang dilakukan maka salah satu caranya adalah melalui penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya berkenaan dengan bahasan penelitian yang sama, sehingga dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan tentang analisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini dapat di lihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

**Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmat Adi Yulianto, 2015 (Skripsi)	Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes	Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi klasifikasi daerah Kecamatan di SWP Tengah Kab. Brebes.</li> <li>Menganalisis kekuatan interaksi keruangan antar Kecamatan di SWP Tengah</li> <li>Menganalisis kecamatan mana saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi SWP Tengah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Tipologi Klassen</li> <li>- Analisis Interaksi Spasial Secara Eksploratif</li> <li>- Analisis Skalogram</li> </ul>	Terdapat 3 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes yang termasuk dalam daerah tertinggal yaitu Kecamatan Songgom, Banjarharjo, dan Larangan. Kemudian dari kekuatan interaksi keruangan Kecamatan Jatibarang dan Larangan mempunyai daya tarik bagi masyarakat di SWP Tengah dilihat dari masyarakat di kecamatan lain lebih memilih memanfaatkan fasilitas yang ada di kedua kecamatan tersebut. Sementara itu dari hasil analisis skalogram, kecamatan dengan jumlah dan jenis fasilitas yang lengkap terdapat di Kecamatan Jatibarang dan Larangan. Dengan demikian dari kekuatan interaksi, jumlah dan jenis fasilitas yang lengkap Kecamatan Jatibarang dan Larangan dapat dijadikan pusat pertumbuhan baru di SWP Tengah Kabupaten Brebes.
2	Isti Farida, 2017 (Skripsi)	Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengetahui daerah mana yang cepat maju dan tumbuh di Provinsi Lampung.</li> <li>Untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologi kelas,</li> <li>- Skalogram,</li> <li>- Indeks sentralitas,</li> <li>- Skala ordinal,</li> <li>- ArcGIS dan</li> <li>- Indeks gravitasi.</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga daerah di Provinsi Lampung yang cepat maju dan tumbuh yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung-

No.	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				3. Untuk mengetahui kabupaten/kota mana yang memiliki nilai - interaksi spasial tertinggi dengan wilayah pusat pertumbuhan.		Selatan dengan wilayah hinterland yang memiliki interaksi paling tinggi dengan pusat pertumbuhan masing-masing adalah Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung.
3	Nurul Oktaviani Rosadi, 2017 (Skripsi)	Identifikasi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	Untuk mengetahui pusat pertumbuhan di Kabupaten Bandung sebagai strategi memecahkan permasalahan pembangunan daerah.	- Analisis Skalogram, dan - Analisis Gravitasi	Hasil analisis Skalogram menunjukkan erdapat 7 pusat pertumbuhan di Kabupaten Bandung. Pusat pertumbuhan tersebut di antaranya adalah kecamatan Soreang, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Cileunyi, dan Kecamatan Rancaekek. Sedangkan hasil analisis gravitasi menunjukkan setiap pusat pertumbuhan memiliki interaksi yang berbeda dengan daerah sekitarnya ( <i>Hinterland</i> ). Hubungan yang paling erat terjadi di antara kecamatan Baleendah dengan Kecamatan Bojongsoang. Selain itu analisis gravitasi juga menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara daerah pusat pertumbuhan dengan <i>hinterland</i> yang juga berperan sebagai pusat pertumbuhan.
4	Bruce Maldy Pratama, 2018 (Skripsi)	Analisis Hierarki Wilayah dan Interaksi Wilayah Untuk Penentuan Pusat Pelayanan di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Menganalisis hierarki wilayah dan interaksi wilayah di Kabupaten Lembata dan 2. Merumuskan perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah -	- Analisis Skalogram - Analisis Gravitasi - Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, di Kabupaten Lembata secara hierarkis memiliki 4 susunan kedudukan yang terdiri dari hierarki I, II, III, dan IV. Kecamatan Nubatukan merupakan kecamatan yang menduduki hierarki I sedangkan kecamatan lainnya hanya mampu menduduki hierarki IV.

No.	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				berbasis struktur spasial.		Interaksi wilayah yang paling lemah terjadi antara Kecamatan Nubatukan dengan Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Perumusan perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata disusun menjadi dua wilayah perencanaan yang terdiri dari wilayah perencanaan bagian barat pulau dan bagian timur pulau. Kecamatan Nubatukan ditetapkan sebagai PKL serta menjadi pusat pelayanan wilayah di bagian barat pulau. Kecamatan Omesuri ditetapkan sebagai PKLp serta menjadi pusat pelayanan wilayah dibagian timur pulau dan diproyeksikan akan menjadi PKL dimasa yang akan datang.
5	Imelda, 2013 (Jurnal)	Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Daerah Hinterland di Kota Palembang	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Mengidentifikasi Kecamatan-Kecamatan Mana Saja Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan dan Hinterland di Kota Palembang	Metode Skalogram	Pusat pertumbuhan primer di Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II, Sekunder adalah Kecamatan Ilir Barat 1 dan II (sebelah barat Palembang), Sukarami (Sebelah Utara Palembang), Kalidoni (Sebelah Timur), dan Seberang Ulu 2 (Sebelah Selatan Palembang) dan Sako (Sebelah Timur Palembang) sedangkan kecamatan lainnya adalah hinterland Kota Palembang.
6	Unggul Priyadi dan Eko Atmadji, 2017 (Jurnal)	Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	menganalisis kabupaten / kota yang menjadi pusat pertumbuhan dan wilayah <i>hinterland</i> di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	- Analisis Konsentrasi Daerah - Analisis Skalogram - Analisis Gravitasi	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 didapati Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan pada tahun 2016 yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kabupaten Sleman, kabupaten Bantul -

No.	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
						dan Kota Yogyakarta. Dalam analisis konsentrasi geografi diketahui bahwa fasilitas-fasilitas telah terdistribusi secara merata di kabupaten / kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian telah sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Yogyakarta.
7	Ni Nyoman Sri Andriyani dan Made Suyana Utama, 2015 (Jurnal)	Analisis Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Karangasem	Kabupaten Karangasem	Untuk mengetahui klasifikasi pola pertumbuhan ekonomi dan sektor basis tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karangasem serta mengetahui seberapa besar keterkaitan/daya tarik antara kecamatan yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Karangasem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis Tipologi Klassen</li> <li>- Location Quotient</li> <li>- Model Gravitasi</li> </ul>	Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari tiga alat analisis yang digunakan, bahwa Kecamatan Manggis dan Kecamatan Karangasem adalah tepat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki kriteria sebagai daerah maju dan tumbuh cepat (Tipe I), memiliki keterkaitan dengan kecamatan-kecamatan di sekitarnya, dan memiliki sektor-sektor basis yang berpotensi ekspor.
8.	Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina, Ernan Rustiadi, dan Sahara	<i>An Analysis Of The Level Of Development in Malang Regency Based on a Typology Of Development Regions</i>	Kabupaten Malang	Untuk menganalisis tingkat pembangunan Kabupaten Malang berbasis tipologi wilayah pengembangan melalui analisis terhadap keragaman sector perekonomian wilayah pengembangan, hirarki wilayah pengembangan, serta tingkat	Indeks Diversitas Entropi, Skalogram. dan Tingkat Aksesibilitas Wilayah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : analisis kluster menggunakan variabel yang lebih komprehensif dan proporsional mampu menggambarkan tipologi wilayah pengembangan Kabupaten Malang secara lebih baik, yang terbagi menjadi 3 kluster, yaitu : (1) WP I Lingkaran Kota Malang sebagai kluster tersendiri dengan tingkat perkembangan maju, (2) wp II Kepanjen, WP IV Tumpang, serta WP V Turen dan Dampit dengan tingkat

No.	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				aksesibilitas pada wilayah pengembangan.		perkembangan sedang, (3) WP III Ngantang dan WP VI Sumbermanjing Wetan dengan kondisi tingkat perkembangan rendah.

Sumber : Peneliti, 2019



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 1999). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 1999).

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Melalui sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto 2006 dalam Farida (2017), yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa observasi atau peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti dengan cara mendokumentasikan dan menyesuaikan kondisi lapangan dengan informasi-informasi yang peneliti miliki, sehingga peneliti bisa mendeskripsikan lokasi penelitian dengan baik. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2009 dalam Farida 2017). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, seperti BPS Kabupaten Indragiri Hilir, dan instansi-instansi pemerintahan terkait.

### 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi studi yang dijadikan objek dalam penelitian ini terletak di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, yang meliputi 9 (Sembilan) kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Pulau Burung,
2. Kecamatan Kateman,
3. Kecamatan Mandah,
4. Kecamatan Gaung Anak Serka,
5. Kecamatan Concong,
6. Kecamatan Kuala Indragiri,
7. Kecamatan Tanah Merah,
8. Kecamatan Sungai Batang, dan
9. Kecamatan Reth.

Adapun pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah yang cukup luas yang sebagian besarnya adalah wilayah pesisir yang secara geografis tidak mudah untuk dijangkau dan jauh dari pusat pemerintahan ibu kota kabupaten dimana konsentrasi pembangunan cenderung terpusat disana. Sehingga perlu untuk dilakukan kajian mengenai pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir guna untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian dimulai dari melakukan pembuatan proposal, melakukan penelitian, kegiatan survei lapangan, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama enam bulan yaitu pada tanggal 3 januari sampai dengan 19 juni 2019.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Adapun jenis data yang akan digunakan terbagi atas dua macam yaitu :

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Jenis data primer dalam penelitian ini adalah data-data hasil observasi lapangan seperti dokumentasi foto, rekaman, dan catatan yang berkaitan dengan topik penelitian dan kondisi eksisting lokasi penelitian dan lain sebagainya yang dapat membantu menjelaskan secara deskriptif tentang kondisi ruang lingkup studi atau data yang tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan perhitungan sederhana.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa catatan atau laporan-laporan yang telah dipublikasikan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir : dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, dan peta-peta terkait penelitian.
- b. BPS Kabupaten Indragiri Hilir : Kabupaten dalam angka, kecamatan-kecamatan dalam angka.
- c. DISHUB Kabupaten Indragiri Hilir : jumlah jaringan jalan, jalur transportasi darat, sungai dan laut.

- d. Sumber lain yang dapat dimanfaatkan sebagai data sekunder berupa studi literatur, referensi, dan artikel – artikel terkait topik penelitian.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa *check list*, yaitu membuat suatu daftar yang berisi nama subyek dan faktor yang hendak diteliti (Sugiyono, 2016). Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan memperhatikan fenomena yang nyata dilapangan terutama untuk mengetahui ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, infrastruktur, dan transportasi yang dapat menjangkau masing-masing wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Telaah pustaka

Yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca atau mengambil *literature* laporan, bahan perkuliahan dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Metode *Instansional*

Metode ini diperoleh melalui pengumpulan data pada instansi-instansi terkait guna mengetahui data kualitatif dan kuantitatif terkait obyek penelitian.

### 3.6. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Zulfahmi, 2016). Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Analisis	Sumber Data
1	Potensi pusat pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan jenis dan jumlah sarana prasarana (sosial, ekonomi, pemerintahan).</li> <li>- Jumlah Penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pendidikan</li> <li>- Sarana Kesehatan</li> <li>- Sarana Perekonomian</li> <li>- Sarana Peribadatan</li> </ul>	Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2	Kekuatan Interaksi dan Batas Pengaruh Wilayah Pusat Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penduduk dan Jarak antar wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan</li> <li>- Jarak Antar Masing-Masing Kecamatan</li> </ul>	Analisis Gravitasi dan Analisis Titik Henti	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3	Tingkat konektivitas antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Jaringan dan Rute Transportasi penghubung antar wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan Jalan</li> <li>- Rute Transportasi Sungai</li> </ul>	Analisis Indek Sentralitas berdasarkan nilai Konig Shimbel	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : Tarigan, 2005, Muta'ali, 2015.

### 3.7. Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.7.1. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall

Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu wilayah pesisir manakah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Analisis skalogram adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat ditentukan hierarki pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas pelayanan suatu wilayah (Rondinelli, 1985 dalam Atmadji, 2017). Analisis ini digunakan untuk melihat jumlah dan jenis fasilitas sarana prasarana yang berada pada tiap kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Dari jumlah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana tersebut dapat ditentukan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir adalah kecamatan yang paling lengkap fasilitasnya. Sedangkan kecamatan yang ketersediaan fasilitasnya kurang lengkap akan menjadi wilayah *hinterland* atau wilayah pendukung.

Secara umum untuk menentukan wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan melalui hirarki wilayah dapat menggunakan beberapa metode analisis selain skalogram dan indeks sentralitas Marshall (Tarigan, 2005). Metode-metode tersebut antara lain adalah metode Christaller, *Rank Size Rule*, dan metode

*Zipf*, namun dalam pelaksanaannya metode ini dinilai kurang akurat karena hanya menggunakan satu variabel dalam analisisnya, yakni variabel jumlah penduduk, dimana wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi akan menempati hirarki pertama dan seterusnya. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan diantaranya perbandingan jumlah penduduk yang bagaimana sebuah wilayah yang lebih kecil berada dibawah pengaruh wilayah lain yang jumlah penduduknya lebih besar dan lokasinya terdekat, sehingga untuk menjawabnya ketiga metode analisis ini lebih menekankan kondisi eksisting dilapangan yang lebih bersifat deskriptif.

Melalui pertimbangan tersebut diatas maka dalam penelitian ini digunakan analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall untuk menentukan hirarki wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan, dimana dalam analisis ini memiliki kelebihan dengan hasil yang lebih akurat melalui variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk dan jumlah serta jenis sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu wilayah (Tarigan, 2005). Prasarana wilayah menunjukkan fungsi wilayah. Penggunaan fungsi sarana dan prasarana wilayah dalam analisis skalogram mendasarkan pada tiga komponen fasilitas sarana prasarana dasar yang dimilikinya yaitu sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

- a. *Differentiation* adalah fasilitas perekonomian yang menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota. Jenis fasilitas ini seperti pusat perdagangan, took, bank, pasar, dan lain sebagainya.

- b. *Solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Jenis fasilitas ini adalah seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, gedung pertemuan, dan lain sebagainya.
- c. *Centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hierarki contoh jenis fasilitas ini seperti kantor pemerintahan dan pelayanan public lainnya.

Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan adanya *differentiation* dan *centrality* wilayah, sehingga semakin banyak dan beragam jenis fasilitas yang dimiliki suatu wilayah, semakin tinggi kecenderungan pemusatan sehingga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2015).

Bentuk skalogram yang dihasilkan adalah distribusi kelompok wilayah yang diurut berdasarkan jumlah jenis fasilitas yang dimiliki kelompok tersebut. Semakin tinggi jumlah jenis fasilitas, maka semakin di atas letak kelompok tersebut dalam skalogram. Dalam hal ini wilayah yang paling atas dianggap memiliki kemampuan pelayanan paling tinggi dan seterusnya menurun sampai pada kelompok bawah.

Setelah pengelompokan terbentuk, maka dapat dihitung persentase kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh wilayah dibandingkan dengan jumlah jenis keseluruhan fasilitas. Semakin tinggi persentase kelengkapan fasilitas suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan pelayanan wilayah tersebut. Dengan demikian, jika persentase kelengkapannya 100%, wilayah tersebut memiliki keseluruhan jenis fasilitas.

Metode skalogram dapat memberikan gambaran hubungan antara distribusi penduduk dan fasilitas sosial ekonomi dan secara tepat mampu menyajikan urutan tingkat perkembangan suatu wilayah yang bermanfaat bagi perencanaan organisasi struktur ruang dan pusat pertumbuhan, namun metode ini juga memiliki kelemahan yaitu distribusi nilai akhir yang tidak mempertimbangkan bobot dan pengaruh jenis-jenis fasilitas, sehingga perbedaan rentang nilai kecil dan sulit melakukan klasifikasi tata urutan hirarki wilayah.

Untuk menutupi kelemahan analisis skalogram di atas kemudian di sempurnakan lagi dengan Analisis indeks sentralitas Marshall (*Centrality Indeks Analysis*). Analisis indeks sentralitas Marshall merupakan lanjutan dari analisis skalogram, dimana analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pertumbuhan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu (Muta'ali, 2015).

Berikut ini adalah langkah–langkah dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall :

- a. Wilayah kecamatan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir di susun berdasarkan peringkat jumlah penduduk.
- b. Daerah-daerah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki.
- c. Kolom jenis fasilitas tiap wilayah diisi dengan nilai 1 (jika fasilitas yang dimaksud ada pada wilayah tersebut), dan nilai 0 (jika tidak ada fasilitas yang dimaksud pada wilayah tersebut).
- d. Isi kolom “jumlah jenis fasilitas” dengan menjumlahkan masing-masing fungsi/fasilitas yang ada pada tiap kecamatan (setiap baris).
- e. Pada baris “total fungsi” diisi dengan menjumlahkan jenis fungsi yang ada dari seluruh kecamatan (setiap kolom).

Selanjutnya menguji kelayakan skalogram dengan rumus *Coefisien Of Reproducibility* (COR) sebagai berikut :

$$(CR) = 1 - \frac{\sum e}{N - K}$$

*Sumber : Atmadji, 2017*

Keterangan :

CR = tingkat kesalahan

$\sum e$  = Jumlah kesalahan

N = Jumlah fasilitas

K = Jumlah kecamatan

Penelitian dengan analisis skalogram dapat dikatakan layak jika nilai COR sebesar 0,9 sampai dengan 1.

- f. Pada baris “sentralitas total”, pada setiap baris kolom memiliki nilai yang sama, yaitu 100.

Selanjutnya pada baris terakhir (nilai bobot) dilakukan pembobotan terhadap jumlah unit fasilitas (C) yang disebut sebagai nilai sentralitas fasilitas, dengan rumus sebagai berikut (Marshall, 1989 dalam Muta’ali, 2015) :

$$C = (x/X)$$

Keterangan :

C = bobot atribut fungsi x

x = nilai sentralitas gabungan = 100

X = jumlah total atribut dalam system

Hasil dari nilai pembobotan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, akan semakin kecil bobotnya, sebaliknya semakin rendah frekuensi keberadaan suatu fungsi, maka semakin tinggi nilai bobotnya.

- g. Langkah selanjutnya mengalikan nilai bobot fasilitas dengan nilai fungsi fasilitas setiap kecamatan/kolom. Setelah langkah tersebut selesai, maka selanjutnya menjumlahkan seluruh nilai bobot dari berbagai jenis fungsi setiap kecamatan. Penjumlahan tersebut akan menghasilkan nilai indeks sentralitas. Dari nilai indeks sentralitas tersebut dapat ditentukan hirarki

wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan diwilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk menentukan banyaknya kelas dari kecamatan sebagai pusat pertumbuhan menurut Tarigan (2007) maka digunakan metode Struges, dengan rumus sebagai berikut :

$$k = 1 + 3.3 \text{ Log } n \dots\dots\dots$$

Keterangan :

k = banyaknya kelas, dan

n = banyaknya kecamatan.

Kecamatan yang termasuk dalam kelas/orde 1 merupakan daerah dengan tingkat fasilitas paling tinggi, sedangkan kelas/orde yang terakhir adalah daerah tingkat fasilitas paling rendah. Adapun kelas/orde ini diurutkan sesuai dengan jumlah dan jenis fasilitas dari daerah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas paling lengkap sampai dengan daerah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas paling sedikit sesuai dengan interval masing-masing kelas. Untuk menentukan besarnya interval kelas yaitu dengan cara (Yulianto, 2015) :



$$I = \frac{A-B}{k} \dots\dots\dots$$

Dimana :

I = Interval kelas

A = Jumlah fasilitas tertinggi

B = Jumlah fasilitas terendah

K = Banyaknya kelas

Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah bahwa wilayah kecamatan yang termasuk dalam hierarki 1 merupakan daerah dengan tingkat fasilitas paling tinggi dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan, sedangkan hierarki yang terakhir adalah daerah tingkat fasilitas paling rendah. Adapun hierarki ini diurutkan sesuai dengan jumlah dan jenis fasilitas dari daerah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas paling lengkap sampai dengan daerah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas paling sedikit sesuai dengan urutan nilai sentralitas yang dimiliki.

Setelah nilai skalogram dan indeks sentralitas Marshall diketahui, selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut kedalam bentuk informasi spasial yaitu dengan memetakan lokasi-lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki yang didapatkan dari hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.1.

### 3.7.2. Analisis Gravitasi dan Titik Henti

Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya (*Hinterland*) di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 3.7.2.1. Analisis Gravitasi

Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu juga model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal dalam pembangunan fasilitas baru. Itulah sebabnya model gravitasi berfungsi ganda, yaitu sebagai teori lokasi dan sebagai alat dalam perencanaan.

Pada model ini wilayah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antar wilayah disamakan dengan hubungan antar massa. Massa wilayah juga mempunyai daya tarik, sehingga terjadi pengaruh mempengaruhi antar wilayah sebagai perwujudan kekuatan Tarik menarik antar wilayah. Model gravitasi diambil dari konsepsi fisika (newton) yang menyatakan daya tarik-menarik antar dua kutub magnet. Dengan demikian selain jarak

antar wilayah, potensi interaksi antar wilayah ditentukan oleh daya tarik wilayah seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam dan lingkungan, dan sebagainya (Tarigan, 2005).

Rumus dari model gravitasi ini adalah sebagai berikut (Tarigan, 2005) :

$$A_{ij} = k - \frac{P_i \times P_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan :

$A_{ij}$  = Besarnya interaksi wilayah I dengan wilayah j

$P_i$  = Jumlah penduduk di wilayah I, dalam ribuan jiwa

$P_j$  = Jumlah penduduk wilayah j, dalam ribuan jiwa

$d_{ij}$  = Jarak antara wilayah i dan j, dalam kilometer

$k$  = Angka konstanta empiris, bernilai 1

$b$  = Pangkat dari  $d_{ij}$  yang sering digunakan  $b = 2$

Konsep dasar dari alat analisis gravitasi dalam penelitian ini adalah membahas mengenai ukuran jarak wilayah antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya, seberapa kuat pusat pertumbuhan berinteraksi dengan daerah sekelilingnya. Semakin besar nilai interaksinya menunjukkan semakin eratnya hubungan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya (*hinterland*). Hubungan interaksi tersebut berupa hubungan ekonomi antar wilayah dan sosial masyarakatnya (Tarigan, 2005).

### 3.7.2.2. Analisis Titik Henti

Analisis titik henti (*Break Point*) bertujuan untuk menetapkan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya (*hinterland*) termasuk terhadap kota lain yang lebih kecil atau batas pengaruh antara pusat pertumbuhan satu dengan yang lainnya. Pengaruh suatu wilayah ditentukan oleh besar kecilnya bobot atau daya tarik wilayah, tingkatan (*orde*) kota dan jarak. Semakin jauh nilai titik henti dari wilayah yang di analisis maka semakin luas wilayah pengaruhnya, dengan demikian wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2013). Untuk mengukur batas pengaruh Harstshorn 1988, dalam Muta'ali (2015) menggunakan rumus yang dinamakan *breaking point theory* sebagai berikut :

$$BP = \frac{d}{1 + \sqrt{Pend.Z/Pend.Y}}$$

Keterangan :

d = Jarak antara kedua pusat pertumbuhan (dapat diukur dari pusat pemerintahan atau pusat ekonomi)

Pend.Z = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar)

Pend.Y = Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

Hasil dari perhitungan rumus diatas akan diketahui nilai batas pengaruh dari suatu wilayah dalam satuan jarak (meter/kilometer) yang diukur dari wilayah/kota yang memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah. Jika batas pengaruh diukur melalui wilayah/kota dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi

maka dapat dilakukan dengan mengurangi jarak antara kedua wilayah yang diukur dengan hasil perhitungan dari rumus tersebut diatas.

Selanjutnya, setelah nilai gravitasi dan batas pengaruh dari pusat pertumbuhan diketahui, maka langkah selanjutnya peneliti lakukan pemetaan batas pengaruh dan kekuatan interaksi wilayah dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.1 guna memberikan informasi keruangan berkaitan dengan hasil analisis yang dilakukan.

### 3.7.3. Analisis Indek Sentralitas Berdasarkan Nilai *Konig* dan *Shimbel*

Analisis indek sentralitas merupakan suatu analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat konektivitas antar wilayah dan nilai strategis wilayah berdasarkan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang berkumpul pada suatu wilayah. Wilayah yang memiliki nilai sentralitas tinggi merupakan pusat orientasi kegiatan dan menjadi wilayah tujuan (Muta'ali, 2015).

Formula teknik analisis konektivitas menurut (Whyne & Hammond, 1979 dalam Muta'ali, 2015) sebagai berikut :

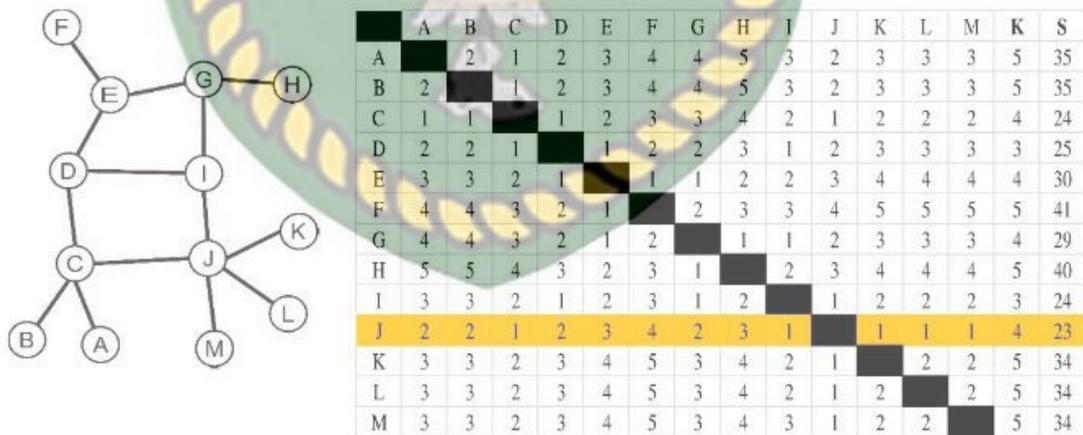
- a. *Konig* (K) yaitu jumlah maksimum keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 3.1. wilayah A memiliki nilai konig = 5 khususnya dengan wilayah H, yaitu untuk menuju wilayah H dari wilayah A harus menempuh lima jalur keterhubungan.
- b. *Shimbel* (S) yaitu total jumlah keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lain, dimana nilai Shimbel terendah pada contoh tabel 3.1. adalah I,-

yang berarti wilayah I paling mudah dan cepat dijangkau oleh wilayah – wilayah lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka langkah-langkah dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

- Menentukan jumlah rute penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik jalur penghubung darat maupun sungai atau laut.
- Memetakan masing-masing rute penghubung antar wilayah
- Membuat tabel jumlah rute penghubung masing-masing wilayah
- Menentukan nilai *Konig* (K) dan *Shimbel* (S) masing-masing wilayah, dimana nilai K= jumlah maksimum keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan nilai S= total jumlah keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya

Berikut ilustrasi rute terdekat dan jumlah rute terdekat dalam *konig* dan *shimbel* :



Gambar 3.1. Ilustrasi rute terdekat dan jumlah rute antar wilayah. K = *Konig* dan S = *Shimbel*

Sumber : Nurhadi, 2018

Semakin rendah nilai *Konig* dan *Shimbel*, maka semakin strategis dan tinggi konektivitas wilayah tersebut, sehingga tingkat perkembangan wilayahnya pun tinggi dan dapat digunakan sebagai pusat pertumbuhan (Muta'ali, 2015).

### 3.8. Desain Survei

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dan keseluruhan proses yang akan dilakukan dalam penelitian maka desain survei sangat penting untuk dibuat dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Untuk lebih jelasnya desain survei dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



### 3.2. Tabel Desain Survei

Tujuan	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Data	Sumber Data	Metode Analisis	Teknik Analisis	Output
Untuk mengidentifikasi wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir	Potensi Pusat Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan jenis dan jumlah sarana prasarana (sosial, ekonomi, pemerintahan).</li> <li>- Jumlah Penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana Pendidikan</li> <li>- Sarana Kesehatan</li> <li>- Sarana Perekonomian</li> <li>- Sarana Peribadatan</li> </ul>	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Badan Pusat Statistik (BPS)	Deskriptif Kuantitatif	Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teridentifikasi wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir.</li> <li>- Peta sebaran pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir</li> </ul>

Tujuan	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Data	Sumber Data	Metode Analisis	Teknik Analisis	Output
Untuk mengidentifikasi kekuatan interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya ( <i>hinterland</i> ) di Kabupaten Indragiri Hilir	Kekuatan Interaksi dan Batas Pengaruh Antar Pusat Pertumbuhan	- Jumlah Penduduk dan Jarak antar wilayah	- Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan - Jarak Antar Masing-Masing Kecamatan	Data Monografi Kabupaten Indragiri Hilir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Deskriptif Kuantitatif	Analisis Gravitasi Dan Titik Henti	- Teridentifikasi nya interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya ( <i>hinterland</i> ) di Kabupaten Indragiri Hilir. - Peta kekuatan interaksi dan batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan
Untuk mengidentifikasi tingkat konektivitas antar wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir	Tingkat konektivitas antar wilayah	- Jumlah Jaringan dan Rute Transpotras i penghubung antar wilayah	- Jaringan Jalan - Rute Transportasi Sungai	Analisis Indeks Sentralitas berdasarkan nilai konig shimbel	Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	Deskriptif Kuantitatif	Analisis Indeks Sentralitas berdasarkan nilai Konig dan Shimbel	Teridentifikasi nya tingkat konektivitas antar wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber : Peneliti, 2019

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

##### 4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 4.1.1.2. Letak Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah.

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36' LU – 10 07' LS dan 104 10' – 102 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.



*Sumber : Hasil Survei, 2019*

**Gambar 4.1. Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir**

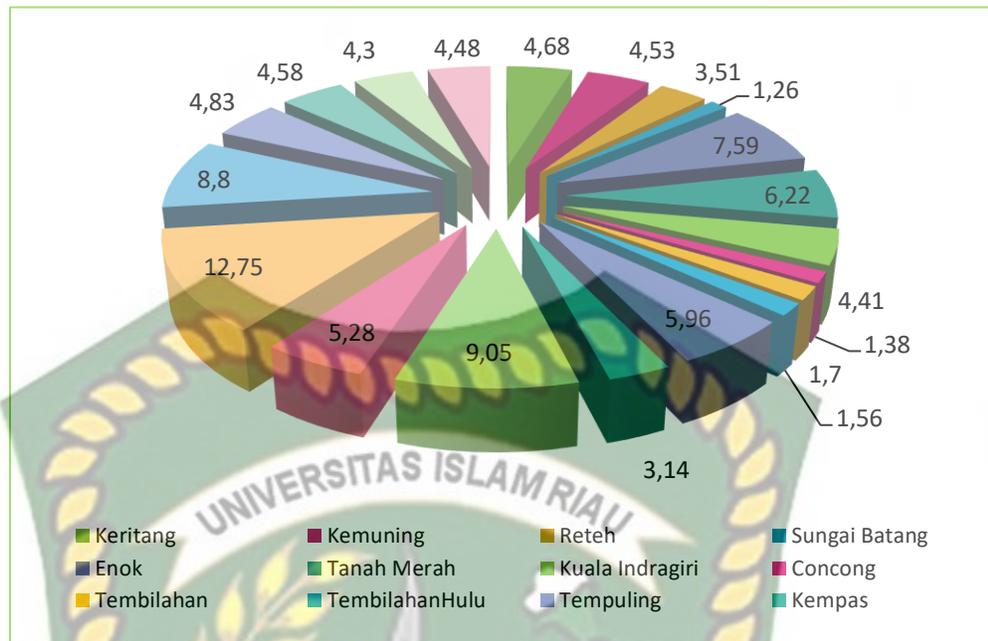
Berikut ini luas Kabupaten Indragiri Hilir menurut kecamatan :

**Tabel 4.1. Luas dan Persentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pulau Burung	520,00	4.48
2	Kateman	561,09	4.83
3	Mandah	1.479,24	12.75
4	Gaung Anak Serka	612,75	5.28
5	Concong	160,29	1.38
6	Kuala Indragiri	511,63	4.41
7	Tanah Merah	721,56	6.22
8	Sungai Batang	145,99	1.26
9	Reteh	407,75	3.51
10	Keritang	543,45	4,68
11	Kemuning	525,48	4.53
12	Enok	880,86	7.59
13	Tembilahan	197,37	1.70
14	Tembilahan Hulu	180,62	1.56
15	Tempuling	691,19	5.96
16	Kempas	364,49	3.14
17	Batang Tuaka	1.050,25	9.05
18	Gaung	1.021,74	8.80
19	Pelangiran	531,22	4.58
20	Teluk Belengkong	499,00	3.30
<b>Jumlah</b>		11.605, 97	100.00

Sumber :BPS, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa kecamatan dengan persentase wilayah terluas adalah Kecamatan Mandah dengan persentase 12.75% dari total luas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan kecamatan dengan persentase terendah adalah Kecamatan Sungai Batang dengan persentase luas 1.26%. untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar 4.2 berikut :



Sumber : BPS, 2018

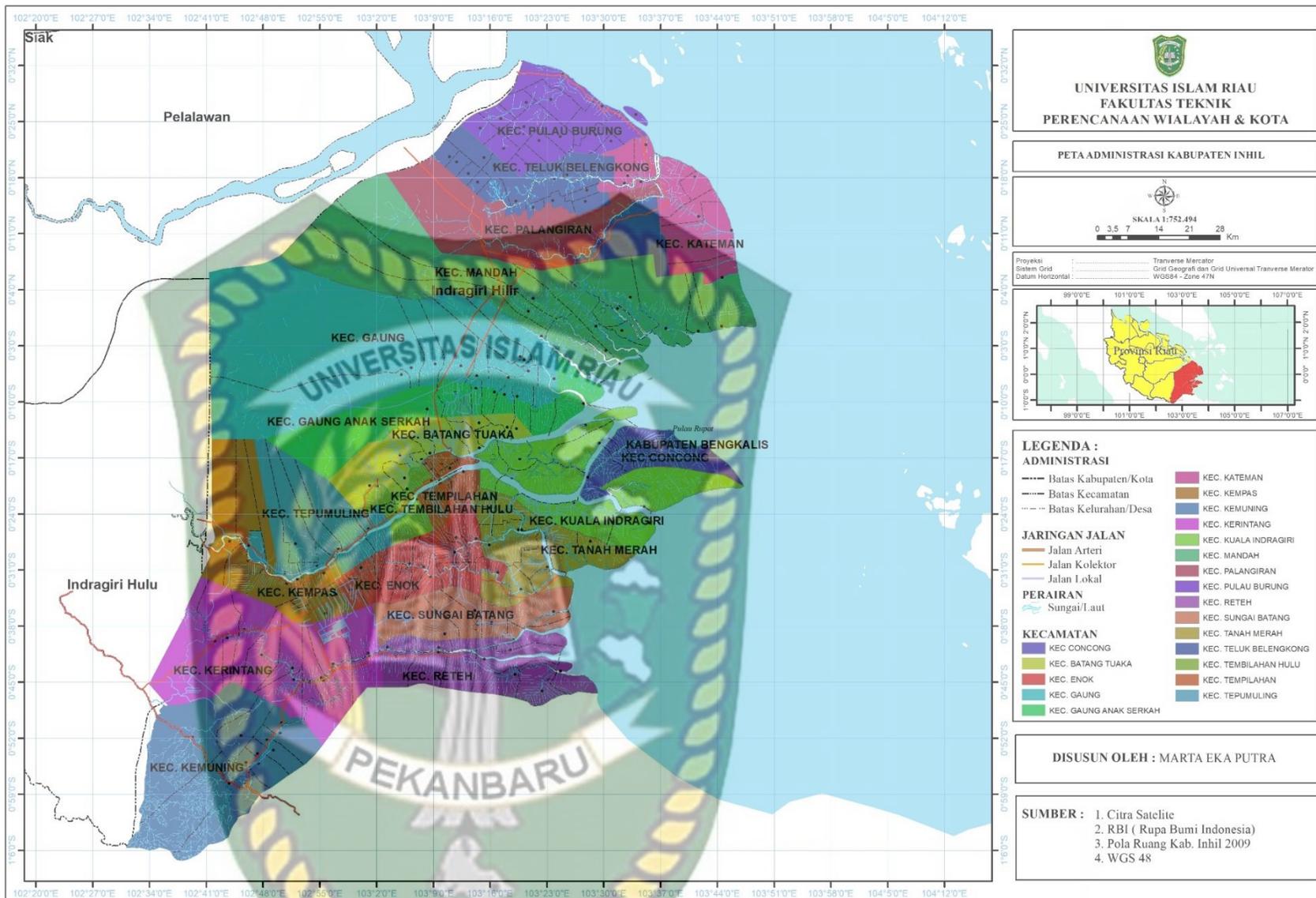
**Gambar 4.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2017**

Kondisi Kabupaten Indragiri Hilir yang dipisahkan oleh parit dan sungai menjadikan wilayahnya sangat bergantung pada alat transportasi air untuk menjangkau satu wilayah ke wilayah lainnya seperti *speed boat*, pompong, perahu sampan dan lain-lain. Jarak antara ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir terhadap wilayah kecamatannya juga tergolong jauh, khususnya untuk wilayah-wilayah pesisir yang secara geografis hanya bisa dijangkau melalui transportasi air. Berikut ini tabel jarak ibu kota Kabupaten terhadap ibu kota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel 4.2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Ke Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2012**

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibu kota Kecamatan</b>	<b>Jarak (km)</b>
Keritang	Kotabaru Reteh	53,8
Kemuning	Selensen	85
Reteh	Pulau Kijang	41,7
Sungai Batang	Benteng	37,4
Enok	Enok	21,4
Tanah Merah	Kuala Enok	34
Kuala Indragiri	Sapat	17,5
Concong	Concong Luar	54,3
Tembilahan	Tembilahan Hilir	0,9
Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	2,6
Tempuling	Sungai Salak	29,7
Kempas	Harapan Tani	45,3
Batang Tuaka	Sungai Piring	15,4
Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	26,8
Gaung	Kuala Lahang	34
Mandah	Khairiah Mandah	49,6
Kateman	Tagaraja	83,9
Pelangiran	Pelangiran	60
Teluk Belengkong	Saka Rotan	90
Pulau Burung	Pulau Burung	92

Sumber :BPS, 2018



GAMBAR 4.3. PETA ADMINISTRASI KABUPTEN INDRAGIRI HILIR

#### 4.1.1.2. Topografi Wilayah

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), dan daerah hutan payau (*mangrove*). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 – 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, yaitu Kecamatan Keritang dan Kemuning yang sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh kemiringan 0 – 2 %, seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Berikut ini dapat dilihat tabel ketinggian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dari permukaan laut menurut kecamatan :

**Tabel 4.3. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir Dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan :**

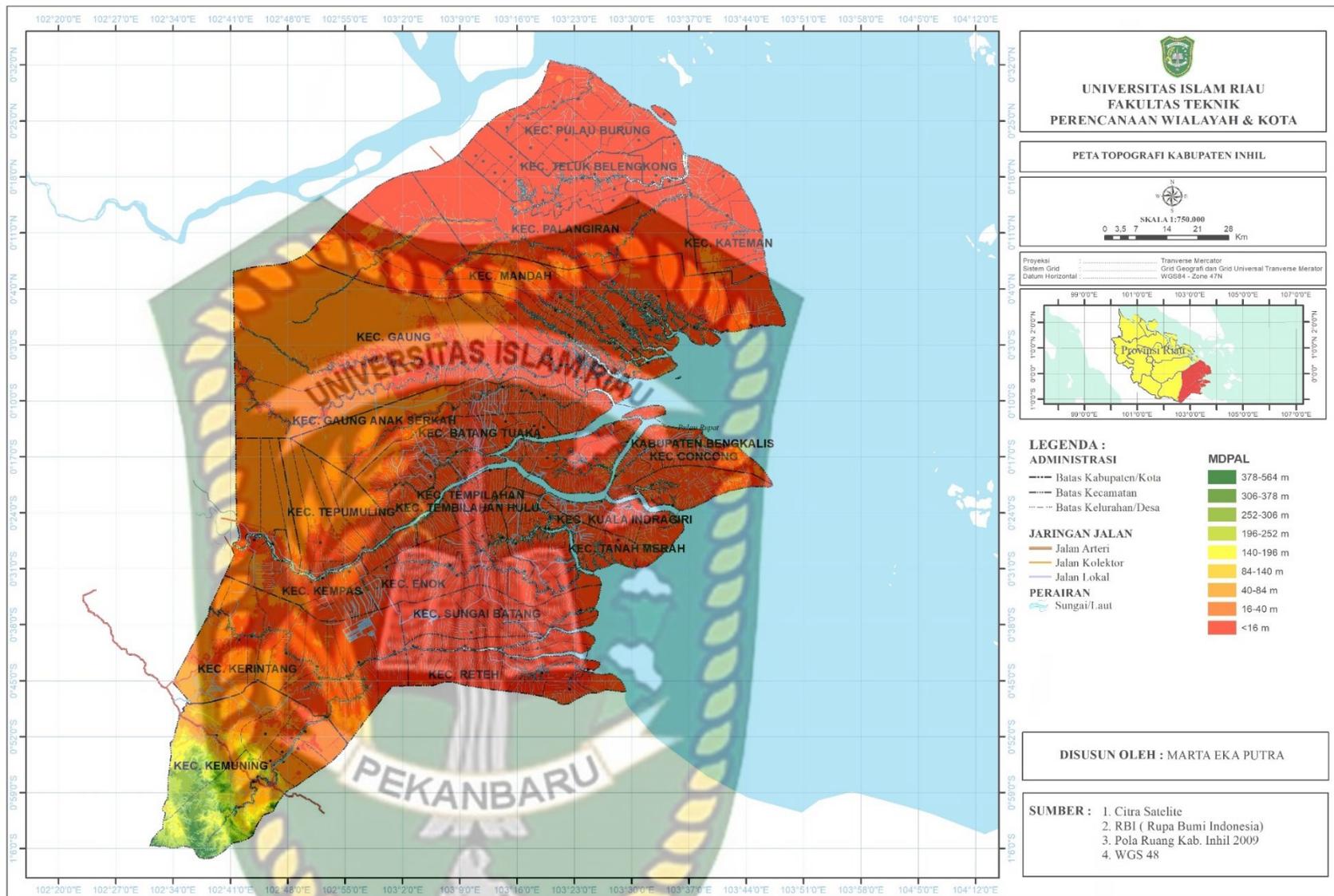
No	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1	Keritang	6 s/d 35
2	Kemuning	6 s/d 35
3	Reteh	1 s/d 4
4	Sungai Batang	1 s/d 4
5	Enok	1 s/d 5,5
6	Tanah Merah	1 s/d 4
7	Kuala Indragiri	1 s/d 4
8	Concong	1 s/d 4
9	Tembilahan	1 s/d 4
10	Tembilahan Hulu	1 s/d 4
11	Tempuling	1 s/d 4
12	Kempas	1 s/d 4
13	Batang Tuaka	1 s/d 4
14	Gaung Anak Serka	1 s/d 4
15	Gaung	1 s/d 4
16	Mandah	1 s/d 4
17	Kateman	1 s/d 4
18	Pelangiran	1 s/d 4
19	Teluk belengkong	1 s/d 10
20	Pulau Burung	1 s/d 4

*Sumber : Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Indragiri Hilir 2015-2019*

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas maka dapat diketahui bahwa Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir berada pada ketinggian antara 1-35 meter dari permukaan laut. Apabila dilihat dari ketinggian tersebut wilayah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat di klasifikasikan berdasarkan ketinggiannya sebagai berikut :

- Daratan yang berada pada ketinggian sampai dengan 1-4 Meter dari permukaan laut seperti daerah : Reteh, Sungai Batang, Enok, Tanah Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong, Pulau Burung
- Daratan yang berada pada ketinggian sampai dengan 35 meter seperti daerah: Keritang dan Kemuning





GAMBAR 4.4. PETA TOPOGRAFI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

#### 4.1.1.3. Geologi

Berdasarkan sejarah geologi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan-cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh mangrove (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan hutan dataran rendah.

Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan-cekungan dan sumberdaya hayati di atasnya tersebut mengalami penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembebanan. Kemudian tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dan kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumberdaya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa dari tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batubara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara.

Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau leaching. Hasil pencucian tersebut akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi. Akhirnya minyak bumi tersebut disebut sebagai bahan bakar energi fosil karena asalnya berasal dari sumberdaya hayati yang telah terjebak menjadi fosil-fosil.

Berdasarkan hal di atas, maka unit-unit karakteristik geologi yang diterjemahkan dalam geologi lingkungan merupakan satu kesatuan utuh yang meliputi tektonika, batuan, tanah, struktur, bentang alam dan hidrogeologi. Keadaan geologi lingkungan tersebut sangat mempengaruhi sistem sungai-sungai besar dan kecil, yang selanjutnya berdampak terhadap bentuk formasi pesisir pantai, ekologi rawa, kualitas air sungai dan laut, penyebaran keekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir oleh manusia.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran alluvium Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran alluvium tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran alluvium Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus.

Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan peneliti terdahulu (Suwarna.dkk,1991 dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2013-2018) terdiri dari jenis alluvium, endapan pantai ( $Q_{ac}$ ) dan endapan rawa ( $Q_s$ ) yang keduanya mempunyai umur Kuarter. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan alluvium dan endapan pantai ( $Q_{ac}$ ) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai *unconfined strength* kurang dari  $0.5 \text{ kg/cm}^2$ ).

Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter.

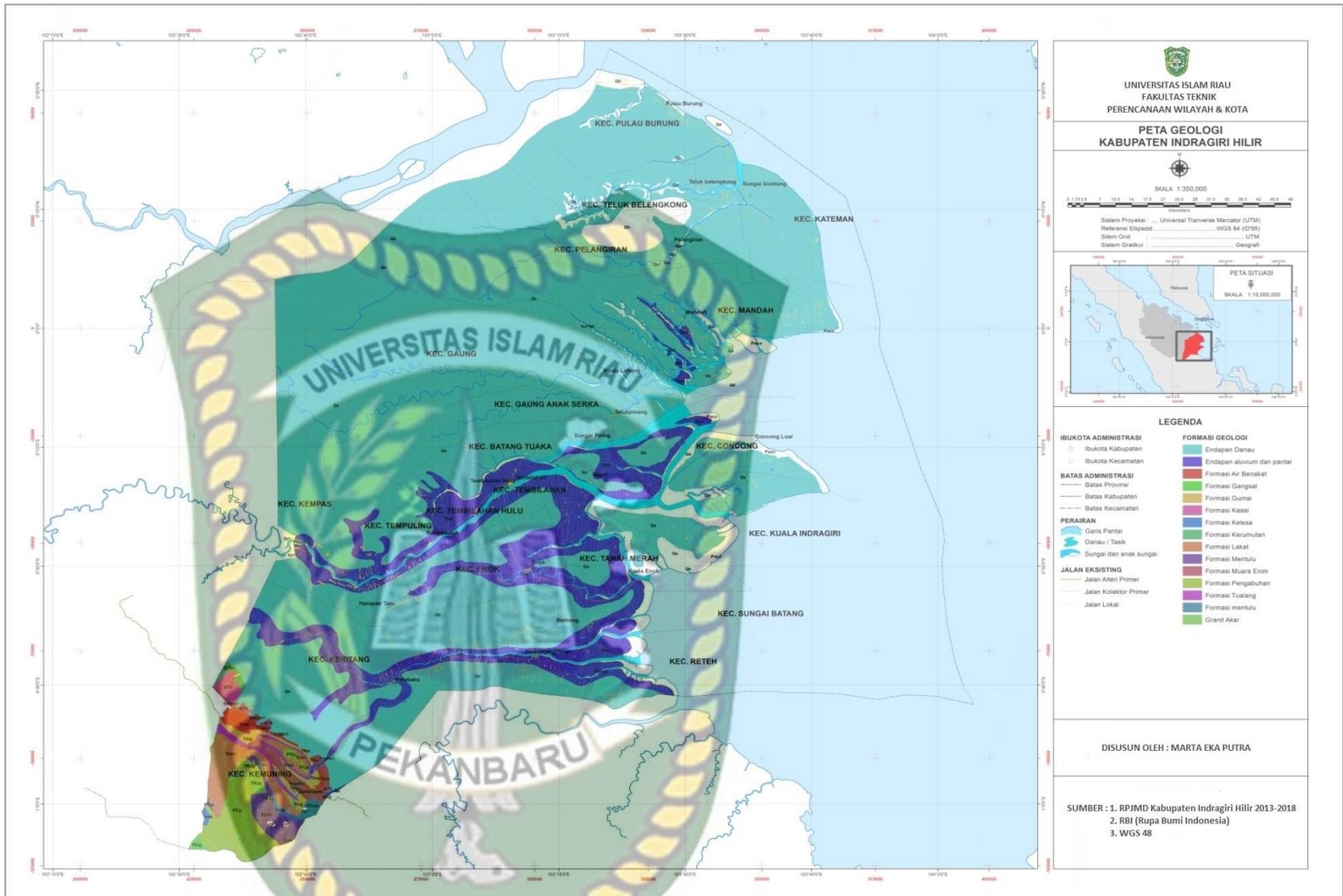
Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa ( $Q_s$ ) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu-abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/sticky, dan kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm<sup>2</sup>. Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm<sup>2</sup> dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryo, 1986).
- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut**, bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90 %) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



GAMBAR 4.5 PETA GEOLOGI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

#### 4.1.1.4. Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Jembatan.

Untuk sumberdaya air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumberdaya air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu

DAS Reteh - Gangsal, DAS Indragiri, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung - Kateman.

#### 4.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian < 500 meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah ini menjadi rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terdapat di Kecamatan Keritang dan Kemuning. Hal ini menyebabkan lahan pertanian pada daerah tersebut tidak terpengaruh pada air laut.

Pada tahun 2010, rata-rata curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 158,16 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 11 hari. Rata-rata curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret yaitu 223,2 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 12 hari. Pada musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun beberapa bulan lamanya (1-2 bulan). Akibatnya air tawar terdesak oleh air asin laut menuju hulu sungai. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan terhadap persediaan air bersih, pengairan persawahan, dan sebagainya.

Rata-rata curah hujan dan curah hujan menurut bulan di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017**

Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
Januari	10	137,7
Februari	11	169,0
Maret	14	226,4
April	12	183,1
Mei	10	120,8
Juni	8	98,7
Juli	6	86,8
Agustus	9	142,1
September	11	183,7
Oktober	10	184,8
November	13	240,6
Desember	13	191,9
<b>Rata-rata</b>	10	136,15

Sumber :BPS, 2018

#### 4.1.1.6. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah Organosol (Histosol), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah Aluvial (*Entisol*) dan Gley Humus (*Inceptisol*). Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini

hanya terdapat dibagian barat ke arah selatan (Kecamatan Keritang dan Kemuning).

Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan alluvial lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk meander. Secara teknis lapisan permukaan alluvial lunak (lapisan sabuk meander, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut.

Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama

maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Untuk daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang dan Kemuning terdapat tanah Podsolik merah kuning (Ultisol). Potensi tanah Orgasol ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah gleihumus dan organosol termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut sangat rendah, yaitu antara 3,5 – 6, sehingga bersifat asam.

Di daerah Reth lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan kalupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus memperhatikan agar pengaturan kedalaman air tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan glei humus tanah organosol yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

#### **4.1.1.7. Penggunaan Lahan**

Pada saat berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir tahun 1965, sebagian besar penggunaan lahan merupakan daerah rawa, gambut dan hutan payau. Akan tetapi, dalam jangka waktu kurang lebih 40 tahun sudah terjadi perubahan yang cukup pesat. Pada tahun 2017, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh perkebunan seluas 753.450 Ha atau sekitar 55,09 % dari luas total wilayah secara administrasi, yaitu 1.367.551 Ha. Sedangkan untuk tambak atau kolam hanya memiliki luas 6.674 ha atau 0,47 % dari luas wilayah kabupaten.

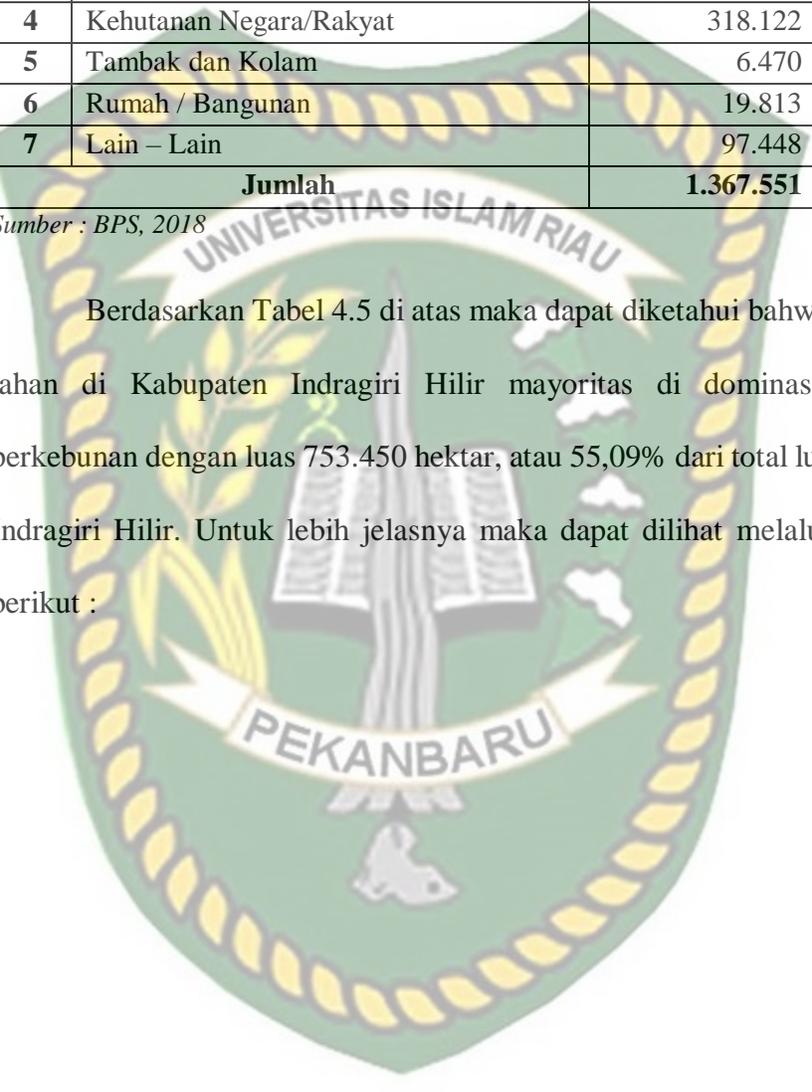
Kegiatan budidaya lainnya yang cukup berkembang adalah kehutanan negara/rakyat seluas 318.122 Ha, Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

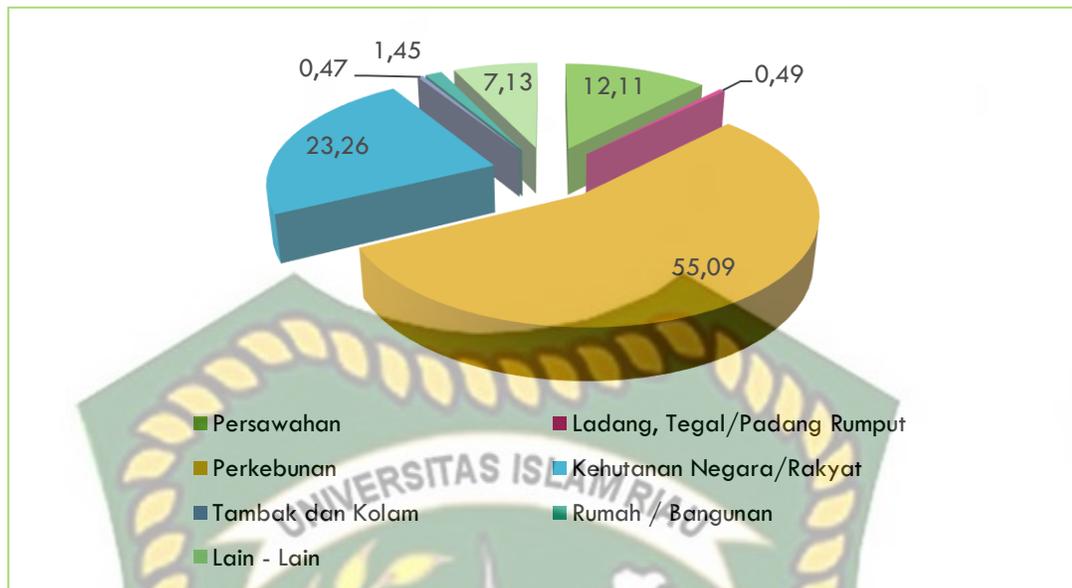
**Tabel 4.5. Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Persawahan	165.575	12,11
2	Ladang, Tegal/Padang Rumput	6.674	0,49
3	Perkebunan	753.450	55,09
4	Kehutanan Negara/Rakyat	318.122	23,26
5	Tambak dan Kolam	6.470	0,47
6	Rumah / Bangunan	19.813	1,45
7	Lain – Lain	97.448	7,13
<b>Jumlah</b>		<b>1.367.551</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas maka dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir mayoritas di dominasi oleh lahan perkebunan dengan luas 753.450 hektar, atau 55,09% dari total luas Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat melalui gambar 4.6 berikut :





Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

**Gambar 4.6. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017**

#### 4.1.2. Aspek Kependudukan

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 adalah sebanyak 722.234 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut diperoleh kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 64 jiwa per km<sup>2</sup> dengan Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Tembilahan dengan tingkat kepadatan 507 jiwa per km<sup>2</sup> dan yang paling jarang adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan kepadatan 29 jiwa per km<sup>2</sup>. Berikut tabel jumlah penduduk, distribusi, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 :

**Tabel 4.6. Jumlah Penduduk, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Keritang	543.45	66.823	9.63	131
2	Kemuning	525.48	33.643	5.59	79
3	Reteh	407.75	45.605	6.31	114
4	Sungai Batang	145.99	12.763	1.73	88
5	Enok	880.86	35.664	5.28	44
6	Tanah Merah	721.56	32.147	4.13	42
7	Kuala Indragiri	511.63	20.226	2.79	40
8	Concong	160.29	13.988	2.00	92
9	Tembilahan	197.37	76.122	11.01	413
10	Tembilahan Hulu	180.62	46.921	6.31	258
11	Tempuling	691.19	32.187	4.16	45
12	Kempas	364.49	35.725	5.33	108
13	Batang Tuaka	1,050.25	28.787	4.10	29
14	Gaung Anak Serka	612.75	22.977	3.43	41
15	Gaung	1,479.24	41.886	4.83	24
16	Mandah	1,021.74	41.127	5.84	42
17	Kateman	561.09	48.051	6.79	89
18	Pelangiran	531.22	46.777	5.79	81
19	Teluk Belengkong	499.00	17.735	1.75	26
20	Pulau Burung	520.00	23.084	3.19	45
<b>Jumlah</b>		<b>11,605.97</b>	<b>739,799</b>	<b>100</b>	<b>64</b>

Sumber : BPS, 2018.

Pada umumnya distribusi penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir cukup merata untuk setiap wilayah kecamatan. Distribusi penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Tembilahan, dengan distribusi penduduk sekitar 11,01 persen atau 76.122 jiwa. Selain itu, untuk memudahkan pergerakan, maka penduduk juga memilih untuk membangun rumah yang berada di sekitar tepi jalan dan tepi sungai/parit.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau-pulau tersebut, antara lain Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakung, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Disamping terdapat gugusan pulau tersebut, terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti ; Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai.

Secara umum, rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 4 jiwa, artinya setiap satu rumah tangga terdiri dari 4 orang. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 4.7 berikut ini :



**Tabel 4.7. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga	Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga
1	Keritang	66.823	16.545	4
2	Kemuning	33.643	7.403	5
3	Reteh	45.605	10.814	4
4	Sungai Batang	12.763	3.144	4
5	Enok	35.664	9.289	4
6	Tanah Merah	32.147	8.321	4
7	Kuala Indragiri	20.226	4.817	4
8	Concong	13.988	3.473	4
9	Tembilahan	76.122	14.047	5
10	Tembilahan Hulu	46.921	11.323	4
11	Tempuling	32.187	7.989	4
12	Kempas	35.725	9.392	4
13	Batang Tuaka	28.787	7.766	4
14	Gaung Anak Serka	22.977	6.563	4
15	Gaung	41.886	9.947	4
16	Mandah	41.127	12.079	3
17	Kateman	48.051	10.740	4
18	Pelangiran	46.777	12.460	4
19	Teluk Belengkong	17.735	4.839	4
20	Pulau Burung	23,084	5.697	4
<b>Indragiri Hilir</b>		<b>739.799</b>	<b>176.645</b>	<b>4</b>

Sumber :BPS, 2018

#### 4.1.2.1. Struktur Penduduk

Gambaran perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 370.603 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 351,631 jiwa. Berikut tabel perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel 4.8. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Keritang	37.187	34.039
2	Kemuning	21.772	19.597
3	Reteh	24.022	22.730
4	Sungai Batang	6.705	6.077
5	Enok	20.405	18.643
6	Tanah Merah	15.790	14.758
7	Kuala Indragiri	10.723	9.927
8	Concong	7.633	7.153
9	Tembilahan	41.897	39.612
10	Tembilahan Hulu	24.072	22.608
11	Tempuling	15.952	14.808
12	Kempas	20.619	18.814
13	Batang Tuaka	15.838	14.483
14	Gaung Anak Serka	13.200	12.205
15	Gaung	18.625	17.097
16	Mandah	22.448	20.744
17	Kateman	26.511	23.686
18	Pelangiran	23.248	19.604
19	Teluk Belengkong	6.991	5.944
20	Pulau Burung	12.253	11.379
	Total Kabupaten	385.891	353.908

Sumber :BPS, 2018

Secara keseluruhan pada tahun 2017, struktur umur penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok usia muda (5-14 tahun) berjumlah 70.375 jiwa, usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 251.249 jiwa dan usia lanjut (> 65 tahun) berjumlah 14.004 jiwa sehingga dapat disimpulkan bahwa sebesar 70,56 % penduduk Kabupaten Indragiri Hilir merupakan penduduk produktif dan sisanya sekitar 29,44 % adalah penduduk usia muda dan usia tua. Dengan demikian maka Total Rasio Ketergantungan (*Total Dependency Ratio*) di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai sebesar 42 persen. Dimana Rasio Ketergantungan Usia Muda (*Youth Dependency Ratio*) sebesar 36 persen dan

Rasio Ketergantungan Usia Tua (*Aged Dependency Ratio*) sebesar 6 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 36 anak usia 0-14 tahun dan 6 orang lanjut usia (65 tahun keatas).

Berikut ini Tabel 4.9 jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur :



**Tabel 4.9. Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2017**

No.	Kecamatan	Kelompok Umur					Jumlah Laki-Laki (jiwa)	Jumlah Perempuan (jiwa)	Jumlah laki-laki+perempuan (jiwa)
		0-4	5-14	15-44	45-64	65+			
1	Keritang	3.204	6.447	16.762	6.256	1.283	33.952	32.871	66.823
2	Kemuning	1.640	3.299	8.577	3.201	656	17.373	16.270	33.643
3	Reteh	2.150	4.327	11.249	4.198	861	22.785	22.816	45.601
4	Sungai Batang	608	1.223	3.179	1.186	243	6.439	6.324	12.763
5	Enok	1.723	3.464	9.006	3.361	689	18.243	17.421	35.664
6	Tanah Merah	1.547	3.114	8.094	3.021	620	16.396	15.751	32.147
7	Kuala Indragiri	976	1.963	5.106	1.906	391	10.342	9.844	20.226
8	Concong	674	1.357	3.527	1.317	270	7.145	6.843	13.988
9	Tembilahan	3.624	7.292	18.960	7.076	1.451	38.403	37.719	76.122
10	Tembilahan Hulu	2.226	4.477	11/642	4/346	891	23/582	23.339	46.921
11	Tempuling	1.557	3.133	8.144	3.040	623	16.497	15.690	32.187
12	Kempas	1.742	3.506	9.112	3.401	698	18.459	17.266	35.725
13	Batang Tuaka	1.400	2.817	7.324	2.734	561	14.836	13.951	28.787
14	Gaung Anak Serka	1.092	2.198	5.716	2.133	437	11.576	11.401	22.977
15	Gaung	2.039	4.104	10.669	3.982	817	21.611	20.275	41.886
16	Mandah	1.970	3.965	10.308	3.847	789	20.879	20.428	41.127
17	Kateman	2.363	4.755	12.362	4.614	947	25.041	23.010	48.051
18	Pelangiran	2.414	4.857	12.626	4.713	966	25.576	21.201	46.777
19	Teluk Belengkong	871	1.753	4.557	1.701	349	9.231	8,504	17.735
20	Pulau Burung	1.155	2.324	6.041	2.255	462	12.237	10.847	23.084
Jumlah		34.975	70.753	182.961	68.288	14.004	370.603	351.631	722.234

Sumber :BPS, 2018

## 4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis dan administratif wilayah penelitian yang merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 9 kecamatan, yaitu adalah Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Concong, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Sungai Batang, dan Kecamatan Reteh, dengan total luas 5.120,30 Km<sup>2</sup> atau 44% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

### 4.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif

#### 4.2.1.1. Kecamatan Pulau Burung

Kecamatan Pulau Burung adalah salah satu dari 9 kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 538,33 Km<sup>2</sup> atau 53.833 Ha. Kecamatan Pulau Burung memiliki 14 desa, dengan desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Pulau Burung dengan persentase 26,02%. Sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Bangun Harjo Jaya yakni 2,38%.

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Pulau Burung adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Belengkong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Pulau Burung merupakan daerah perairan dan dikenal juga sebagai pulau berkanal karena daerah ini dikelilingi oleh kanal-kanal. Sehingga transportasi utama yang digunakan adalah transportasi air, seperti perahu atau pompong serta speedboat. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Pulau Burung dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Pulau Burung juga merupakan daerah perkebunan kelapa hibrida sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani perkebunan.

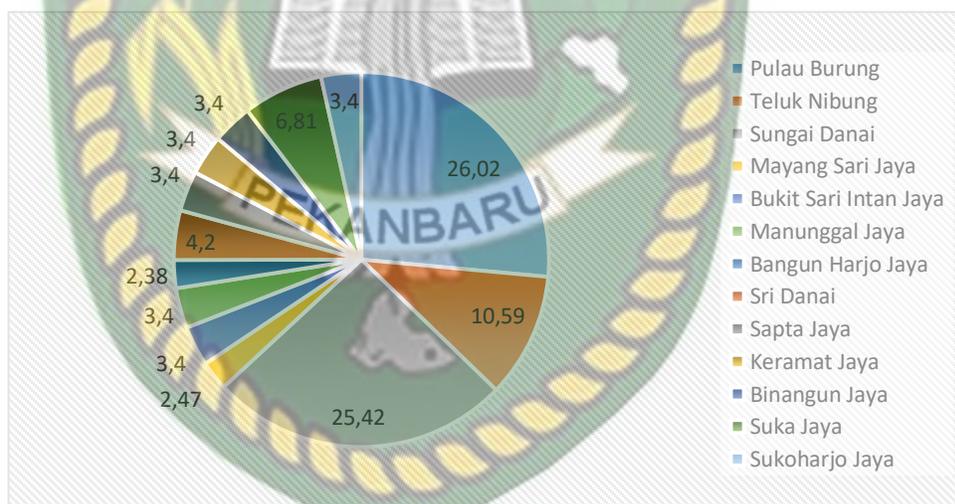
Alat transportasi yang digunakan dari desa-desa ke ibu kota Kecamatan Pulau Burung yaitu desa Pulau Burung dapat ditempuh melalui kendaraan darat yaitu sepeda motor dan kendaraan air menggunakan pompong. Akan tetapi penggunaan jalan darat hanya bisa ditempuh jika kondisi jalan bagus karena jalan yang dilalui adalah jalan setapak yang sulit di lewati pada kondisi tertentu seperti saat musim hujan dan pasang air laut.

Adapun luas wilayah desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Burung dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut :

**Tabel 4.10. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pulau Burung, Tahun 2017**

	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pulau Burung	140,06	26,02
2	Teluk Nibung	57,00	10,59
3	Sungai Danai	136,84	25,42
4	Mayang Sari Jaya	13,30	2,47
5	Bukit Sari Intan Jaya	18,33	3,40
6	Manunggal Jaya	18,33	3,40
7	Bangun Harjo Jaya	12,80	2,38
8	Ringin Jaya	13,61	2,53
9	Sri Danai	22,59	4,20
10	Sapta Jaya	18,33	3,40
11	Keramat Jaya	18,33	3,40
12	Binangun Jaya	18,33	3,40
13	Suka Jaya	36,66	6,81
14	Sukoharjo Jaya	18,33	3,40
	<b>Jumlah</b>	<b>538,33</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.7 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pulau Burung**

#### 4.2.1.2. Kecamatan Kateman

Kecamatan Kateman terletak di Kabupaten Indragiri Hilir bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu desa di Kecamatan Kateman ada yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Desa Kuala Selat. Hal ini mengakibatkan Kecamatan Kateman terletak dalam posisi strategis dalam jalur transportasi dan perdagangan.

Wilayah Kecamatan Kateman terbagi di dua pulau, yaitu Pulau Kateman yang terdiri dari Kelurahan Tagaraja, Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kelurahan Amal Bakti, Desa Sungai Teritip, Desa Penjuru, Desa Kuala Selat, Desa Sungai Simbar, dan Desa Makmur Jaya. Sedangkan Desa Air Tawar, Desa Tanjung Raja, dan Desa Sari Mulya berada di Pulau Sumatera.

Berikut adalah batas-batas wilayah Kecamatan Kateman :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Burung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelangiran dan Mandah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Belengkong

Kedadaan alam Kecamatan Kateman pada umumnya berada pada dataran rendah dan lahan gambut yang ditumbuhi hutan *mangrove* dan perkebunan kelapa. Sedangkan ketinggian dari permukaan laut berkisar -

antara 0-700 cm yang mengakibatkan transportasi air di Kecamatan Kateman dipengaruhi pasang surut. Di Kelurahan Tagaraja terdapat dam atau bendungan yang dapat mencegah abrasi air laut dan menjadi pagar pelindung untuk dapat menghadang ketika air naik (tinggi). Untuk transportasi dalam desa di Kecamatan Kateman dapat ditempuh melalui darat karena hampir semua parit/anak sungai sudah dihubungkan melalui jembatan.

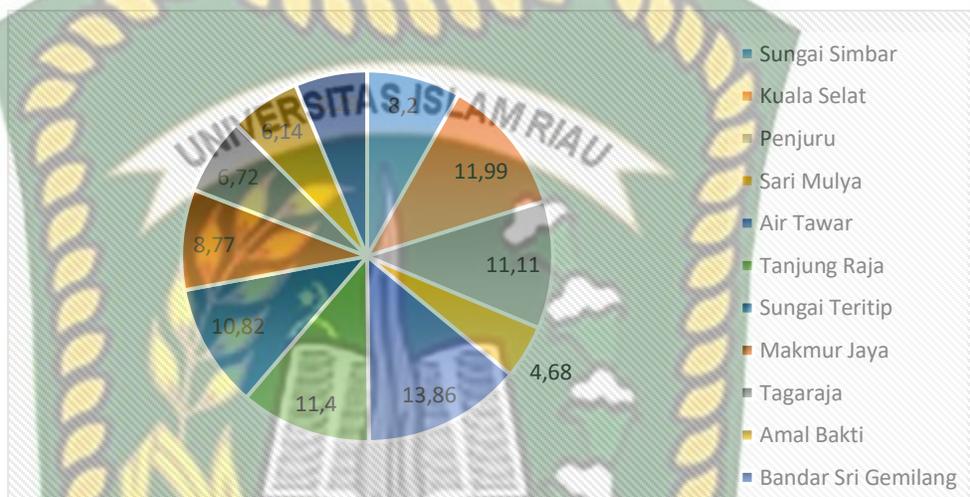
Luas Kecamatan Kateman adalah 684,09 km<sup>2</sup> atau 4,83% dari total luas kabupaten Indragiri Hilir. Berikut Tabel 4.11 luas wilayah menurut desa di Kecamatan Kateman :

**Tabel 4.11. Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kateman Tahun 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sungai Simbar	56,09	8,20
2	Kuala Selat	82,00	11,99
3	Penjuru	76,00	11,11
4	Sari Mulya	32,00	4,68
5	Air Tawar	95,00	13,86
6	Tanjung Raja	78,00	11,40
7	Sungai Teritip	74,00	10,82
8	Makmur Jaya	60,00	8,77
	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
9	Tagaraja	46,00	6,72
10	Amal Bakti	42,00	6,14
11	Bandar Sri Gemilang	43,00	6,29
	<b>Jumlah</b>	<b>684,09</b>	<b>100,00</b>

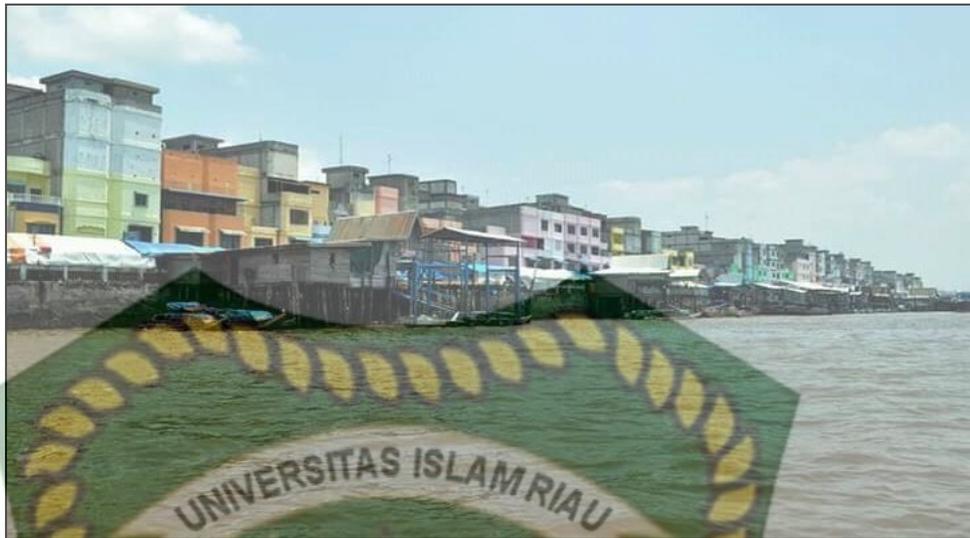
Sumber :BPS, 2018

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas maka dapat diketahui desa dengan persentase wilayah terluas di Kecamatan Kateman adalah desa Air Tawar yaitu sebesar 13,86%, sedangkan desa dengan persentase luas wilayah terkecil adalah desa Sari Mulya dengan persentase wilayah sebesar 4,68%. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut :



Sumber : Hail Analisa, 2019

**Gambar 4.8. Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kateman Tahun 2017**



*Sumber : Hasil Survei, 2019*

#### **Gambar 4.9. Kota Guntung, Kecamatan Kateman**

#### **4.2.1.3. Kecamatan Mandah**

Kecamatan Mandah adalah satu diantara 9 kecamatan yang tergolong sebagai kecamatan pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 1.479, 24 Km<sup>2</sup> atau 147,924 Ha. Kecamatan Mandah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Pelangiran dan Kateman
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Gaung dan Gaung Anak Serka
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian besar wilayah Kecamatan Mandah terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Mandah

dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

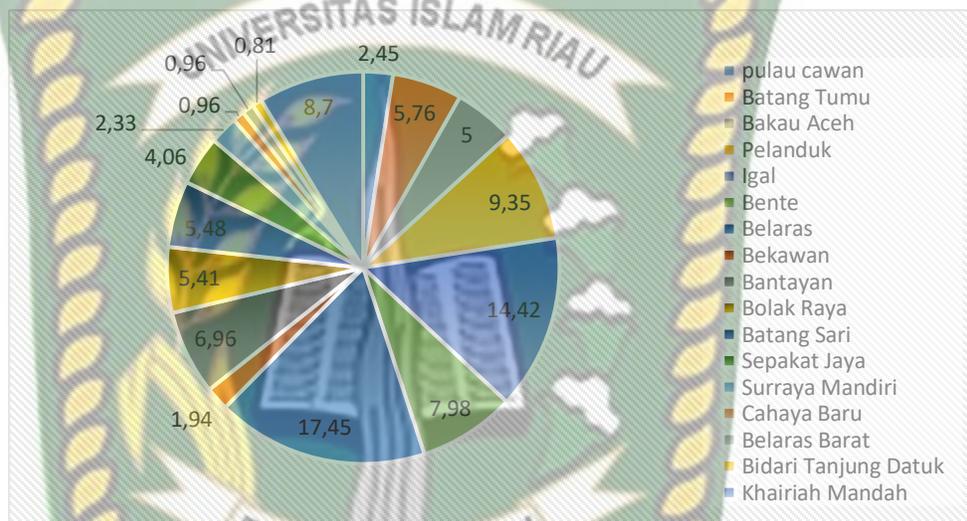
Kecamatan Mandah merupakan kecamatan terluas di kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri atas 16 desa dan 1 kelurahan. Adapun luas dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Mandah adalah dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut :

**Tabel 4.12 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mandah Tahun 2017**

	<b>Desa</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pulau Cawan	36,30	2,45
2	Batang Tumu	85,20	5,76
3	Bakau Aceh	74,00	5,00
4	Pelanduk	138,28	9,35
5	Igal	213,26	14,42
6	Bente	117,98	7,98
7	Belaras	258,12	17,45
8	Bekawan	28,65	1,94
9	Bantayan	102,96	6,96
10	Bolak Raya	80,00	5,41
11	Batang Sari	81,00	5,48
12	Sepakat Jaya	60,00	4,06
13	Surraya Mandiri	34,50	2,33
14	Cahaya Baru	14,13	0,96
15	Belaras Barat	14,13	0,96
16	Bidari Tanjung Datuk	12,00	0,81
	<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
17	Khairiah Mandah	128,73	8,70
	<b>Jumlah</b>	<b>1,479,24</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS, 2018

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas maka dapat diketahui bahwa desa dengan persentase wilayah administratif terluas di Kecamatan Mandah adalah desa- Belaras dengan persentase luas 17,45% atau 258,12 km<sup>2</sup>, sedangkan desa dengan wilayah administratif terkecil adalah desa Bidari Tanjung Datuk dengan persentase luas 0,81% atau 12,00 km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut :



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.10 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Mandah**



*Sumber : Hasil Survei, 2019*

**Gambar 4.11. Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah**

#### **4.2.1.4. Kecamatan Gaung Anak Serka**

Kecamatan Gaung Anak Serka adalah salah satu dari kecamatan pesisir yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 612,75 Km<sup>2</sup> atau 61,275 Ha, atau sekitar 5,28 persen dari luas Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Gaung Anak Serka berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Gaung dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Tuaka dan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Gaung
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Seperti daerah lainnya di kabupaten Indragiri Hilir, sebagian besar wilayah di Kecamatan Gaung Anak Serka di dominasi oleh tanah gambut dengan rata-rata tinggi 1 s/d 4 meter dari permukaan laut. Kecamatan Gaung Anak Serka terbagi menjadi 12 wilayah administratif, yang terdiri dari 9 desa dan 3 kelurahan. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat melalui Tabel 4.15 berikut :

**Tabel 4.13 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Gaung Anak Serka Tahun 2017**

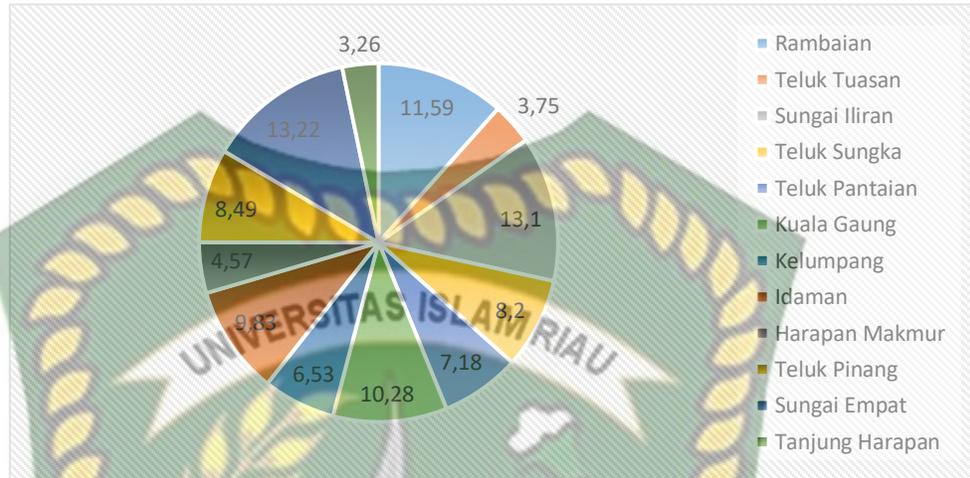
No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Rambaian	71,00	11,59
2	Teluk Tuasan	23,00	3,75
3	Sungai Iliran	80,28	13,10
4	Teluk Sungka	50,27	8,20
5	Teluk Pantaian	43,98	7,18
6	Kuala Gaung	63,00	10,28
7	Kelumpang	40,00	6,53
8	Idaman	60,22	9,83
9	Harapan Makmur	28,00	4,57
<b>Kelurahan</b>		<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
10	Teluk Pinang	52,00	8,49
11	Sungai Empat	81,00	13,22
12	Tanjung Harapan	20,00	3,26
<b>Jumlah</b>		<b>612,75</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS, 2018

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas maka dapat diketahui bahwa desa dengan persentase wilayah administratif terluas di Kecamatan Gaung Anak Serka adalah kelurahan Teluk Pinang dengan persentase luas 13,22% atau 81,00 km<sup>2</sup>, sedangkan desa dengan wilayah administratif terkecil adalah

kelurahan Tanjung Harapan dengan persentase luas 3,26% atau 20,00 km<sup>2</sup>.

Untuk lebih jelas maka dapat dilihat melalui diagram berikut :



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.12** Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Gaung Anak Serka



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.13** Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka

#### 4.2.1.5. Kecamatan Concong

Kecamatan Concong adalah salah satu dari 9 kecamatan pesisir yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 160,29 Km<sup>2</sup> atau 16.029 ha. Secara administratif Kecamatan Concong berbatasan dengan :

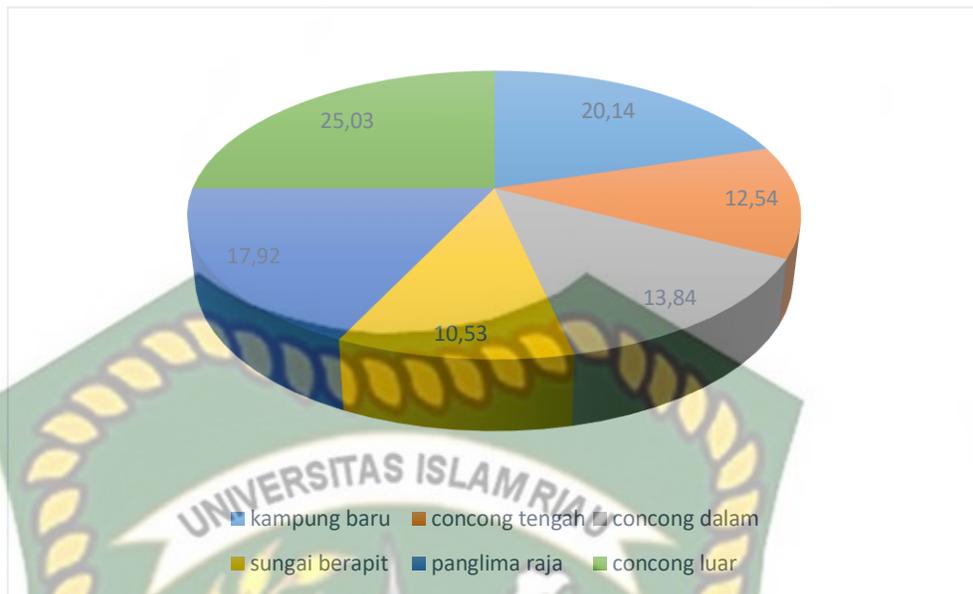
- Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Timur dengan Laut Selat Berhala

Wilayah Kecamatan Concong terletak di ketinggian 1 s/d 4 meter di atas permukaan laut. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Kecamatan Concong terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan sebagai berikut (Lihat Tabel 4.14) :

**Tabel 4.14 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Concong Tahun 2017**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kampung Baru	32,28	20,14
2	Concong Tengah	20,10	12,54
3	Concong Dalam	22,19	13,84
4	Sungai Berapit	16,88	10,53
5	Panglima Raja	28,72	17,92
<b>Kelurahan</b>		<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
6	Concong Luar	40,12	25,03
<b>Jumlah</b>		<b>160,29</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, 2018



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.14** Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Concong



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.15.** Concong Luar, Kecamatan Concong

#### 4.2.1.6. Kecamatan Kuala Indragiri

Kecamatan Kuala Indragiri adalah salah satu dari 9 kecamatan pesisir yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 513,59Km<sup>2</sup> atau 51.359 Ha. Kecamatan Kuala Indragiri merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Gaung Anak Serka dan Mandah
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanah Merah
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Concong

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Kuala Indragiri dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Dengan keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab.

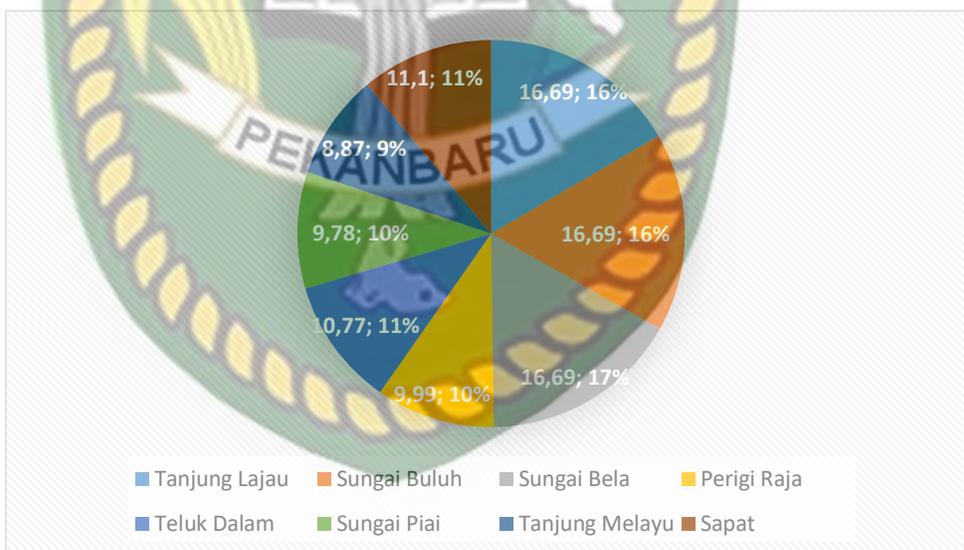
Secara administratif wilayah Kecamatan Kuala Indragiri terbagi menjadi 7 desa dan 1 kelurahan, dengan desa yang yang terluas adalah desa Tanjung Raja, Sungai Buluh, dan Sungai Bela dengan persentase total luas 16,69% atau 85,72 km<sup>2</sup> . Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah

desa Tanjung Melayu dengan persentase luas 8,87% atau 45,56 km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah pada masing-masing desa di Kecamatan Kuala Indragiri dapat dilihat melalui Tabel 4.15 dan Gambar 4.16 berikut :

**Tabel 4.15 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2017**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Tanjung Lajau	85,72	16,69
2	Sungai Buluh	85,72	16,69
3	Sungai Bela	85,72	16,69
4	Perigi Raja	51,33	9,99
5	Teluk Dalam	52,25	10,77
6	Sungai Piai	50,25	9,78
7	Tanjung Melayu	45,56	8,87
<b>Kelurahan</b>		<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
8	Sapat	57,03	11,10
<b>Jumlah</b>		<b>513,59</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, 2018



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.16 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kuala Indragiri**

Kecamatan Tanah Merah adalah salah satu dari 9 kecamatan yang tergolong sebagai kecamatan pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 721,56 Km<sup>2</sup> atau 72.156 Ha. Kecamatan Tanah Merah merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Batang
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Enok
- Sebelah Timur dengan Propinsi Kepulauan Riau

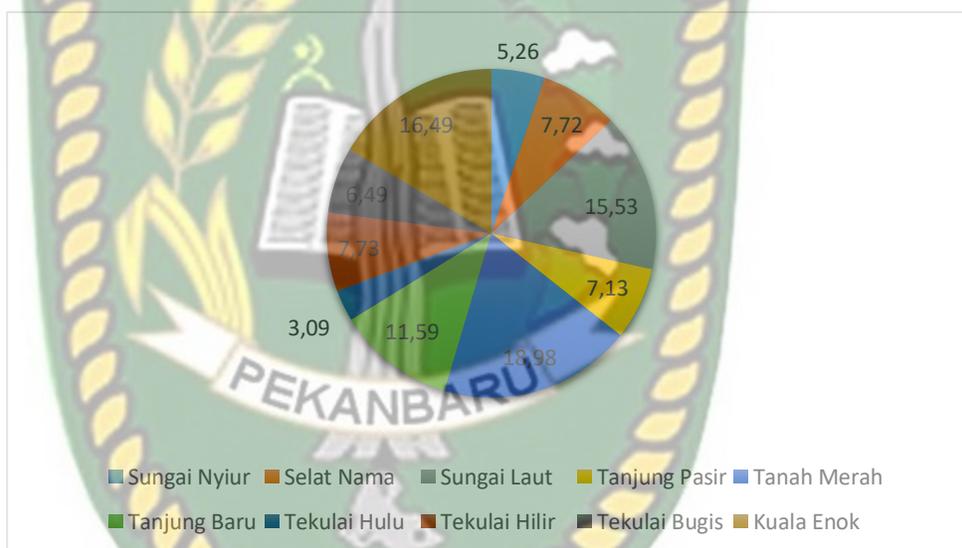
Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Tanah Merah dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara paritparit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Secara administratif wilayah Kecamatan Tanah Merah terbagi menjadi 9 desa dan 1 kelurahan, dengan desa yang yang terluas adalah desa Tanah Merah dengan persentase total luas 18,98% atau 136,93 km<sup>2</sup> . Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah desa Tekulai Hulu dengan persentase luas 3,09% atau 22,30 km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah pada- masing-masing desa di Kecamatan Tanah Merah dapat dilihat pada Tabel 4.16 dan Gambar 4.17 berikut :

**Tabel 4.16 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tanah Merah Tahun 2017**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sungai Nyiur	37,95	5,26
2	Selat Nama	55,71	7,72
3	Sungai Laut	112,71	15,53
4	Tanjung Pasir	51,43	7,13
5	Tanah Merah	136,93	18,98
6	Tanjung Baru	83,63	11,59
7	Tekulai Hulu	22,30	3,09
8	Tekulai Hilir	55,75	7,73
9	Tekulai Bugis	46,83	6,49
<b>Kelurahan</b>		<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
10	Kuala Enok	119,00	16,49
<b>Jumlah</b>		<b>513,59</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.17 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tanah Merah**

#### 4.2.1.8. Kecamatan Sungai Batang

Kecamatan Sungai Batang adalah kecamatan termuda di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari wilayah utara Kecamatan Reteh. Kecamatan Sungai Batang memiliki luas wilayah 225,89 km<sup>2</sup> dan terletak di 103° 21' 385" garis bujur dan 00° 68' 075" garis lintang. Kecamatan Sungai Batang merupakan wilayah daratan rendah, yaitu daerah endapan sungai dan daerah rawa dengan tanah gambut dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-4 Meter dari permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, Kecamatan Sungai Batang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh sungai dan terusan seperti sungai Batang, terusan Batang, dan terusan Patah Parang.

Wilayah Kecamatan Sungai Batang bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Enok dan Kecamatan Tanah Merah, bagian Timur berbatasan dengan Laut Selat Berhala / Zona Ekonomi Eksklusif, dan bagian Selatan serta barat berbatasan dengan Kecamatan Reteh.

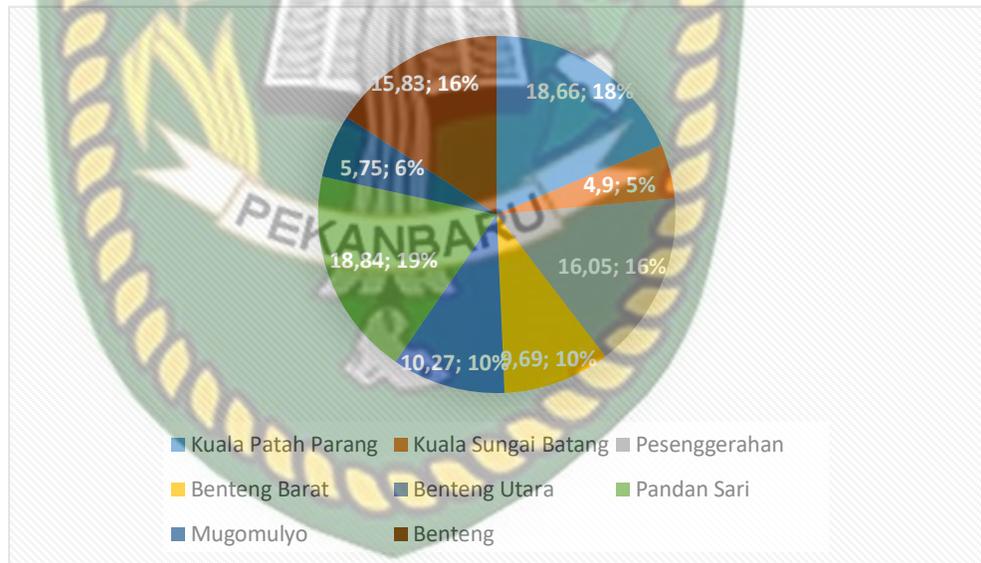
Secara administratif wilayah Kecamatan Sungai Batang terbagi menjadi 7 desa dan 1 kelurahan, dengan desa yang yang terluas adalah desa Pandan Sari dengan persentase total luas 18,84% atau 42,57 km<sup>2</sup> . Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah desa Kuala Sungai Batang dengan persentase luas 4,90% atau 11,08 km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya mengenai luas

wilayah pada- masing-masing desa di Kecamatan Tanah Merah dapat dilihat pada Tabel 4.17 dan Gambar 4.18 berikut :

**Tabel 4.17 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Sungai Batang Tahun 2017**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kuala Patah Parang	42,15	18,66
2	Kuala Sungai Batang	11,08	4,90
3	Pesenggerahan	36,25	16,05
4	Benteng Barat	21,90	9,69
5	Benteng Utara	23,20	10,27
6	Pandan Sari	42,57	18,84
7	Mugomulyo	13,00	5,75
<b>Kelurahan</b>		<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
10	Benteng	35,75	15,83
<b>Jumlah</b>		<b>225,90</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.18 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Sungai Batang**

#### 4.2.1.9. Kecamatan Reteh

Kecamatan Reteh adalah salah satu dari 9 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yang tergolong sebagai kecamatan pesisir dengan luas wilayah  $\pm 724.75 \text{ Km}^2$  atau  $\pm 72\,475 \text{ Ha}$ . Ibu kota Kecamatan Reteh adalah Kelurahan Pulau Kijang dengan jarak ke kabupaten (Tembilahan) sekitar 90 km dan jarak ke ibukota provinsi (Pekanbaru) sekitar 360 km. Kecamatan Reteh terletak pada hamparan dibagian utara Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Sungai Batang
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Keritang
- Sebelah Timur dengan Selat Berhala

Adapun transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Reteh ke ibukota kabupaten yaitu dengan *speed boat* atau lebih dikenal dengan bahasa setempat *pompong*. Jalur darat juga bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua tetapi dengan kondisi jalan yang belum merata pembangunannya hingga saat ini sangat sulit untuk dilalui terlebih lagi saat musim hujan. Ada beberapa desa di Kecamatan Reteh yang tidak bisa ditempuh dengan jalur darat dan tidak mempunyai jalur trayek tetap untuk transportasi laut, sehingga harus menyewa boat/pompong jika akan menuju desa tersebut. Adapun desa tersebut yaitu ; Desa Sungai Terab, Sungai Asam, Desa Pulau Ruku, Desa Sungai Mahang, dan Desa Tanjung Labuh. Desa-desa

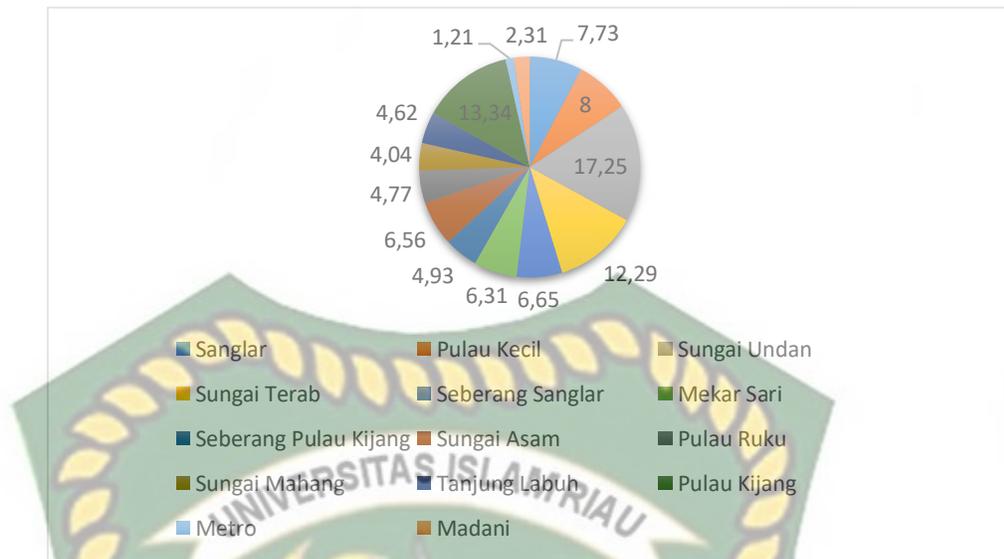
tersebut lebih dekat ke Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Secara administratif wilayah Kecamatan Reteh terbagi menjadi 11 desa dan 3 kelurahan, dengan desa yang yang terluas adalah desa Sungai Undan dengan persentase total luas 17,25% atau 125,00 km<sup>2</sup> . Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Metro dengan persentase luas 1,21% atau 8,75 km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah pada masing-masing desa di Kecamatan Reteh dapat dilihat melalui Tabel 4.18 dan Gambar 4.20 berikut :

**Tabel 4.18 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Reteh Tahun 2017**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Sanglar	56,00	7,73
2	Pulau Kecil	58,00	8,00
3	Sungai Undan	125,00	17,25
4	Sungai Terab	89,05	12,29
5	Seberang Sanglar	48,21	6,65
6	Mekar Sari	45,73	6,31
7	Seberang Pulau Kijang	35,75	4,93
8	Sungai Asam	47,52	6,56
9	Pulau Ruku	34,60	4,77
10	Sungai Mahang	29,30	4,04
11	Tanjung Labuh	33,45	4,62
<b>Kelurahan</b>		<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
12	Pulau Kijang	96,67	13,34
13	Metro	8,75	1,21
14	Madani	16,72	2,31
<b>Jumlah</b>		<b>724,75</b>	<b>100,00</b>

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Analisa 2019

**Gambar 4.19 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Reteh**



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.20 Pulau Kijang Kecamatan Reteh**

## 4.2.2. Kondisi Sosial

### 4.2.2.1. Laju Perumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, dilihat dari tahun 2014 jumlah penduduknya sebanyak 251.118 jiwa, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 259.268 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut :

**Tabel 4.19 Pertumbuhan Penduduk Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2017**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2014	2015	2016	2017
1	Pulau Burung	22.409	22.642	22.870	23.084
2	Kateman	46.093	46.734	47.393	48.051
3	Mandah	39.841	40.284	40.716	41.127
4	Gaung Anak Serka	22.203	22.465	22.726	22.977
5	Concong	13.473	13.644	13.817	13.988
6	Kuala Indragiri	19.558	19.785	20.010	20.226
7	Tanah Merah	31.108	31.462	31.812	32.147
8	Sungai Batang	12.349	12.490	12.629	12.763
9	Reteh	44.084	44.958	45.109	45.605
<b>Jumlah</b>		251.118	254.464	257.082	259.968

Sumber :BPS, 2018

### 4.2.2.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Secara umum distribusi Jumlah Penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terlihat kurang merata, dimana jumlah penduduk cenderung terpusat pada Kecamatan Kateman dengan distribusi jumlah penduduk sebesar 18% atau 48.051 jiwa, kemudian diikuti dengan Kecamatan

Mandah dengan distribusi jumlah penduduk sebesar 16% atau 41.127 jiwa, sedangkan kecamatan lainnya cenderung memiliki distribusi penduduk yang rendah.

Kepadatan penduduk di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh Kecamatan Reteh yaitu sebesar 114 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Kuala Indragiri yaitu sebesar 40 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi dan kepadatan penduduk di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut :

**Tabel 4.20. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Pulau Burung	520	23.084	9%	45
2	Kateman	561	48.051	18%	89
3	Mandah	1,021,74	41.127	16%	42
4	Gaung Anak Serka	613	22.977	9%	41
5	Concong	160	13.988	5%	92
6	Kuala Indragiri	512	20.226	8%	40
7	Tanah Merah	722	32.147	12%	42
8	Sungai Batang	146	12.763	5%	88
9	Reteh	408	45.605	18%	114
<b>Jumlah</b>		<b>3.641</b>	<b>259.968</b>	<b>100%</b>	<b>66</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2019

#### 4.2.2.3. Struktur Penduduk

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 370.603 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 351,631 jiwa. Berikut Tabel 4.21 perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel 4.21. Struktur Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Pulau Burung	12.253	11.379
2	Kateman	26.511	23.686
3	Mandah	22.448	20.744
4	Gaung Anak Serka	13.200	12.205
5	Concong	7.633	7.153
6	Kuala Indragiri	10.723	9.927
7	Tanah Merah	15.790	14.758
8	Sungai Batang	6.705	6.077
9	Reth	24.022	22.730
<b>Jumlah</b>		<b>139.285</b>	<b>128.659</b>

Sumber : Hasil Analisa, 2019

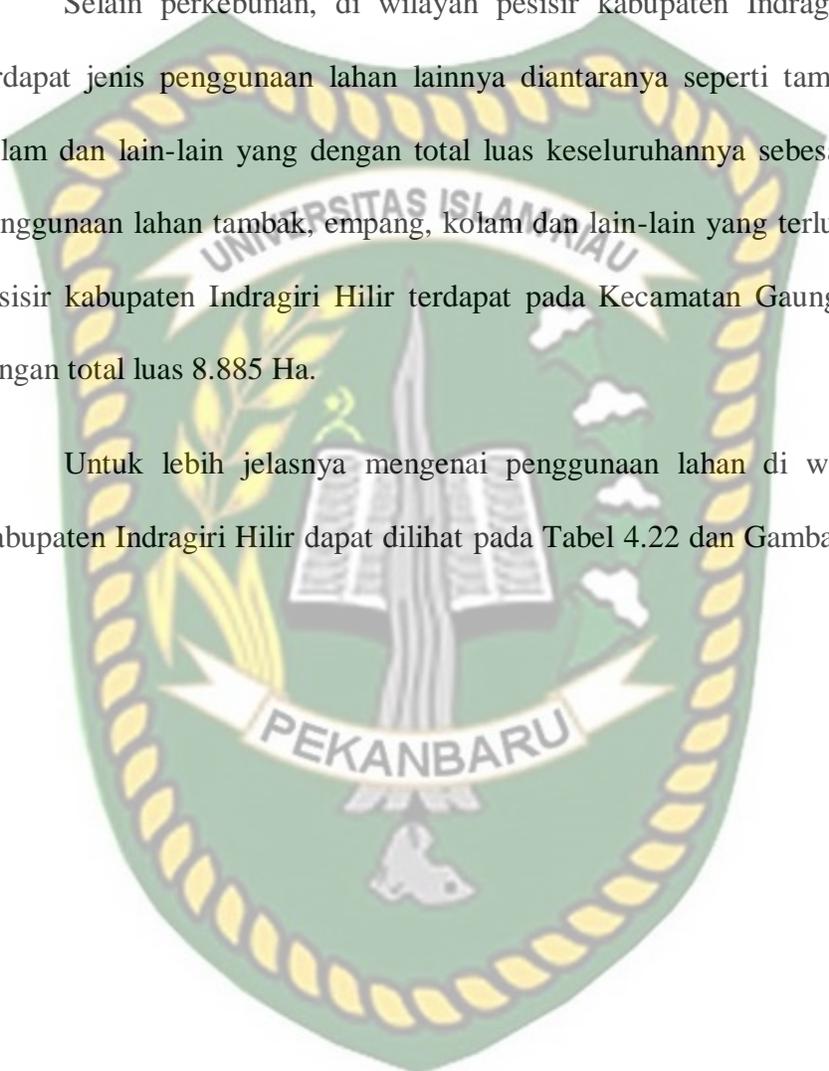
#### 4.2.3. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh perkebunan, yakni dengan total luas 150.713 Ha. Hal ini sesuai dengan pekerjaan utama dari masyarakatnya yang mayoritasnya adalah petani dan diikuti dengan beberapa mata pencarian lainnya seperti nelayan dan lain-lain. Penggunaan lahan perkebunan terluas di antara kecamatan pesisir di

kabupaten Indragiri Hilir terdapat pada Kecamatan Mandah dengan total luas 73.927 Ha, sedangkan kecamatan dengan penggunaan lahan perkebunan terkecil adalah Kecamatan Sungai Batang dengan total luas sebesar 10.038 Ha.

Selain perkebunan, di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir juga terdapat jenis penggunaan lahan lainnya diantaranya seperti tambak, empang, kolam dan lain-lain yang dengan total luas keseluruhannya sebesar 15.115 Ha. Penggunaan lahan tambak, empang, kolam dan lain-lain yang terluas di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdapat pada Kecamatan Gaung Anak Serka dengan total luas 8.885 Ha.

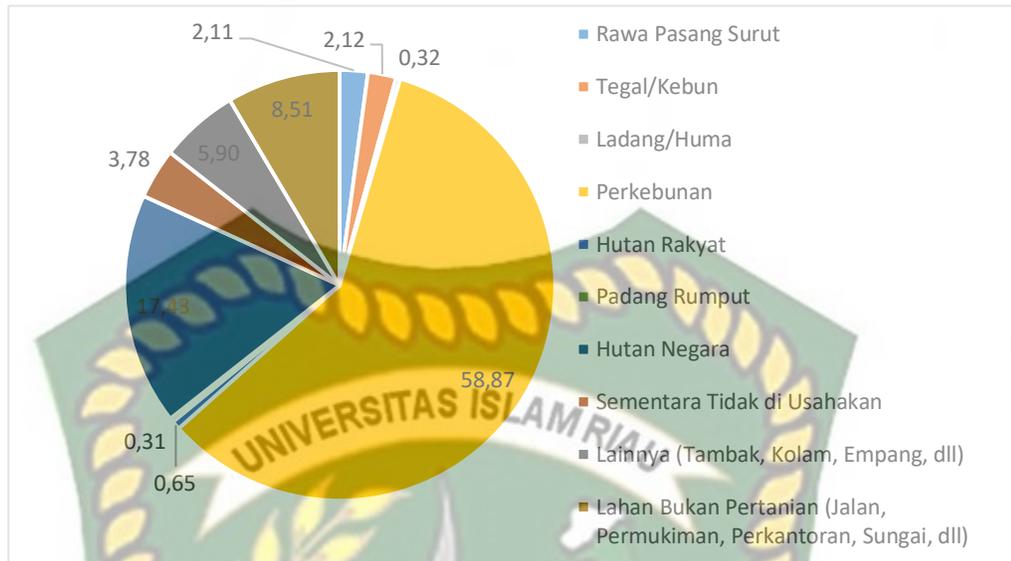
Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 4.22 dan Gambar 4.21 berikut :



Tabel 4.22. Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

	Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)										Jumlah
		Rawa Pasang Surut	Tegal/ Kebun	Ladang /Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Padang Rumput	Hutan Negara	Sementara Tidak di Usahakan	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	
1	Pulau Burung	0	1.320	0	39.543	0	8	0	5	1.708	9.416	52.000
2	Kateman	0	4.772	0	44.179	0	11	1.500	0	2.010	3.637	56.109
3	Mandah	0	9.010	0	73.927	20	0	0	20.820	39	44.108	147.924
4	Gaung Anak Serka	529	1.459	816	21.290	1.565	786	8.220	3.996	8.885	13.729	61.275
5	Concong	35	303	0	12.009	0	0	500	505	445	2.232	16.029
6	Kuala Indragiri	342	2.698	0	27.954	0	0	7.511	2.491	5.578	4.589	51.163
7	Tanah Merah	0	60	0	42.747	100	0	28.387	78	100	684	72.156
8	Sungai Batang	1.679	0	0	10.038	0	0	0	2.597	62	223	14.599
9	Reteh	2.825	900	0	36.675	0	0	0	0	45	330	40.775
	<b>Jumlah</b>	<b>5.410</b>	<b>5.420</b>	<b>816</b>	<b>150.713</b>	<b>1.665</b>	<b>786</b>	<b>44.618</b>	<b>9.667</b>	<b>15.115</b>	<b>21.787</b>	<b>255.997</b>

Sumber : BPS, 201



Sumber : BPS, 2018

**Gambar 4.21. Persentase Jenis Penggunaan Lahan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir 2019**

Dari Gambar 4.22 diatas dapat dilihat jenis penggunaan lahan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir cukup heterogen dengan jenis penggunaan lahan terbesar adalah perkebunan yakni 58,87% dan jenis penggunaan lahan yang terkecil adalah padang rumput dengan luas sebesar 0,31%.

#### 4.2.4. Sarana dan Prasarana

##### 4.2.4.1. Sosial Ekonomi

###### a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan, dengan pendidikan yang baik akan berdampak baik pula pada masa depan sebuah bangsa dan negara. Pembangunan pendidikan harus juga didukung dengan sarana dan prasarananya. Berikut Tabel 4.23 dapat dilihat kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel 4.23. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018**

No	Kecamatan	TK	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
1	Kateman	9	24	11	6	5	2	2	3
2	Reteh	4	38	24	11	14	2	8	1
3	Mandah	1	47	22	9	14	4	3	1
4	Tanah Merah	7	22	3	7	2	1	2	1
5	Pulau Burung	9	22	2	7	4	2	1	0
6	Gaung Anak Serka	2	22	3	7	6	2	2	0
7	Kuala Indragiri	2	21	4	4	4	1	0	0
8	Concong	1	14	1	3	2	1	1	0
9	Sungai Batang	1	9	7	3	4	1	4	0

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.22. Sarana Pendidikan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

b. Kesehatan

pada tahun 2018 wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 2 unit rumah sakit yang terletak di Kecamatan Kateman dan Kecamatan Reteh. Untuk fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas secara umum sudah tersebar secara merata di seluruh kecamatan pesisir yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai ketersediaan sarana kesehatan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut :

**Tabel 4.24. Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018**

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Polindes
1	Kateman	1	1	7	27	0
2	Reteh	1	1	9	38	0
3	Mandah	0	3	14	41	8
4	Tanah Merah	0	2	6	30	4
5	Pulau Burung	0	1	11	24	0
6	Gaung Anak Serka	0	2	7	28	0
7	Kuala Indragiri	0	1	7	30	0
8	Concong	0	1	4	17	1
9	Sungai Batang	0	1	3	11	0

Sumber : Hasil Survei, 2019



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.23. Fasilitas Kesehatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

c. Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan jasa selain untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat di suatu daerah juga berfungsi sebagai penggerak perekonomian di suatu daerah, oleh sebab itu keberadaannya sangat penting dan harus selalu ada. Tabel 4.25 berikut ini jumlah dan jenis sarana prasarana perdagangan dan jasa yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel 4.25. Ketersediaan Sarana Prasarana Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018**

No.	Kecamatan	Pasar	Toko	Kios	Industri	Pariwisata	Hotel	Bank
1	Kateman	2	132	116	4	0	8	2
2	Reteh	1	112	76	1	0	4	1
3	Mandah	1	64	49	3	1	2	0
4	Tanah Merah	1	97	62	2	1	2	1
5	Pulau Burung	1	92	120	1	0	0	2
6	Gaung Anak Serka	1	114	70	2	0	1	0
7	Kuala Indragiri	1	59	21	4	1	0	0
8	Concong	1	83	40	1	0	2	0
9	Sungai Batang	1	62	33	0	0	0	0

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.24. Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

d. Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersebar di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari empat jenis yang meliputi masjid, surau, klenteng, dan vihara. Sarana peribadatan yang tersebar merata diseluruh kecamatan terlihat adalah masjid dan surau, hal ini karena mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini adalah beragama islam. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran sarana prasarana peribadatan dapat dilihat melalui Tabel 4.26 berikut ini :

**Tabel 4.26. Ketersediaan Sarana Prasarana Peribadatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018**

No	Kecamatan	MASJID	SURAU	KLENTENG	VIHARA
1	Kateman	60	24	1	1
2	Reteh	62	87	0	0
3	Mandah	79	18	0	1
4	Tanah Merah	13	19	0	1
5	Pulau Burung	24	13	0	0
6	Gaung Anak Serka	26	41	1	0
7	Kuala Indragiri	50	19	0	1
8	Concong	14	21	0	0
9	Sungai Batang	24	34	0	0

Sumber :BPS, 2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.25. Fasilitas Peribadatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

#### 4.2.4.2. Jaringan Transportasi

Sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, jaringan transportasi yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dibagi menjadi dua, yaitu transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi darat berupa jaringan jalan yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya, sedangkan transportasi laut berupa pelabuhan sebagai tempat bongkar muat penumpang maupun barang.

Sebagai wilayah pesisir yang keadaan geografisnya dipisahkan oleh laut dan sungai maka tidak heran jika sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir menggunakan sarana transportasi laut sebagai pilihan utama untuk berpergian maupun untuk menunjang aktifitas sehari-hari lainnya.

##### a. Transportasi Laut

Pelabuhan merupakan sarana yang harus ada bagi setiap wilayah pesisir, dimana keberadaannya sangat penting bagi menunjang pergerakan dan aktifitas masyarakat disekitarnya. Bagi wilayah pesisir, pelabuhan merupakan nyawa bagi perekonomian. Berikut Tabel 4.27 ketersediaan sarana pelabuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir :

**Tabel 4.27. Ketersediaan fasilitas Pelabuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

No	KECAMATAN	PELABUHAN
1	Kateman	4
2	Reteh	1
3	Mandah	3
4	Tanah Merah	3
5	Pulau Burung	2
6	Gaung Anak Serka	3
7	Kuala Indragiri	3
8	Concong	1
9	Sungai Batang	1

Sumber : BPS,2018



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.26. Fasilitas Pelabuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

b. Transportasi Darat

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal

sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Secara umum, kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir dikelompokkan ke dalam 4 kelompok yaitu : baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Masing-masing kondisi jalan akan digambarkan dalam Tabel 4.28, Tabel 4.29, dan Tabel 4.30 di bawah ini.

**Tabel 4.28. Panjang Jalan Menurut Panjang Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Km) Tahun 2014-2017**

Jenis jalan	2014	2015	2016	2017
Jalan Negara	166,60	166,60	166,60	166,60
Jalan Provinsi	391,98	391,98	391,98	391,98
Jalan Kabupaten	1.497,34	1.497,34	1.198,54	1.198,54
<b>Jumlah</b>	<b>2055,92</b>	<b>2.055,92</b>	<b>1.757,12</b>	<b>1.757,12</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

**Tabel 4.29. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Km) Tahun 2014-2017**

Jenis Permukaan	2014	2015	2016	2017
Aspal	610,60	610,60	1.263,94	1.263,94
Kerikil	172,00	172,00	154,66	154,66
Tanah	1.147,32	1.147,32	338,54	338,54
Cor Beton	126,00	126,00	Pm	Pm
<b>Jumlah</b>	<b>2.055,92</b>	<b>2.055,92</b>	<b>1.757,12</b>	<b>1.757,12</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, 2019

**Tabel 4.30. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Km) Tahun 2014-2017**

Kondisi jalan	2014	2015	2016	2017
<b>Baik</b>	313,53	286,73	512,84	527,84
<b>Sedang</b>	601,50	570,50	763,90	763,90
<b>Rusak</b>	636,64	636,64	315,77	305,77
<b>Rusak Berat</b>	504,25	562,25	164,61	159,61
<b>Jumlah</b>	2.055,92	2.056,12	1.757,12	1.757,12

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, 2019*

### 4.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Indragiri Hilir sangat kaya akan sumberdaya alam, baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa potensi pengembangan wilayah yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan beberapa sektor diatas :

#### 4.3.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan mayoritas lapangan usaha bagi penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sebanyak 75,87% pada tahun 2017 atau sebanyak 231.250 penduduk pada usia kerja. Selain itu, lahan untuk kegiatan pertanian juga menempati areal terluas yang dibagi menjadi pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura.

##### 1. Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yaitu pertanian padi sawah. Untuk pertanian padi sawah tersebar

di 6 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas areal 7.356 Ha.

**Tabel 4.31. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Per Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2018**

No	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Reteh	3.235	13.939,05	43,09
2	Sungai Batang	2.167	9.286,84	42,85
3	Tanah Merah	15	56,57	37,51
4	Kuala Indragiri	633	2.363,84	37,35
5	Concong	119	423,75	35,69
6	Gaung Anak Serka	1.187	4.864,37	40,97
7	Mandah	0	0	0
8	Kateman	0	0	0
9	Pulau Burung	0	0	0
	<b>Tahun 2017</b>	<b>7.356</b>	<b>30.934,42</b>	<b>41,91</b>

Sumber : BPS, 2019

## 2. Pertanian Hortikultura

Pertanian hortikultura di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan pertanian lahan kering,

### a. Palawija

Wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir juga menghasilkan Kelompok tanaman palawija yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Berikut adalah luas areal, produksi dan tingkat produktivitas komoditas palawija di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 :

- Komoditas jagung menempati luas areal 2.157 Ha dengan hasil produksi sebanyak 5,062.51 ton atau dengan tingkat produktivitas sebesar 23,47 ton/ha,

- Komoditas kedelai menempati luas areal 147 Ha dengan hasil produksi sebanyak 164,26 Ha atau dengan tingkat produktivitas 11,7 ton/ Ha.
- Komoditas kacang tanah menempati luas areal 20 Ha dengan hasil produksi sebanyak 19,01 Ha atau dengan tingkat produktivitas 9,5 ton/ Ha.
- Komoditas kacang hijau menempati luas areal 61 Ha dengan hasil produksi sebanyak 62,98 Ha atau dengan tingkat produktivitas 10,32 ton/ Ha.
- Komoditas Ubi Kayu menempati luas areal 194 Ha dengan hasil produksi sebanyak 4974,27 Ha atau dengan tingkat produktivitas 256,41 ton/ Ha.
- Komoditas ubi jalar menempati luas areal 103 Ha dengan hasil produksi sebanyak 811,82 Ha atau dengan tingkat produktivitas 82,85 ton/ Ha.

**b. Sayuran**

Tanaman Sayur-sayuran di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir tidak terlalu banyak ragamnya, hanya cabai dan petsai yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan komoditas sayuran lain umumnya komoditi ini banyak didatangkan dari daerah tetangga.

**c. Buah-buahan**

Tanaman buah buahan yang dihasilkan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir meliputi mangga, manggis, sawo, durian, jeruk, pisang, pepaya, nanas dan beberapa komoditas buah lainnya. Wilayah komoditas buah-buahan ini menyebar di seluruh wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir.

#### 4.3.2. Perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kedudukan yang penting, begitu juga pada wilayah pesisirnya. Perkembangan kegiatan perkebunan di Indragiri Hilir menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan, meningkatnya produksi, dan semakin beragamnya jenis tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini adalah kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, sagu, kopi, kakao, pinang, gambir dan aneka tanaman. Potensi hasil perkebunan di wilayah peisir Kabupaten Indragiri Hilir yakni produksi kelapa dalam mencapai 138.720.247 kg per tahun dengan luas lahan 161.027 Ha. Dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di dunia, bahkan dijuluki sebagai “Tanah Hampan Kelapa Dunia”, yang sebagian besarnya tersebar di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi *top of mind and interest* para penanam modal.



Sumber : Hasil Survei, 2019

**Gambar 4.27. Potensi Perkebunan Kelapa di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

#### 4.3.3. Perikanan

Keragaman jenis perikanan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dihasilkan dari sumberdaya dan budidaya perikanan yang terdiri atas budidaya air tawar, budidaya air payau dan perikanan tangkap air laut.

##### 1. Perikanan Tangkap

Perairan laut Kabupaten Indragiri Hilir memiliki posisi yang strategis dimana berhadapan langsung dengan Selat Berhala dan Laut Cina Selatan yang diyakini banyak menyimpan kekayaan sumberdaya hayati, berupa ikan dan berbagai jenis hewan air serta tumbuhan laut lainnya. Sumberdaya ikan tersebut di atas antara lain adalah ikan pelagis dan demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting. Ikan yang tergolong pelagis antara lain

: tenggiri (*Scomberomerus commersoni*), tongkol (*Euthynnus spp.*), kembung (*Rastrelliger spp.*), selar (*Selaroides spp.*), belanak (*Mugil spp.*), gulamah (*Sciaenidae spp.*), kuwe (*Caranx spp.*), cumi (*Loligo spp.*), senangin (*Polynemus spp.*) dan ikan yang tergolong demersal yaitu : kakap (*Lates calcarifer*), bawal hitam (*Formio niger*), bawal putih (*Pampus argenteus*), pari (*Trigonidae*), kurau (*Eleutheronema tetradactylum*), kitang serta binatang yang berkulit keras yaitu : udang putih (*Peneus semisulcatus*), udang barong (*Penulirus spp.*), udang dogol (*Metapenaeus spp.*), rajungan (*Portunus spp.*), kepiting (*Scylla serrata*), udang nenek (*Uratos guilla nepa sp.*) dan masih banyak jenis ikan dan binatang lainnya.

Selain dari perairan laut, potensi perikanan tangkap juga berasal dari perairan umum seperti sungai, danau, parit dan rawa dimana pada tahun 2017 sumberdaya perikanan tangkap dari perairan laut dan perairan umum menghasilkan produksi sebanyak 41.859 ton dengan jumlah tenaga kerja 5.316 KK (Lihat Tabel 4.32).

**Tabel 4.32. Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, 2016-2017**

No	Kecamatan	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Rumah Tangga Perikanan	Produksi (Ton)	Rumah Tangga Perikanan	Produksi (Ton)
1	ReteH	713	2.445,26	730	1.415
2	Sungai Batang	97	3.084,22	168	4.155
3	Tanah Merah	1.099	10.734,65	1.125	10.891
4	Kuala Indragiri	1.115	6.073,24	1.123	6.370
5	Concong	334	7.723,33	343	8.438
6	Gaung Anak Serka	112	237,33	114	259
7	Mandah	1.088	6.656,34	1.152	6.684
8	Kateman	387	3.141,51	402	3.608
9	Pulau Burung	156	709,09	159	39
	<b>Wilayah Pesisir Indragiri Hilir</b>	5.101	40.804,97	5.316	41.859

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019

## 2. Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan merupakan salah satu alternatif usaha bagi masyarakat di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir. Adanya potensi hutan bakau dan kebun kelapa kritis yang luas di Indragiri Hilir mendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan melalui usaha budidaya perikanan. Salah satu budidaya perikanan yang cukup menjanjikan adalah melalui tambak yang merupakan budidaya perikanan air payau. Pada tahun 2017, areal tambak seluas 1.404 Ha dapat menghasilkan produk ikan budidaya sebanyak 3.000 ton dengan jumlah rumah tangga yang terlibat adalah 258 KK. Kecamatan ReteH memiliki tambak yang terluas membudidayakan perikanan air payau yakni 650 Ha dengan melibatkan 40

rumah tangga dengan jumlah produksi mencapai 2.150 ton (Lihat Tabel 4.33).

**Tabel 4.33. Luas Tambak Budidaya Air Payau, Banyaknya Rumah Tangga, dan Produksi Perikanan Tambak di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017**

No	Kecamatan	Luas Tambak (Ha)		Rumah Tangga Perikanan		Produksi (Ton)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1.	Reteh	650	650	40	40	1.024,00	2.150,00
2.	Tanah Merah	302	337	75	90	708,80	450,00
3.	Mandah	12	12	12	12	-	-
4.	Kateman	20	20	10	10	179,35	180,00
5.	Pulau Burung	175	175	50	50	110,20	200,00
6.	Sungai Batang	210	210	56	56	204,00	20,00
7.	Kuala Indragiri	0	0	0	0	0	0
8.	Gaung Anak Serka	0	0	0	0	0	0
9.	Concong	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1.369</b>	<b>1.404</b>	<b>243</b>	<b>258</b>	<b>2.226,35</b>	<b>3.000</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019

Selain budidaya tambak, masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir juga memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk budidaya perikanan air tawar seperti kolam dan mina tani. Pada tahun 2017, luas kolam dan mina tani sebesar 95,92 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 117 ton dan melibatkan jumlah rumah tangga sebanyak ± 676 KK.

**Tabel 4.34. Luas Budidaya Air Tawar dan Mina Tani Serta Produksi Perikanan Air Tawar di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017**

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	
		Kolam		Mina Tani		2016	2017
		2016	2017	2016	2017		
1	Reteh	19,03	19,03	6	6	35,90	40
2	Tanah Merah	0,8	0,8	0	0	1,80	4
3	Kuala Indragiri	0,2	0,2	0	0	0,18	3
4	Gaung Anak Serka	22,50	22,50	15	15	16,31	25
5	Mandah	0,2	0,2	0	0	0,39	2
6	Kateman	9,42	9,42	0	0	1,50	4
7	Pulau Burung	7,90	7,90	0	0	0,35	10
8	Concong	0,9	0,9	0	0	2,32	4
9	Sungai Batang	13,97	13,97	0	0	6,25	25
<b>Jumlah Total</b>		<b>79,92</b>	<b>74,92</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>65</b>	<b>117</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019



Sumber : Survei Lapangan, 2019

**Gambar 4.28. Potensi Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil analisis yang dilakukan untuk setiap sasaran penelitian yang ingin dicapai. Hasil penelitian dibahas sesuai dengan urutan sasaran penelitian dan berdasarkan metode teknik analisis yang digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga sebelumnya.

#### **5.1. Analisis Wilayah Pesisir Yang Berpotensi Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir**

Untuk mengetahui wilayah pesisir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram dan Indeks sentralitas Marshall. Analisis ini dapat digunakan dengan mendasarkan kepada jumlah unit dan jenis fasilitas yang ada, dimana kemampuan suatu daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai fasilitas yang dimiliki. Dengan semakin banyaknya jumlah dan variasi dari jenis fasilitas yang dimiliki oleh suatu daerah, maka daerah tersebut dapat menjadi pusat daya tarik (*attractiveness*) untuk mengembangkan usaha dan dapat mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan/kegiatan ekonomi bagi wilayah-wilayah lain disekitarnya.

Analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall pada penelitian ini menggunakan 26 objek dan 9 subjek. Subjek yang digunakan adalah 9 kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan objek nya adalah :

- a. Fasilitas pendidikan (TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK)
- b. Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu, Pustu, Polindes)
- c. Fasilitas Peribadatan (Masjid, Surau, Klenteng, Vihara)
- d. Fasilitas Ekonomi (Bank, Pasar, Toko, Kios, Industri, Pariwisata, Hotel/Penginapan)
- e. Fasilitas Pendukung (Pelabuhan, Kantor Pos)

Berdasarkan kondisi eksisting terdapat 26 jenis fasilitas di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir yang telah dipilih, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, peribadatan dan lain-lain. Pada Tabel 5.1. berikut dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah unit fasilitas tertinggi adalah Kecamatan Reteh dengan total 497 unit, dan disusul Kecamatan Kateman dengan 457 unit. Sedangkan kecamatan dengan jumlah unit fasilitas terendah adalah Kecamatan Sungai Batang dengan total 200 unit. Namun, jika dilihat dari kelengkapan jenis fasilitas yang dimiliki oleh setiap kecamatan, maka kecamatan yang paling lengkap jenis fasilitasnya adalah Kecamatan Kateman dan Kecamatan Tanah merah dengan jumlah jenis fasilitas yang dimiliki adalah 24 dari total 26 jenis fasilitas.

**Tabel 5.1. Jumlah Ketersediaan Unit dan Jenis Fasilitas di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Unit Fasilitas	Jumlah Jenis Fasilitas
1	Kateman	48.051	454	24
2	Tanah Merah	32.147	290	24
3	Mandah	41.127	389	23
4	Reteh	45.605	497	22
5	Concong	13.988	209	20
6	Pulau Burung	23.084	339	19
7	Gaung Anak Serka	22.977	341	19
8	Kuala Indragiri	20.226	234	19
9	Sungai Batang	12.763	200	17

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Selanjutnya menguji kelayakan skalogram dengan rumus *Coefisien Of Reproducibility* (COR), Penelitian dengan analisis skalogram dapat dikatakan layak jika nilai COR sebesar 0,9 sampai dengan 1.

Berikut rumus *Coefisien Of Reproducibility* (COR) :

$$(CR) = 1 - \frac{\sum e}{N - K}$$

Keterangan :

CR = tingkat kesalahan

$\sum e$  = Jumlah kesalahan

N = Jumlah fasilitas

K = Jumlah kecamatan

Diketahui :

$\sum e = 9$  (Lihat Lampiran 3)

N = 187 (Lihat Lampiran 3)

K = 9

Maka :

$$\begin{aligned}(\text{CR}) &= 1 - \frac{9}{187 - 9} \\ &= 1 - \frac{9}{178} \\ &= 0,95 \text{ (Layak)}\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji *Coefisien Of Reproducibility* (COR) diatas, maka analisis skalogram adalah layak untuk dilakukan.

Setelah tabel skalogram dinyatakan layak untuk digunakan, maka selanjutnya dilakukan pembobotan dengan analisis indeks sentralitas Marshall untuk mengetahui hirarki wilayah dari setiap kecamatan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam tahapan analisis indeks sentralitas Marshall, setiap wilayah akan dijumlahkan nilai indeks sentralitas terbobotnya dengan rumus sebagai berikut :

$$C = (x/X)$$

Keterangan :

C = bobot atribut fungsi x

x = nilai sentralitas gabungan = 100

X = jumlah total atribut dalam system

Hasil perhitungan nilai indeks sentralitas terbobot dengan rumus diatas dapat dilihat pada lampiran 4, yang selanjutnya menjadi acuan dalam menghitung nilai Indeks Sentralitas Marshall pada masing-masing wilayah (lampiran 5).

Berdasarkan hasil perhitungan indeks sentralitas Marshall (lampiran 5) maka diketahui nilai sentralitas dari tiap-tiap kecamatan yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2. Nilai Indeks Sentralitas Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Unit Fasilitas</b>	<b>Jumlah Jenis Fasilitas</b>	<b>Nilai Indeks Sentralitas</b>
1	Kateman	48.051	454	24	494
2	Reteh	45.605	497	22	369
3	Tanah Merah	32.147	290	24	361
4	Mandah	41.127	389	23	336
5	Concong	13.988	209	20	253
6	Pulau Burung	23.084	339	19	228
7	Gaung Anak Serka	22.977	341	19	219
8	Kuala Indragiri	20.226	234	19	248
9	Sungai Batang	12.763	200	17	190

*Sumber : Hasil Analisis, 2019*

Dari Tabel 5.2 diatas diketahui urutan nilai indeks sentralitas tiap wilayah dari yang tertinggi hingga terendah. Kecamatan dengan nilai indeks sentralitas tertinggi adalah Kecamatan Kateman dengan nilai 494 dan Kecamatan Reteh sebagai kecamatan dengan nilai sentralitas tertinggi kedua yaitu sebesar 369, kemudian disusul oleh Kecamatan Tanah Merah sebesar 361, Kecamatan Mandah 336, dan seterusnya hingga kepada kecamatan dengan nilai indeks sentralitas terendah yaitu Kecamatan Sungai Batang sebesar 190.

Selanjutnya setelah nilai sentralitas tiap kecamatan diketahui maka dilakukan pengelompokan masing-masing kecamatan kedalam beberapa hirarki sesuai dengan nilai sentralitas yang dimiliki. Untuk menentukan hirarki wilayah maka langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah kelas atau jumlah hirarki dengan rumus Struges berikut :

$$k = 1 + 3.3 \text{ Log } n \dots\dots\dots$$

Keterangan :

k = banyaknya kelas, dan

n = banyaknya kecamatan

Dari hasil perhitungan dengan metode Struges diatas untuk mengetahui jumlah kelas atau hirarki yang ada pada lokasi penelitian maka didapatkan 4 hirarki dengan panjang interval tiap-tiap hirarki adalah 76 (Lampiran 6 dan 7). Berdasarkan hasil tersebut maka hirarki wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari hirarki I yaitu Kecamatan Kateman dengan nilai indeks sentralitas 494, hirarki II terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Reteh dengan nilai indeks senralitas 369 dan Kecamatan Tanah Merah dengan nilai indeks sentralitas 361, hirarki III Kecamatan Mandah dengan nilai indeks sentralitas 336, sedangkan kecamatan dengan peringkat hirarki terendah yakni hirarki IV terdiri dari 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Concong, Pulau Burung, Gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, dan Kecamatan Sungai Batang.

Untuk lebih jelasnya mengenai hirarki wilayah pada masing-masing kecamatan pesisir di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut :

**Tabel 5.3. Hirarki Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

Hirarki	Kecamatan	Nilai Indeks Sentralitas	Panjang Interval	Jumlah Penduduk	Jumlah Unit Fasilitas	Jumlah Jenis Fasilitas
I	Kateman	494	494 - 418	48.051	454	24
II	Reteh	369	417,9 – 341,9	45.605	497	22
II	Tanah Merah	361	417,9 – 341,9	32.147	290	24
III	Mandah	336	341,9 – 265,9	41.127	389	23
IV	Concong	253	265,9 – 189,9	13.988	339	20
IV	Pulau Burung	228	265,9 – 189,9	23.084	341	19
IV	Gaung Anak Serka	219	265,9 – 189,9	22.977	234	19
IV	Kuala Indragiri	248	265,9 – 189,9	20.226	209	19
IV	Sungai Batang	190	265,9 – 189,9	12.763	200	17

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, dapat diidentifikasi kedudukan dari tiap-tiap kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hirarki wilayah yang dihasilkan. Dengan demikian pusat pertumbuhan wilayah pesisir di kabupaten Indragiri Hilir dapat digolongkan menjadi 4 kelompok yakni kecamatan yang menduduki hirarki I sebagai pusat pertumbuhan utama (primer), kecamatan yang menduduki hirarki II sebagai pusat pertumbuhan kedua (sekunder), kecamatan yang menduduki hirarki III sebagai pusat pertumbuhan ketiga (tersier), dan kecamatan dengan hirarki IV adalah wilayah *hinterland*, yang merupakan sub daerah yang dilayani oleh masing-masing kecamatan dengan nilai hirarki lebih tinggi diatasnya, yaitu kecamatan dengan hirarki I, II dan III. Kecamatan dengan hirarki IV ini adalah kategori kecamatan dengan kemampuan skala pelayan tingkat lingkungan, yang hanya melayani kebutuhan-kebutuhan daerah di dalamnya.

Berikut pengelompokan pusat-pusat pertumbuhan wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil analisis :

### **HIRARKI I : Pusat Pertumbuhan Utama (Primer)**

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa Kecamatan Kateman merupakan kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan utama di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dengan skala pelayanan terluas, dimana tingkat kelengkapan dan nilai sentralitas fasilitasnya adalah yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya yaitu dengan nilai indeks sentralitas sebesar 494 (Lihat Tabel 5.3).

Pusat pertumbuhan utama (primer) atau pusat pertumbuhan dengan hirarki satu adalah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang berada dibawah tingkatannya, dengan pemusatan penduduk terbesar dan kelengkapan sarana dan prasarana yang lengkap.

Jika dilihat dari kondisi eksisting wilayah, maka hirarki I yang di dapat pada Kecamatan Kateman adalah wajar, dimana kecamatan ini adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan jumlah 48.051 jiwa, dimana dengan jumlah penduduk terbanyak tersebut tentu menuntut suatu tingkat pelayanan yang tinggi pula, baik dari segi pelayanan sosial, ekonomi dan lain-lain, sehingga wajar apabila di Kecamatan Kateman terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap.

Selain memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, Kecamatan Kateman juga berada pada lokasi yang sangat strategis, dimana wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi salah satu jalur hilir mudik bagi pelayaran dan angkutan transportasi sungai baik dari dalam maupun luar wilayah kabupaten dan provinsi. Hal lain yang menjadi daya tarik dari wilayah ini adalah terdapatnya salah satu industri pengolahan kelapa terbesar di provinsi Riau yang secara langsung memberikan dampak *multiplayer effect* bagi wilayahnya baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Kecamatan Kateman juga memiliki sarana perekonomian yang lengkap dengan perkembangan bangunan-bangunan pertokoan sebagai pusat perdagangan terpesat di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir.



*Sumber : Hasil Survei, 2019*

**Gambar 5.1. Perusahaan Pengolahan Kelapa PT.Pulau Sambu di Kecamatan Kateman**



*Sumber : Hasil Survei, 2019*

### **Gambar 5.2. Kota Guntung, Kecamatan Kateman**

#### **HIRARKI II : Pusat Pertumbuhan Kedua (Sekunder)**

Berdasarkan hasil analisis, wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan kedua terdiri dari dua wilayah, yaitu Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah. Terpilihnya dua kecamatan ini sebagai pusat pertumbuhan kedua tidak lepas dari keberadaan unit dan jenis sarana prasarana yang dimiliki, dimana Kecamatan Reteh merupakan kecamatan dengan jumlah unit sarana prasarana terbanyak di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 497 unit dan 22 jenis fasilitas. Kecamatan Reteh juga merupakan kecamatan dengan peringkat jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kecamatan Kateman. Sedangkan Kecamatan Tanah Merah memiliki 290 unit dengan 24 jenis fasilitas. Secara umum, Kecamatan Tanah Merah memang memiliki jumlah unit sarana dan jumlah penduduk yang lebih sedikit dari kecamatan Reteh, akan tetapi jika dilihat dari jumlah jenis fasilitas yang dimiliki,

kepemilikan jenis fasilitas Kecamatan Tanah Merah lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Reteh, yakni 24 jenis fasilitas berbanding 22 jenis.

Dengan keberadaan sarana prasarana yang cukup lengkap pada kedua wilayah ini yaitu Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah akan menjadi daya tarik bagi masyarakat diluar daerahnya untuk datang baik sekedar untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, maupun untuk keperluan lain seperti membuka usaha, berbelanja, berinventasi, dan lain sebagainya.

Selain itu, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah juga diuntungkan dengan letak geografisnya yang cukup strategis. Kecamatan Reteh sebagai kecamatan terluar di pesisir selatan Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan langsung dengan Kuala Tungkal kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, yang mana wilayahnya menjadi salah satu jalur transportasi sungai yang menghubungkan dua wilayah tersebut. Begitu juga dengan Kecamatan Tanah Merah, menjadi salah satu jalur transportasi sungai yang menghubungkan berbagai wilayah baik dalam kabupaten maupun luar wilayah kabupaten. Letak kedua wilayah yang strategis ini menjadikan wilayah Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah banyak berkembang usaha perekonomian rakyat seperti jasa angkutan dan transportasi, dan bermacam fasilitas perekonomian lainnya baik pasar, toko, kios dan warung.

Kecamatan Tanah Merah juga menjadi lokasi keluar masuknya barang dengan dibangunnya pelabuhan samudera di ibu kota Kuala Enok yang merupakan pelabuhan terbesar bertaraf internasional di kabupaten Indragiri Hilir, dimana fungsi dari keberadaan pelabuhan ini sangat strategis yang menjadi pintu gerbang ekonomi

Sumatera bagian selatan. Di Kecamatan Tanah Merah juga terdapat 2 perusahaan industri yang bergerak dibidang pengolahan kelapa yaitu cabang dari PT. Pulau Sambu di Kecamatan Kateman dan PT AEC Brothers. Dengan kondisi tersebut maka wajar jika Kecamatan Tanah Merah memiliki daya Tarik yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat Indragiri Hilir.

### **HIRARKI III : Pusat Pertumbuhan Ketiga (Tersier)**

Kecamatan Mandah menempati pusat pertumbuhan ketiga dengan kelengkapan jenis fasilitas diperingkat ketiga yakni sebesar 23 jenis fasilitas yang dimiliki dari total 26 jenis fasilitas. Jika dilihat dari nilai indeks sentralitasnya Kecamatan Mandah berada dibawah Kecamatan Tanah Merah dengan nilai sentralitas sebesar 336 dan Kecamatan Tanah Merah sebesar 369, namun jika dilihat pada jumlah unit fasilitas yang dimiliki Kecamatan Tanah Merah lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Mandah yaitu berjumlah 389 unit berbanding 290 unit fasilitas. Namun nilai indeks sentralitas sebagai penentu hirarki wilayah pada Kecamatan Tanah Merah lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Mandah yakni 369 berbanding 336, hal ini menjadi tolak ukur mengapa hirarki kedua wilayah tersebut berbeda dimana Kecamatan Tanah Merah menempati hirarki kedua dan Kecamatan Mandah menempati Hirarki ketiga.

Selain itu, Kecamatan Mandah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga setelah Kecamatan Kateman dan Kecamatan Reteh yakni sebesar 41.127 jiwa. Dampak dari besarnya jumlah penduduk pada wilayah ini maka kebutuhan masyarakat akan fasilitas baik sosial maupun ekonomi semakin meningkat sehingga diwilayah ini banyak dibangun fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

peribadatan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas yang dibangun di Kecamatan Mandah yakni 389 unit.

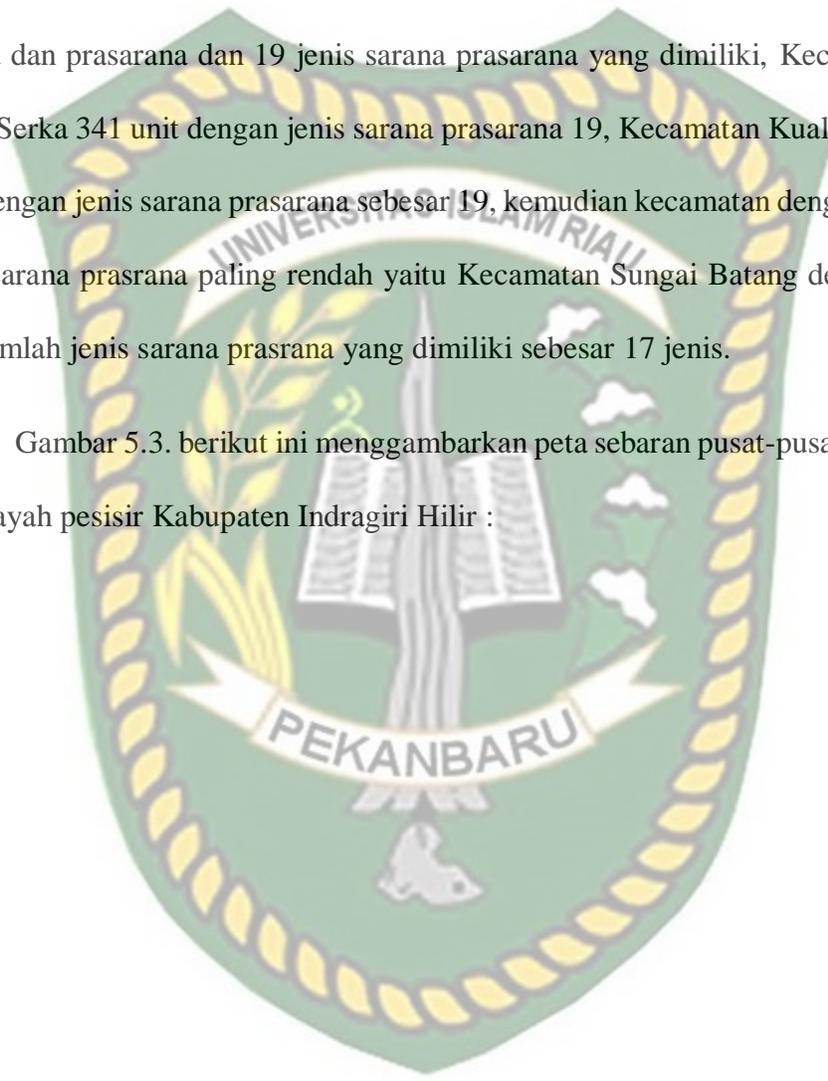
#### **HIRARKI IV : Wilayah *Hinterland***

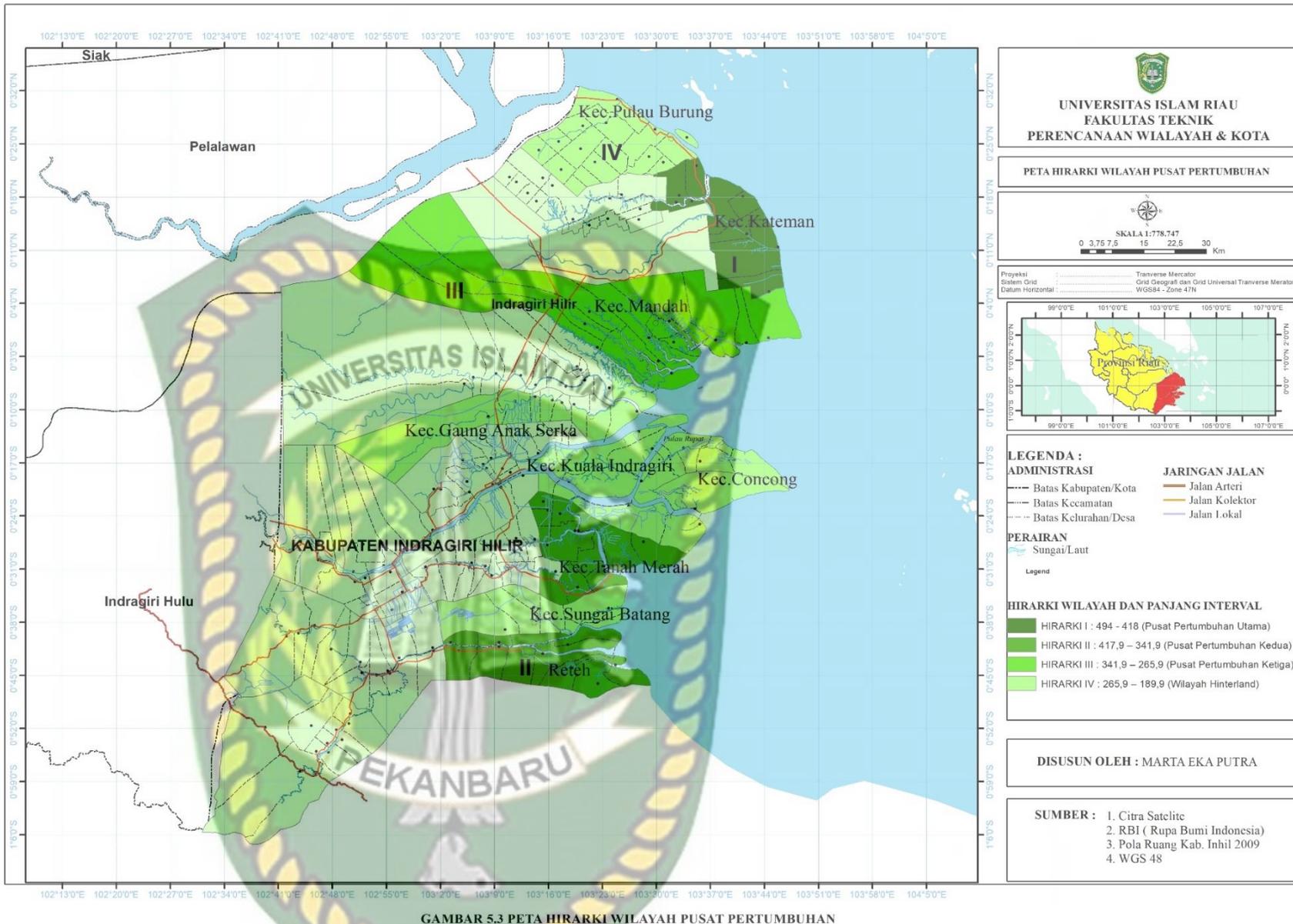
Kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir yang tergolong kedalam hirarki empat terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Concong, Pulau Burung, Gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, dan Sungai Batang (Lihat Tabel 5.3). Kelima kecamatan ini dikategorikan sebagai wilayah *hinterland* dengan tingkat fasilitas pelayanan terendah diantara kecamatan-kecamatan pesisir lainnya. Sebagai wilayah *hinterland*, pertumbuhan masing-masing wilayah pada hirarki keempat sangat bergantung kepada pusat-pusat pertumbuhan yang berada pada hirarki lebih tinggi di atasnya.

Ditetapkannya kelima kecamatan ini sebagai kecamatan dengan peringkat hirarki keempat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan jumlah unit dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki pada masing-masing wilayahnya, dimana jumlah unit dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki suatu wilayah akan sangat mempengaruhi orang untuk datang dan berinteraksi pada wilayah tersebut. Kelengkapan jenis sarana dan prasarana merupakan daya tarik bagi suatu wilayah, semakin lengkap ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah maka dapat diasumsikan bahwa wilayah tersebut akan semakin maju dan berkembang.

Kelima kecamatan ini adalah kecamatan dengan jumlah jenis sarana prasarana terendah diantara kecamatan pesisir lainnya. Kecamatan concong jumlah sarana prasarananya 209 unit dengan jumlah jenis sarana prasarana 20 dari 26 jenis sarana prasarana yang dianalisis, selanjutnya Kecamatan Pulau Burung terdiri dari 339 unit sarana dan prasarana dan 19 jenis sarana prasarana yang dimiliki, Kecamatan Gaung Anak Serka 341 unit dengan jenis sarana prasarana 19, Kecamatan Kuala Indragiri 234 unit dengan jenis sarana prasarana sebesar 19, kemudian kecamatan dengan jumlah dan jenis sarana prasarana paling rendah yaitu Kecamatan Sungai Batang dengan 200 unit dan jumlah jenis sarana prasarana yang dimiliki sebesar 17 jenis.

Gambar 5.3. berikut ini menggambarkan peta sebaran pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir :





### **5.1.1. Perbandingan Antara Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall Dengan Kebijakan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teknik analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat empat kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan yakni Kecamatan Kateman sebagai pusat pertumbuhan utama dengan hirarki I, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah sebagai pusat pertumbuhan kedua dengan hirarki II, kemudian Kecamatan Mandah sebagai pusat pertumbuhan ketiga dengan hirarki III.

Guna untuk mengetahui perbedaan antara hasil analisis di atas dengan kebijakan yang ada di dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hilir terkait penentuan pusat-pusat pertumbuhan maka dalam sub bab ini peneliti mencoba membandingkan hasil dari analisis dengan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

**Tabel 5.4. Perbandingan Hasil Analisis Wilayah yang Berpotensi Menjadi Pusat Pertumbuhan dengan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Kecamatan	Hasil Analisis	Kebijakan RTRW	Rekomendasi
1	Kateman	Pusat Pertumbuhan Utama (Hirarki I)	Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan fungsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Pengolahan Agro Industri</li> <li>- Permukiman Perkotaan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	Pusat Pertumbuhan Utama
2	Reteh	Pusat Pertumbuhan Kedua (Hirarki II)	Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan fungsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan,</li> <li>- Pendidikan, dan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	Pusat Pertumbuhan Kedua
3	Tanah Merah	Pusat Pertumbuhan Kedua (Hirarki II)	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dengan fungsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pengembangan Cluster Industri,</li> <li>- Pelabuhan Laut,</li> <li>- Pemerintahan Kecamatan,</li> <li>- Permukiman Perkotaan,</li> <li>- Perdagangan dan Jasa Nasional.</li> </ul>	Pusat Pertumbuhan Kedua
4	Mandah	Pusat Pertumbuhan Ketiga (Hirarki III)	Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dengan fungsi :	Pusat Pertumbuhan Ketiga

No.	Kecamatan	Hasil Analisis	Kebijakan RTRW	Rekomendasi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permukiman Perkotaan,</li> <li>- Pendidikan, dan</li> <li>- Perdagangan dan Jasa</li> </ul>	
5	Concong	Wilayah <i>Hinterland</i> (Hirarki IV)	Pusat Pelayanan Lokal (PPL), Dengan Fungsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Desa,</li> <li>- Pusat Pengembangan Sentra Pertanian dan perikanan,</li> <li>- Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan.</li> </ul>	Wilayah <i>Hinterland</i>
6	Kuala Indragiri	Wilayah <i>Hinterland</i> (Hirarki IV)	Pusat Pelayanan Lokal (PPL), Dengan Fungsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Desa,</li> <li>- Pusat Pengembangan Sentra Pertanian dan perikanan,</li> <li>- Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan.</li> </ul>	Wilayah <i>Hinterland</i>
7	Pulau Burung	Wilayah <i>Hinterland</i> (Hirarki IV)	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Dengan Fungsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusat Pengembangan Cluster Industri,</li> <li>- Pelabuhan Laut,</li> <li>- Pemerintahan Kecamatan,</li> <li>- Permukiman Perkotaan,</li> <li>- Perdagangan dan Jasa.</li> </ul>	Wilayah <i>Hinterland</i>

No.	Kecamatan	Hasil Analisis	Kebijakan RTRW	Rekomendasi
8	Gaung Anak Serka	Wilayah Hinterland (Hirarki IV)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Dengan Fungsi : - Permukiman Perkotaan, - Perdagangan dan Jasa, - Perhubungan Udara.	Wilayah Hinterland
9	Sungai Batang	Wilayah Hinterland (Hirarki IV)	Pusat Pelayanan Lokal (PPL), Dengan Fungsi : - Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Desa, - Pusat Pengembangan Sentra Pertanian dan perikanan, - Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan.	Wilayah Hinterland

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Berdasarkan Tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara hasil analisis dan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil analisis terlihat bahwa Kecamatan Kateman sebagai pusat pertumbuhan utama dengan hirarki I, akan tetapi dalam kebijakan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir kecamatan ini hanya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sedangkan Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Pulau Burung yang berdasarkan hasil analisis menempati hirarki kedua dan keempat di dalam kebijakan RTRW diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).

Kecamatan tanah Merah dan Kecamatan Pulau Burung diarahkan sebagai PKWp dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hilir dengan fungsi sebagai pusat pengembangan cluster industri dan pelababuhan laut, namun dalam hasil analisis terlihat bahwa kedua kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan kepemilikan jumlah dan jenis sarana prasarana yang sangat berbeda jauh di bawah Kecamatan Kateman, sebagaimana diketahui bahwa salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dalam penentuan pusat pertumbuhan adalah bahwa semakin tinggi jumlah penduduk dan kepemilikan unit dan jenis sarana prasarana yang dimiliki suatu wilayah maka semakin tinggi potensi wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Kecamatan Kateman adalah kecamatan yang paling berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya untuk memicu perkembangan pembangunan bagi wilayah Indragiri Hilir bagian utara seperti Kecamatan Pulau

Burung, Kecamatan Mandah, Pelangiran dan lain-lain yang secara geografis terpisah jauh dari ibu kota kabupaten Indragiri Hilir yakni Kota Tembilahan.

Sedangkan untuk Kecamatan Pulau Burung disarankan sebagai wilayah *hinterland* dari Kecamatan Kateman karena lokasinya yang sangat berdekatan hanya berjarak 18 Km, dan untuk Kecamatan Tanah Merah berpotensi sebagai kecamatan pusat pertumbuhan alternatif atau pusat pertumbuhan kedua yang melayani kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah selatan Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak terjangkau oleh pusat pertumbuhan utama yaitu Kecamatan Kateman.



## 5.2. Analisis Kekuatan Interaksi dan Batas Pengaruh Antar Wilayah Pesisir Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan Dengan Wilayah *Hinterland*-nya di Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui bagaimana interaksi dan batas pengaruh antar wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterland*-nya di kabupaten Indragiri Hilir maka dalam penelitian ini digunakan analisis gravitasi dan titik henti sebagai berikut :

### 5.2.1. Analisis Gravitasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya melalui variabel jumlah penduduk dan jarak antar masing-masing wilayah. Hubungan antar wilayah dapat diidentifikasi sebagai interaksi ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya/*hinterland*-nya, dimana satu wilayah dapat dianggap sebagai suatu massa yang memiliki daya tarik menarik, sehingga akan terjadi hubungan saling mempengaruhi antara kedua wilayah yang bersangkutan tersebut. Dalam hal ini, angka interaksi yang besar dapat menunjukkan hubungan yang erat antara pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya. Interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pergerakan barang maupun pergerakan yang dilakukan oleh penduduk masing-masing wilayah baik dalam hubungan pelayanan ekonomi maupun sosial.

Salah satu unsur yang penting dalam sistem wilayah adalah interaksi antara masing-masing pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah belakang/*hinterland*

yang merupakan wilayah pengaruhnya. Antara pusat pertumbuhan dengan *hinterland*-nya terdapat suatu keterhubungan dan ketergantungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun keterkaitan dalam hubungan ekonomi antara kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kecamatan sebagai *hinterland*-nya antara lain adalah sebagai sentral penyalur bahan-bahan pokok, sebagai pusat pemasaran dari hasil-hasil produksi, sebagai pusat pendidikan, sebagai penyerap tenaga kerja, sebagai sentra perdagangan, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall sebelumnya telah diketahui kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan aspek sarana dan prasarana yang dimiliki, yakni Kecamatan Kateman sebagai pusat pertumbuhan utama, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah sebagai pusat pertumbuhan kedua, serta Kecamatan Mandah sebagai pusat pertumbuhan ketiga. Selanjutnya melalui analisis gravitasi akan diketahui kekuatan interaksi oleh masing-masing pusat pertumbuhan tersebut terhadap wilayah *hinterland*-nya.

Dari hasil analisis perhitungan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*-nya di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir menggunakan rumus gravitasi maka diketahui tingkat interaksi dari masing-masing kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan lain disekitarnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.5. Hasil Nilai Interaksi Wilayah Antara Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Belakangnya (*Hinterland*) di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2019**

No.	Kecamatan Asal (Pusat Pertumbuhan)	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i - j)	Jarak (i - j) <sup>2</sup>	Nilai Interaksi
	(i)	(j)	(Pi)	(Pj)	(dij)/km	(dij) <sup>2</sup>	(Aij)
1	Kateman	Kateman	48.051	48.051	0	0	0
		Tanah Merah	48.051	32.147	165	27.225	56.738
		Mandah	48.051	41.127	49	2.401	823.071
		Reteh	48.051	45.605	206	42.436	51.639
		Concong	48.051	13.988	88	7.744	86.795
		Pulau Burung	48.051	23.084	18	324	3.423.485
		Gaung Anak Serka	48.051	22.977	111	12.321	89.609
		Kuala Indragiri	48.051	20.226	83	6.889	141.077
		Sungai Batang	48.051	12.763	204	41.616	14.737
<b>TOTAL INTERAKSI</b>							<b>4.687.151</b>
2	Tanah Merah	Kateman	32.147	48.051	165	27.225	56.738
		Tanah Merah	32.147	32.147	0	0	0
		Mandah	32.147	41.127	119	14.161	93.363
		Reteh	32.147	45.605	42	1.764	831.102
		Concong	32.147	13.988	68	4.624	97.247
		Pulau Burung	32.147	23.084	185	34.225	21.682
		Gaung Anak Serka	32.147	22.977	83	6.889	107.220
		Kuala Indragiri	32.147	20.226	39	1.521	427.485
		Sungai Batang	32.147	12.763	39	1.521	269.752
<b>TOTAL INTERAKSI</b>							<b>1.904.590</b>

No	Kecamatan Asal (Pusat Pertumbuhan)	Kecamatan Tujuan	Penduduk Daerah Asal	Penduduk Daerah Tujuan	Jarak (i - j)	Jarak (i - j) <sup>2</sup>	Nilai Interaksi
	(i)	(j)	(Pi)	(Pj)	(dij)/km	(dij) <sup>2</sup>	(Aij)
3	Mandah	Kateman	41.127	48.051	49	2.401	823.071
		Tanah Merah	41.127	32.147	119	14.161	93.363
		Mandah	41.127	41.127	0	0	0
		Reteh	41.127	45.605	160	25.600	73.266
		Concong	41.127	13.988	40	1.600	359.553
		Pulau Burung	41.127	23.084	69	4.761	199.407
		Gaung Anak Serka	41.127	22.977	61	3.721	253.957
		Kuala Indragiri	41.127	20.226	83	6.889	120.748
		Sungai Batang	41.127	12.763	158	24.964	21.026
<b>TOTAL INTERAKSI</b>							<b>1.944.391</b>
4	Reteh	Kateman	45.605	48.051	206	42436	51.639
		Tanah Merah	45.605	32.147	42	1764	831.102
		Mandah	45.605	41.127	160	25600	73.266
		Reteh	45.605	45.605	0	0	0
		Concong	45.605	13.988	108	11664	54.692
		Pulau Burung	45.605	23.084	226	51076	20/611
		Gaung Anak Serka	45.605	22.977	129	16641	62.969
		Kuala Indragiri	45.605	20.226	80	6400	144.126
		Sungai Batang	45.605	12.763	23	529	1.100.296
<b>TOTAL INTERAKSI</b>							<b>2.338.701</b>

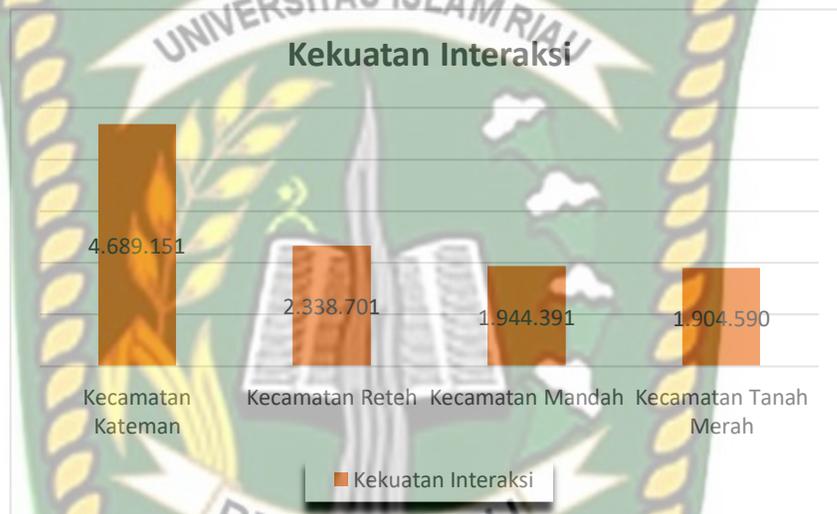
Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas, maka dapat diidentifikasi nilai kekuatan interkasi dari masing-masing pusat pertumbuhan terhadap wilayah belakangnya. Peringkat daya tarik kekuatan interaksi dari masing-masing kecamatan pusat pertumbuhan terhadap wilayah belakangnya dapat dilihat melalui penyederhanaan Tabel 5.6. dan Gambar 5.5. berikut :

**Tabel 5.6. Peringkat Daya Tarik Kekuatan Interaksi Masing-Masing Kecamatan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2019**

	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Total Nilai Interaksi	Peringkat Daya Tarik
1	Kateman	4.687.151	I
2	Reteh	2.338.701	II
3	Mandah	1.944.391	III
4	Tanah Merah	1.904.590	IV

Sumber : Hasil Analisis, 2019



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.4. Grafik Kekuatan Interaksi Kecamatan Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah *Hinterland*-nya di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

Dari Tabel 5.6. dan Gambar 5.4. diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kecamatan Kateman adalah pusat pertumbuhan yang memiliki nilai interaksi terbesar terhadap wilayah belakangnya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir, yakni dengan total nilai interaksi sebesar 4.687.151 satuan interaksi.

Selanjutnya kecamatan pusat pertumbuhan dengan nilai interaksi terbesar kedua terhadap wilayah belakangnya setelah Kecamatan Kateman adalah Kecamatan Reteh dengan total nilai interaksi adalah 2.338.701 satuan interaksi, kemudian disusul Kecamatan Mandah dengan total nilai interaksi sebesar 1.944.391 satuan interaksi, dan yang terakhir kecamatan pusat pertumbuhan dengan nilai interaksi terendah adalah Kecamatan Tanah Merah dengan total nilai interaksi sebesar 1.904.590 satuan interaksi.

Terjadinya perbedaan nilai interaksi yang cukup signifikan pada masing-masing pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti faktor geografis, jarak, jumlah penduduk, kelengkapan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang menjadi daya tarik bagi masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan hasil analisis, berikut penjelasan mengenai wilayah pusat pertumbuhan yang memiliki interaksi tertinggi hingga terendah di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir :

## PERINGKAT INTERAKSI I : Kecamatan Kateman

Jika dilihat dari hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall, Kecamatan Kateman merupakan pusat pertumbuhan utama dengan jumlah penduduk dan kepemilikan sarana dan prasarana terbanyak di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa Kecamatan Kateman memiliki nilai interaksi tertinggi dibandingkan dengan pusat pertumbuhan lainnya (Lihat Tabel 5.6). Nilai interaksi tertinggi antara wilayah Kecamatan Kateman terhadap wilayah hinterlandnya terjadi pada Kecamatan Pulau Burung dengan nilai kekuatan interaksi sebesar 3.423.485, dan nilai interaksi terendah adalah pada Kecamatan Sungai Batang yaitu sebesar 14.737.

Kepemilikan sarana dan prasarana wilayah yang cukup lengkap menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk di wilayah *hinterland*-nya untuk berinteraksi ke Kecamatan Kateman, baik untuk sekedar mendapatkan pelayanan maupun tujuan lainnya seperti bisnis, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.

Selain kelengkapan sarana dan prasarana, Kecamatan Kateman juga memiliki perusahaan industri pengolahan kelapa terbesar di provinsi Riau yang menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat di wilayah *hinterland*-nya untuk datang mencari pekerjaan, bongkar muat bahan baku, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kapal-kapal yang berlabuh dan pergerakan penduduk dari wilayah sekitarnya menuju ke Kecamatan Kateman, dimana aktivitas

pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluarnya orang/barang tidak pernah sepi dan selalu padat.



Sumber : Hasil Survei, 2019

### **Gambar 5.5. Aktifitas Pelabuhan di Kecamatan Kateman**

#### **PERINGKAT INTERAKSI II : Kecamatan Reteh**

Kecamatan Reteh merupakan pusat pertumbuhan sekunder dengan nilai interaksi tertinggi kedua setelah Kecamatan Kateman (Lihat Tabel 5.6). Kecamatan Reteh juga merupakan kecamatan dengan peringkat jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Kateman, sehingga tidak heran jika kecamatan ini memiliki nilai kekuatan interaksi yang cukup tinggi.

Jika dilihat dari kondisi geografis wilayah, Kecamatan Reteh merupakan kecamatan dengan potensi geografis yang sangat strategis dengan jarak ke masing-masing wilayah *hinterland*-nya cukup berdekatan dan didukung oleh jaringan transportasi yang cukup mudah baik akses melalui transportasi darat maupun

sungai. Kecamatan Reteh terhubung langsung dengan Kecamatan Sungai Batang, Tanah Merah, Keritang, Kemuning, dan kecamatan-kecamatan lain disekitarnya yang dapat diakses melalui jalan darat sehingga memudahkan mobilisasi penduduk baik dari dalam maupun luar wilayahnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut memungkinkan untuk masing-masing wilayah *hinterland* dari Kecamatan Reteh lebih mudah untuk berinteraksi dengan Kecamatan Reteh sebagai pusat pertumbuhan. Selain itu, Kecamatan Reteh juga menjadi kota persinggahan bagi penduduk wilayah kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan perjalanan menuju ke kota Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan sebaliknya dari Kuala Tungkal ke Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, Kecamatan Reteh memiliki hubungan interaksi yang erat terhadap wilayah belakangnya, baik berupa hubungan ekonomi maupun sosial.

Nilai interaksi tertinggi antara Kecamatan Reteh terhadap wilayah hinterlandnya terjadi pada Kecamatan Sungai Batang yakni sebesar 1.100.296, dan nilai interaksi terendah terjadi pada Kecamatan Pulau Burung yaitu sebesar 20.611.



Sumber : <http://KualaTerapung.Blogspot.com>

**Gambar 5.6. Aktivitas Pelabuhan di Kota Pulau Kijang**

### **PERINGKAT INTERAKSI III : Kecamatan Mandah**

Kecamatan Mandah berada ditengah-tengah jalur transportasi sungai yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir, baik untuk bepergian kedalam wilayah kabupaten maupun keluar wilayah kabupaten seperti wilayah Provinsi Kepulauan Riau yakni kota Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan lain-lain. Dengan kondisinya yang strategis tersebut menjadikan wilayah Kecamatan Mandah tidak sepi dari aktivitas lalu lintasnya kendaraan transportasi sungai seperti *ferry*, *speedboat*, kapal motor, dan lain-lain. Selain itu, Kecamatan Mandah juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dengan menduduki hirarki ketiga di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

Kondisi tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi wilayah Kecamatan Mandah sehingga mengundang penduduk diluar daerahnya untuk datang ke wilayahnya, baik sekedar untuk berkunjung maupun untuk kepentingan

lainnya. Kecamatan Mandah juga dikenal sebagai kota pendidikan, dengan jumlah sarana prasarana pendidikan terlengkap di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir. Dengan kondisi tersebut menarik banyak masyarakat luar untuk datang ke Kecamatan Mandah baik sebagai tenaga pengajar maupun sebagai siswa yang bersekolah.

Kecamatan Mandah juga merupakan salah satu kecamatan yang memiliki objek wisata unggulan di kabupaten Indragiri Hilir, yakni destinasi wisata Pantai Solop desa Pulau Cawan yang terletak tidak begitu jauh dari ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh menggunakan alat transportasi air seperti *speedboat* dengan waktu tempuh  $\pm 15-20$  menit. Pantai Solop menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat kabupaten Indragiri Hilir untuk datang berkunjung ke Kecamatan Mandah. Nilai interaksi tertinggi antara Kecamatan Mandah terhadap wilayah hinterlandnya terjadi pada Kecamatan Kateman yakni sebesar 823.071, dan nilai interaksi terendah terjadi pada Kecamatan Sungai Batang yaitu sebesar 21.026.



Sumber : <http://KualaTerapung.Blogspot.com>

**Gambar 5.7. Objek Wisata Pantai Solop Kecamatan Mandah**

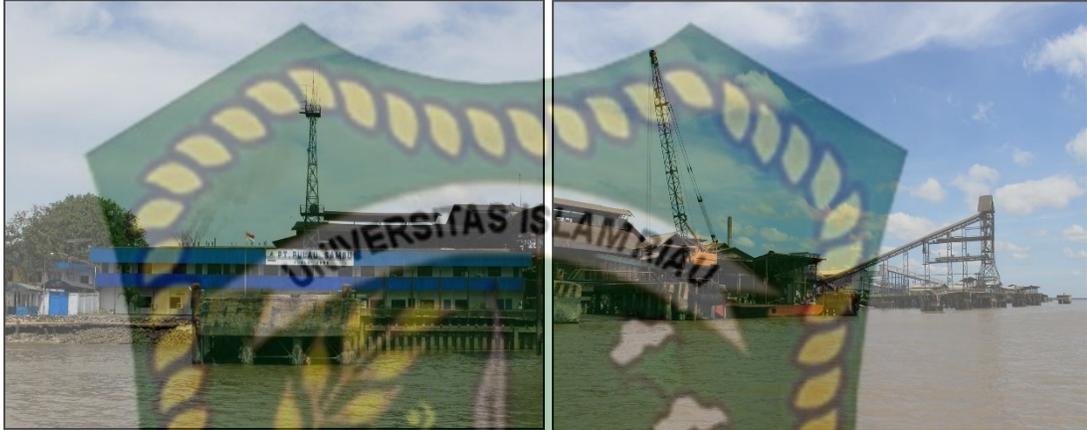
## PERINGKAT INTERAKSI IV : Kecamatan Tanah Merah

Kecamatan Tanah Merah merupakan kecamatan pusat pertumbuhan dengan nilai kekuatan interaksi terendah dibandingkan kecamatan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum kondisi geografis Kecamatan Tanah Merah cukup strategis, hal ini ditandai dengan dibangunnya salah satu pelabuhan bongkar muat terbesar di kabupaten Indragiri Hilir yakni pelabuhan Samudera dengan skala pelayanan internasional.

Kecamatan Tanah Merah juga dikenal sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, dimana hasil lautnya cukup melimpah untuk melayani kebutuhan masyarakat diwilayahnya maupun diluar wilayahnya seperti untuk dijual ke kota Batam dan Tanjung Pinang provinsi kepulauan Riau. Dengan kondisi masyarakat wilayahnya yang mayoritas sebagai nelayan, untuk menarik masyarakat luar agar datang ke wilayahnya, Kecamatan Tanah Merah rutin menggelar festival yang diberi nama “*Menongkah Kerang*” sebagai destinasi wisata tahunan.

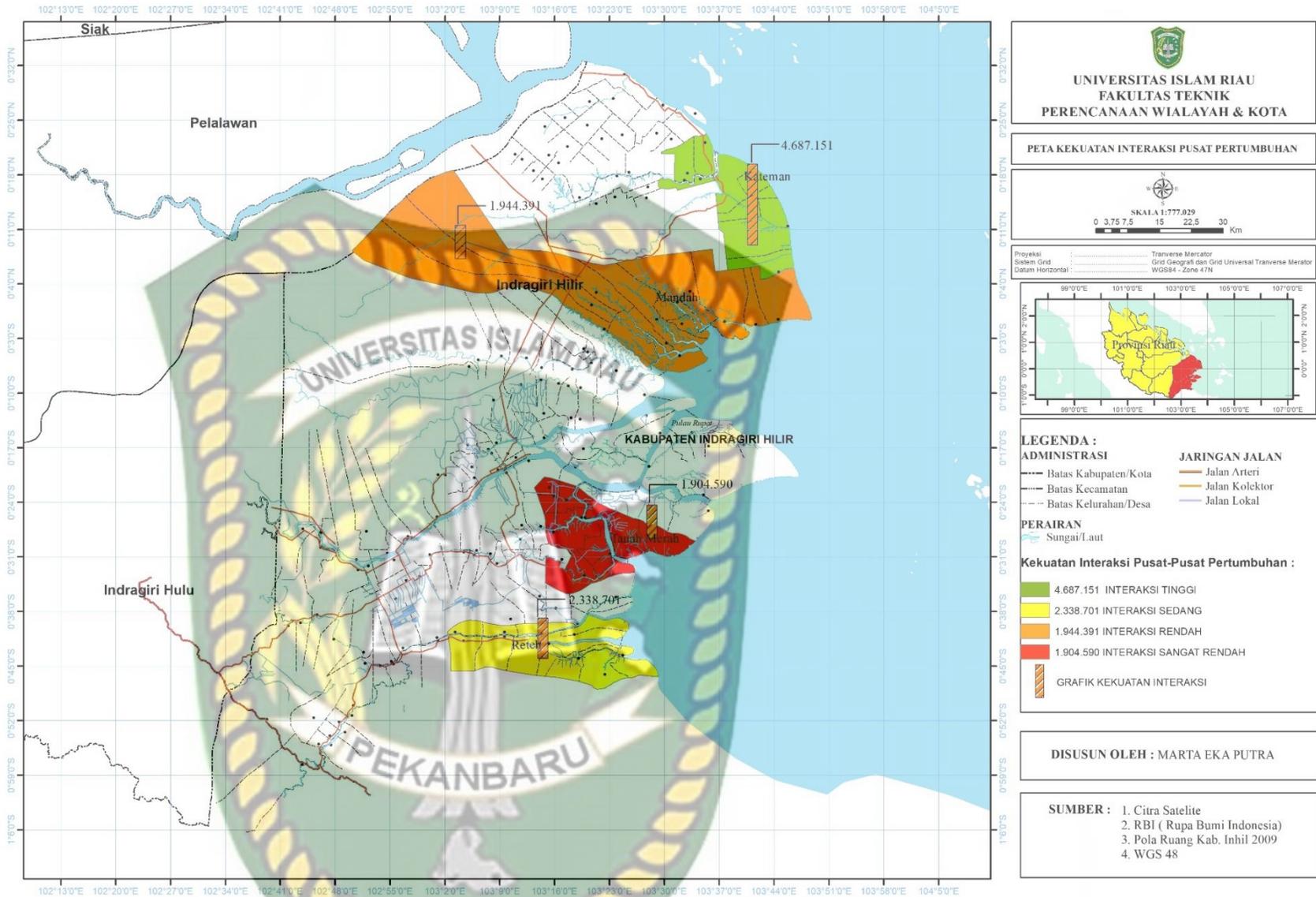
Selain itu, daya tarik lainnya dari Kecamatan Tanah Merah adalah dengan adanya industri pengolahan kelapa yang merupakan cabang dari PT.Pulau Sambu di Kecamatan Kateman. Dengan adanya industri ini menarik mobilitas penduduk untuk datang kewilayah Kecamatan Tanah Merah, seperti untuk kepentingan pekerjaan, bongkar muat barang, jasa angkutan sungai, dan lain-lain.

Nilai interaksi tertinggi antara Kecamatan Tanah Merah terhadap wilayah hinterlandnya terjadi pada Kecamatan Reth yang sebesar 831.102, dan nilai interaksi terendah terjadi pada Kecamatan Pulau Burung yaitu sebesar 21.682.



Sumber : Survei Lapangan, 2019

**Gambar 5.8. Industri Pengolahan Kelapa di Kecamatan Tanah Merah**



GAMBAR 5.9 PETA KEKUATAN INTERAKSI PUSAT PERTUMBUHAN

### 5.2.2. Analisis Titik Henti (*Break Point*)

Analisis titik henti dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui batas pengaruh dari masing-masing pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir terhadap wilayah *hinterland*-nya. Pada analisis gravitasi sebelumnya diketahui bahwa masing-masing pusat pertumbuhan tidak hanya berinteraksi dengan wilayah *hinterland*-nya saja, tetapi juga antar pusat pertumbuhan, dimana wilayah pusat pertumbuhan dengan hirarki yang lebih tinggi saling berinteraksi terhadap wilayah pusat pertumbuhan dengan hirarki yang lebih rendah dibawahnya, begitu pula sebaliknya. Jika dua pusat pertumbuhan saling berinteraksi maka salah satu diantaranya memiliki pengaruh yang lebih kuat, Oleh karena itu analisis titik henti ini juga digunakan untuk mengetahui batas pengaruh dari masing-masing pusat pertumbuhan yang ada tersebut. Dengan demikian akan diketahui pusat pertumbuhan manakah yang memiliki batas pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan pusat pertumbuhan lainnya.

Pengaruh suatu wilayah ditentukan oleh besar kecilnya bobot atau daya tarik wilayah, tingkatan (hirarki), dan jarak. Oleh karena itu, sebagai daya Tarik wilayah dalam penelitian ini analisis titik henti menggunakan dua variabel utama yaitu variabel jarak antar masing-masing wilayah dan variabel jumlah penduduk masing-masing wilayah yang berbeda jumlah dan komposisinya. Batas pengaruh suatu wilayah diukur dari wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih rendah. Rumus dan perhitungan nilai batas pengaruh menggunakan analisis titik henti ini dapat dilihat pada Lampiran 12.

Hasil analisis batas pengaruh masing-masing wilayah pusat pertumbuhan terhadap wilayah *hinterland*-nya adalah sebagai berikut :

### 1. Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman

Berdasarkan hasil analisis titik henti untuk mengetahui batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan Kecamatan kateman terhadap wilayah *hinterland*-nya dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut :

**Tabel 5.7. Nilai Titik Henti (*Break Point*) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman Terhadap Wilayah *Hinterland*-nya**

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan <i>Hinterland</i>	Pz	Py	Pz/Py	$1 + \sqrt{Pz / Py}$	d	BP (km)
1	Kateman	Tanah Merah	48.051	32.147	1,49	2,22	165	74,32
		Mandah	48.051	41.127	1,17	2,08	49	23,56
		Reteh	48.051	45.605	1,05	2,02	206	101,98
		Concong	48.051	13.988	3,43	2,85	88	30,88
		Pulau Burung	48.051	23.084	2,08	2,44	18	7,38
		Gaung Anak Serka	48.051	22.977	2,09	2,44	111	45,49
		Kuala Indragiri	48.051	20.226	2,37	2,53	83	32,81
		Sungai Batang	48.051	12.763	3,76	2,93	204	69,62

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Keterangan Tabel :

Pz = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar)

Py = Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

Pz / Py = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar) / Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

d = Jarak

Bp = *Break Point* (Nilai Titik Henti/Batas Pengaruh)

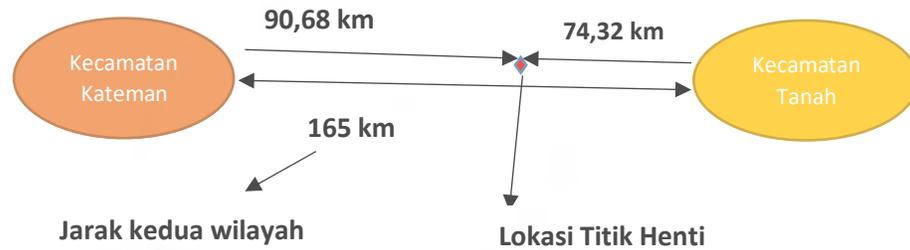
Dari Tabel 5.7. diatas diketahui titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap wilayah *hinterland*-nya adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kateman —————> Kecamatan Tanah Merah

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Tanah Merah adalah 74,32 km dihitung dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 165 km dengan nilai titik henti yaitu 74,32 km, maka hasil yang didapatkan adalah 90,68 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Tanah Merah adalah 74,32 km bila diukur dari Kecamatan Tanah Merah, dan 90,68 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Tanah Merah :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.10. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Tanah Merah**

Berdasarkan Gambar 5.10 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Tanah Merah, yakni 90,68 km dari Kecamatan Kateman dan 74,32 km dari Kecamatan Tanah Merah. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang tinggi dibandingkan Kecamatan Tanah Merah. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

b. Kecamatan Kateman → Kecamatan Mandah

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Mandah adalah 23,56 km dihitung dari kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 49 km dengan nilai titik henti yaitu 23,56 km, maka hasil yang didapatkan adalah 25,44 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Mandah adalah 23,56 km bila diukur dari Kecamatan Mandah, dan 25,44 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ini ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Mandah :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.11. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Mandah**

Berdasarkan Gambar 5.11 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Mandah, yakni 25,44 km dari Kecamatan Kateman dan 23,56 km

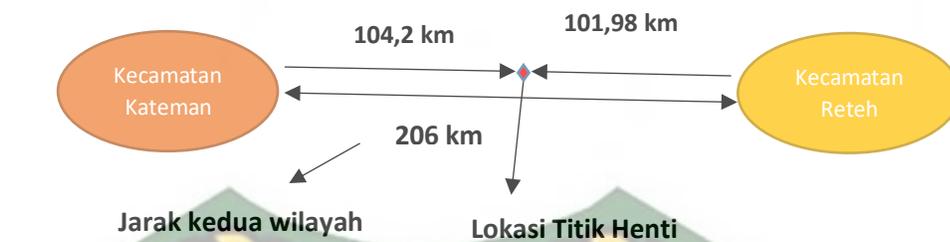
dari Kecamatan Mandah. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Mandah. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

c. Kecamatan Kateman —————> Kecamatan Reteh

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Reteh adalah 101,98 km dihitung dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 206 km dengan nilai titik henti yaitu 101,98 km, maka hasil yang didapatkan adalah 104,2 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Reteh adalah 101,98 km bila diukur dari Kecamatan Reteh, dan 104,2 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Reteh :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.12. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Reteh**

Berdasarkan Gambar 5.12 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Reteh, yakni 104,2 km dari Kecamatan Kateman dan 101,98 km dari Kecamatan Reteh. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Reteh. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

d. Kecamatan Kateman → Kecamatan Concong

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Reteh adalah 30,88 km dihitung dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 88 km dengan nilai titik henti yaitu 30,88 km, maka hasil yang didapatkan adalah 57,12 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Concong adalah 30,88 km bila diukur dari Kecamatan Concong, dan 57,12 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ini ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Concong :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.13. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Concong**

Berdasarkan Gambar 5.13 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Concong, yakni 57,12 km dari Kecamatan Kateman dan 30,88

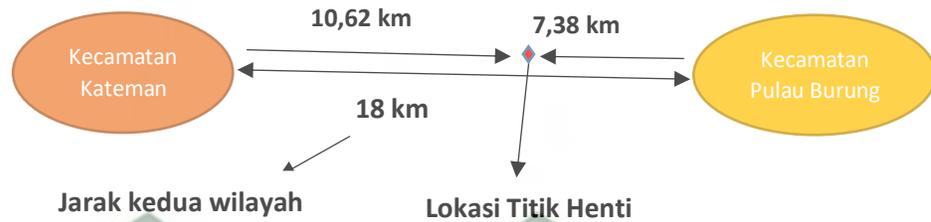
km dari Kecamatan Concong. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Concong. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

e. Kecamatan Kateman —————> Kecamatan Pulau Burung

Berdasarkan Tabel 5.7, dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Pulau Burung adalah 7,38 km dihitung dari kecamatan Pulau Burung dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 18 km dengan nilai titik henti yaitu 7,38 km, maka hasil yang didapatkan adalah 10,62 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Pulau Burung adalah 7,38 km bila diukur dari Kecamatan Pulau Burung, dan 10,62 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Pulau Burung :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.14. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Pulau Burung**

Berdasarkan Gambar 5.14 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Pulau Burung, yakni 10,62 km dari Kecamatan Kateman dan 7,38 km dari Kecamatan Pulau Burung. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Pulau burung. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

f. Kecamatan Kateman —————> Kecamatan Gaung Anak Serka

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka adalah 45,49 km dihitung dari kecamatan Gaung Anak Serka dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 111 km dengan nilai titik henti yaitu 45,49 km, maka hasil yang didapatkan adalah 65,51 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Gaung Anak Serka adalah 45,49 km bila diukur dari Kecamatan Gaung Anak Serka, dan 65,51 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.15. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Gaung Anak Serka**

Berdasarkan Gambar 5.15 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Gaung Anak Serka, yakni 65,51 km dari Kecamatan Kateman dan 45,49 km dari Kecamatan Gaung Anak Serka. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi

dibandingkan Kecamatan Gaung Anak Serka. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

g. Kecamatan Kateman —————▶ Kecamatan Kuala Indragiri

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Kuala Indragiri adalah 32,81 km dihitung dari kecamatan Kuala Indragiri dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 83 km dengan nilai titik henti yaitu 32,81 km, maka hasil yang didapatkan adalah 50,19 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Kuala Indragiri adalah 32,81 km bila diukur dari Kecamatan Kuala Indragiri, dan 50,19 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Kuala Indragiri :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.16. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Kuala Indragiri**

Berdasarkan Gambar 5.16 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Kuala Indragiri, yakni 50,19 km dari Kecamatan Kateman dan 32,81 km dari Kecamatan Kuala Indragiri. Hal ini dipengaruhi oleh kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Kuala Indragiri. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

h. Kecamatan Kateman —————> Kecamatan Sungai Batang

Berdasarkan Tabel 5.7. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Sungai Batang adalah 69,62 km dihitung dari kecamatan Sungai Batang dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Apabila nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman maka dapat dilakukan dengan cara mengurangi jarak antara kedua wilayah yaitu 204 km dengan nilai titik henti yaitu 69,62 km, maka hasil yang didapatkan adalah 134,38 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian nilai titik henti antara Kecamatan Kateman dan Kecamatan Sungai Batang adalah 69,62 km bila diukur dari Kecamatan Sungai Batang, dan 134,38 km bila diukur dari Kecamatan Kateman.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Kateman terhadap Kecamatan Sungai Batang :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.17. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman – Kecamatan Sungai Batang**

Berdasarkan Gambar 5.17 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kateman memiliki batas pengaruh yang lebih dominan dari pada Kecamatan Sungai Batang, yakni 134,38 km dari Kecamatan Kateman dan 69,62 km dari Kecamatan Sungai Batang. Hal ini dipengaruhi oleh

kepemilikan jumlah penduduk Kecamatan Kateman yang lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Sungai Batang. Kecamatan Kateman juga merupakan pusat pertumbuhan utama berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall.

## 2. Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah

Berdasarkan hasil analisis titik henti untuk mengetahui batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap wilayah *hinterland*-nya dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut :

**Tabel 5.8. Nilai Titik Henti (*Break Point*) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah Terhadap Wilayah *Hinterland*-nya**

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan <i>Hinterland</i>	Pz	Py	Pz/Py	$1+\sqrt{Pz/Py}$	d	BP (km)
1	Tanah Merah	Kateman	48.051	32.147	1,49	2,22	165	74,32
		Mandah	41.127	32.147	1,28	2,13	119	55,87
		Reteh	45.605	32.147	1,41	2,18	42	19,27
		Concong	32.147	13.988	2,30	2,51	68	27,09
		Pulau Burung	32.147	23.084	1,40	2,18	185	84,86
		Gaung Anak Serka	32.147	22.977	1,40	2,18	83	38,07
		Kuala Indragiri	32.147	20.226	1,59	2,26	39	17,26
		Sungai Batang	32.147	12.763	2,51	2,58	39	15,12

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Keterangan Tabel :

Pz = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar)

Py = Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

Pz / Py = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar) / Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

d = Jarak

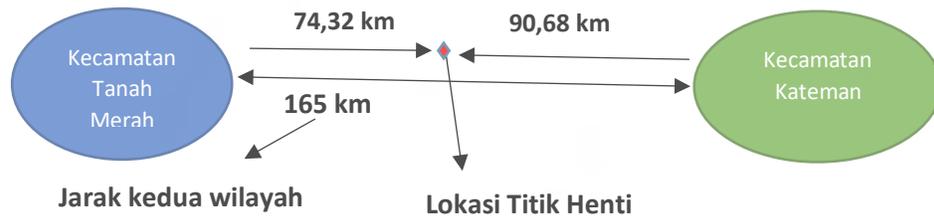
Bp = *Break Point* (Nilai Titik Henti/Batas Pengaruh)

Dari Tabel 5.8. diatas diketahui titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap wilayah *hinterland*-nya sebagai berikut :

a. Kecamatan Tanah Merah —————▶ Kecamatan Kateman

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Kateman adalah 74,32 km dihitung dari kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman. Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 165 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Tanah Merah yakni 74,32 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 90,68 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Kateman lebih di dominasi oleh Kecamatan Kateman dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Kateman :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

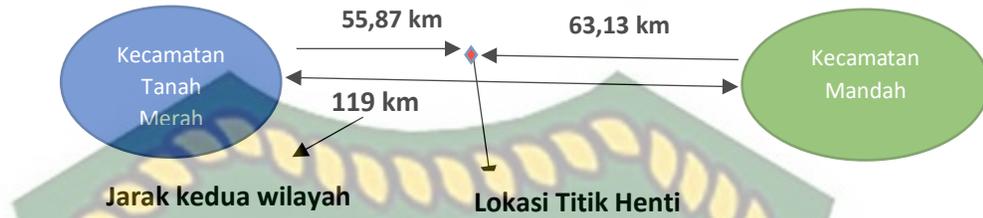
**Gambar 5.18. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Kateman**

b. Kecamatan Tanah Merah → Kecamatan Mandah

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Mandah adalah 55,87 km dihitung dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 119 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Tanah Merah yakni 55,87 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 63,13 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Mandah lebih di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Mandah :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

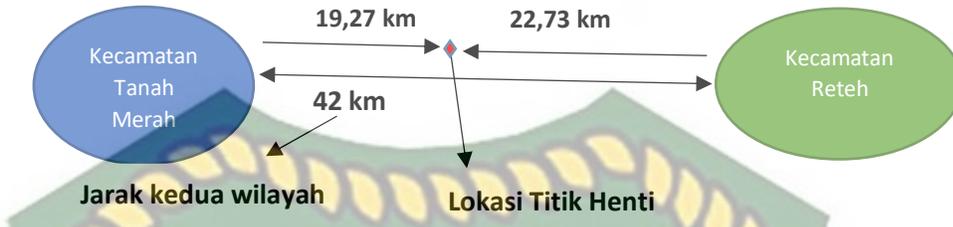
**Gambar 5.19. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Mandah**

c. Kecamatan Tanah Merah —————> Kecamatan Reteh

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Reteh adalah 19,27 km dihitung dari kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 42 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Tanah Merah yakni 19,27 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 22,73 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Reteh lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Reteh :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.20 Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Reteh**

d. Kecamatan Tanah Merah —————> Kecamatan Concong

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Concong adalah 27,09 km dihitung dari Kecamatan Concong dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan kecamatan Tanah Merah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 68 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Concong yakni 27,09 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 40,1 km jika diukur dari Kecamatan Tanah Merah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Concong lebih di

dominasi oleh Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Concong :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.21. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Concong**

e. Kecamatan Tanah Merah —————> Kecamatan Pulau Burung

Berdasarkan Tabel 5.8, dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Pulau Burung adalah 84,86 km dihitung dari kecamatan Pulau Burung dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Tanah Merah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 185 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Pulau Burung yakni 84,86 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 100,14 km jika diukur dari Kecamatan Tanah Merah. Dengan demikian

batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Pulau Burung lebih di dominasi oleh Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Pulau Burung :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.22. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Pulau Burung**

f. Kecamatan Tanah Merah —► Kecamatan Gaung Anak Serka

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka adalah 38,07 km dihitung dari kecamatan Gaung Anak Serka dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Tanah Merah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 83 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Gaung Anak Serka yakni 38,07 km, maka hasil yang di dapatkan

adalah 44,93 km jika diukur dari Kecamatan Tanah Merah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka lebih di dominasi oleh Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut Ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.23. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Gaung Anak Serka**

g. Kecamatan Tanah Merah → Kecamatan Kuala Indragiri

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Kuala Indragiri adalah 17,26 km dihitung dari kecamatan Kuala Indragiri dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Tanah Merah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 39 km dengan nilai titik henti yang diukur dari

Kecamatan Kuala Indragiri yakni 17,26 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 21,74 km jika diukur dari Kecamatan Tanah Merah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Kuala Indragiri lebih di dominasi oleh Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Kuala Indragiri :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.24. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Kuala Indragiri**

h. Kecamatan Tanah Merah → Kecamatan Sungai Batang

Berdasarkan Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Sungai Batang adalah 8,13 km dihitung dari Kecamatan Sungai Batang dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Tanah Merah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 39 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Sungai Batang yakni 15,12 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 23,88 km jika diukur dari Kecamatan Tanah Merah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Tanah Merah Terhadap Kecamatan Sungai Batang lebih di dominasi oleh Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap Kecamatan Sungai Batang :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.25. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah – Kecamatan Sungai Batang**

### 3. Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh

Berdasarkan hasil analisis titik henti untuk mengetahui batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap wilayah *hinterland*-nya dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut :

**Tabel 5.9. Nilai Titik Henti (*Break Point*) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh Terhadap Wilayah *Hinterland*-nya**

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan <i>Hinterland</i>	Pz	Py	Pz/Py	$1+\sqrt{Pz/Py}$	d	BP (km)
1	Reteh	Kateman	48.051	45.605	1,05	2,02	206	101,98
		Tanah Merah	45.605	32.147	1,42	2,19	42	19,18
		Mandah	45.605	41.127	1,11	2,05	160	78,05
		Concong	45.605	13.988	3,26	2,80	108	38,57
		Pulau Burung	45.605	23.084	1,98	2,40	226	94,17
		Gaung Anak Serka	45.605	22.977	1,98	2,40	129	53,75
		Kuala Indragiri	45.605	20.226	2,25	2,50	80	32
		Sungai Batang	45.605	12.763	3,57	2,89	23	7,96

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Keterangan Tabel :

Pz = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar)

Py = Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

Pz / Py = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar) / Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)

d = Jarak

Bp = *Break Point* (Nilai Titik Henti/Batas Pengaruh)

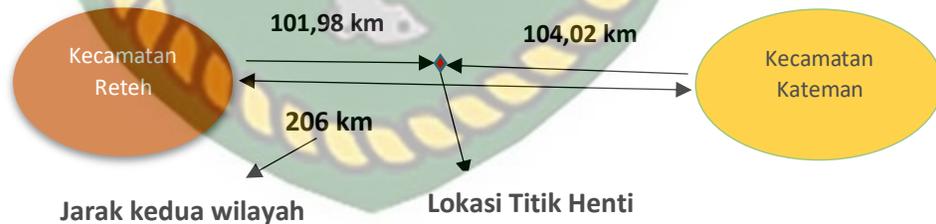
Dari Tabel 5.9. diatas diketahui titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap wilayah *hinterland*-nya sebagai berikut :

a. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Kateman

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Kateman adalah 101,98 km dihitung dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 206 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Reteh yakni 101,98 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 104,02 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Kateman lebih di dominasi oleh Kecamatan Kateman dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Kateman :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.26. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Kateman**

b. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Tanah Merah

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Tanah Merah adalah 19,18 km dihitung dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 42 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Tanah Merah yakni 19,18 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 22,82 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Tanah Merah lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Tanah Merah :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

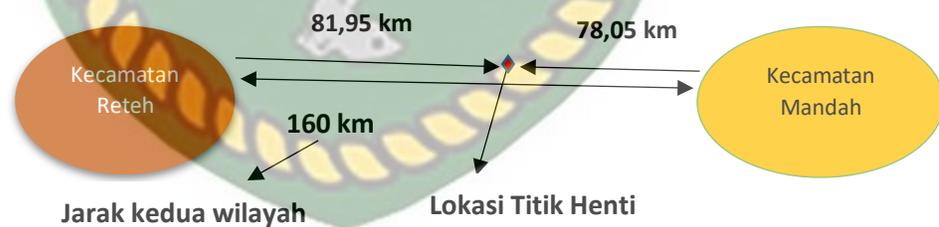
**Gambar 5.27. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Tanah Merah**

c. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Mandah

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Mandah adalah 78,05 km dihitung dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 160 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Mandah yakni 78,05 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 81,95 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Mandah lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Mandah :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

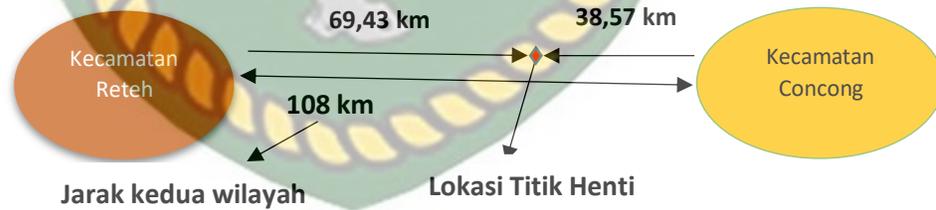
**Gambar 5.28. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Mandah**

d. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Concong

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Concong adalah 38,57 km dihitung dari Kecamatan Concong dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 108 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Mandah yakni 38,57 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 69,43 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Concong lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Concong :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.29. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Concong**

e. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Pulau Burung

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Pulau Burung adalah 94,17 km dihitung dari Kecamatan Pulau Burung dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 226 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Pulau Burung yakni 94,17 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 131,83 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Pulau Burung lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Pulau Burung :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.30. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Pulau Burung**

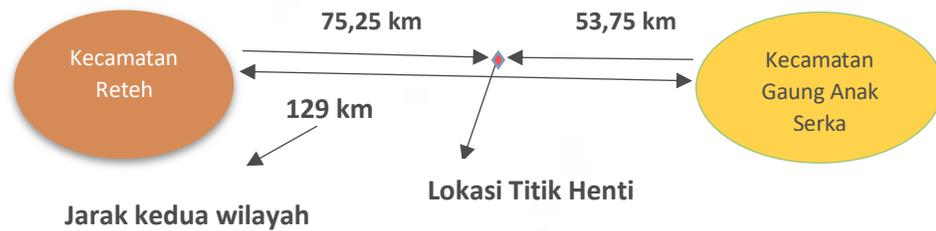
f. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Gaung Anak Serka

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka adalah 53,75 km dihitung dari Kecamatan Gaung Anak Serka dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 129 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Gaung Anak Serka yakni 53,75 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 75,25 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka :





Sumber : Hasil Analisis, 2019

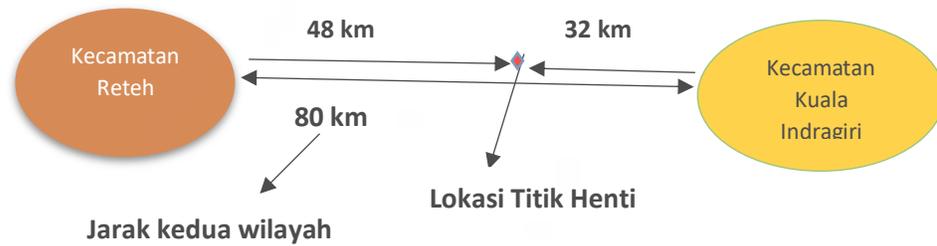
**Gambar 5.31. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Gaung Anak Serka**

g. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Kuala Indragiri

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Kuala Indragiri adalah 32 km dihitung dari Kecamatan Kuala Indragiri dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 80 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Kuala Indragiri yakni 32 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 48 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Kuala Indragiri lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Kuala Indragiri :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

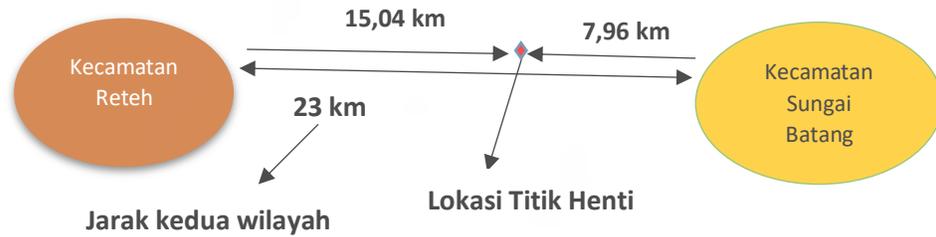
**Gambar 5.32. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Kuala Indragiri**

h. Kecamatan Reteh —————> Kecamatan Sungai Batang

Berdasarkan Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Sungai Batang adalah 7,96 km dihitung dari Kecamatan Sungai Batang dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 23 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Sungai Batang yakni 7,96 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 15,04 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Reteh Terhadap Kecamatan Sungai Batang lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Reteh terhadap Kecamatan Sungai Batang :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.33. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Reteh – Kecamatan Sungai Batang**

#### 4. Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah

Berdasarkan hasil analisis titik henti untuk mengetahui batas pengaruh wilayah pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap wilayah *hinterland*-nya dapat dilihat pada Tabel 5.10. berikut :

**Tabel 5.10. Nilai Titik Henti (*Break Point*) Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah Terhadap Wilayah *Hinterland*-nya**

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan <i>Hinterland</i>	Pz	Py	Pz/Py	$1 + \sqrt{Pz / Py}$	d	BP (km)
1	Mandah	Kateman	48.051	41.127	1,17	2,08	49	23,56
		Tanah Merah	41.127	32.147	1,28	2,13	119	55,87
		Reteh	45.605	41.127	1,10	2,04	160	78,43
		Concong	41.127	13.988	2,94	2,71	40	14,76
		Pulau Burung	41.127	23.084	1,78	2,33	69	29,61
		Gaung Anak Serka	41.127	22.977	1,79	2,33	61	26,18
		Kuala Indragiri	41.127	20.226	2,03	2,42	83	34,30
		Sungai Batang	41.127	12.763	3,22	2,82	158	56,03

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Keterangan Tabel :

- Pz = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar)  
Py = Daya Tarik Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)  
Pz / Py = Daya Tarik Wilayah Z (Penduduk kota yang lebih besar) / Daya Tarik  
Wilayah Y (Penduduk kota yang lebih kecil)  
d = Jarak  
Bp = *Break Point* (Nilai Titik Henti/Batas Pengaruh)

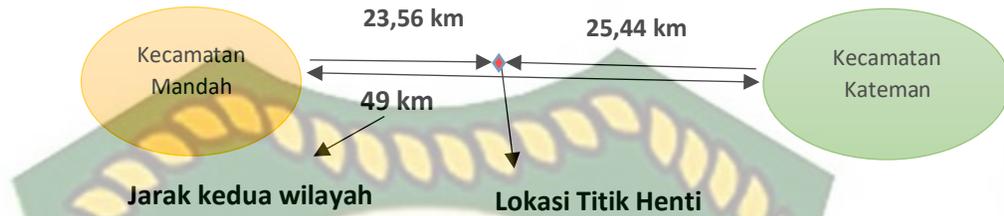
Dari Tabel 5.10. diatas diketahui titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Tanah Merah terhadap wilayah *hinterland*-nya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Mandah → Kecamatan Kateman

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Kateman adalah 23,56 km dihitung dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Kateman.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Kateman dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 49 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Mandah yakni 23,56 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 25,44 km jika diukur dari Kecamatan Kateman. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Kateman lebih di dominasi oleh Kecamatan Kateman dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Kateman :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.34. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Kateman**

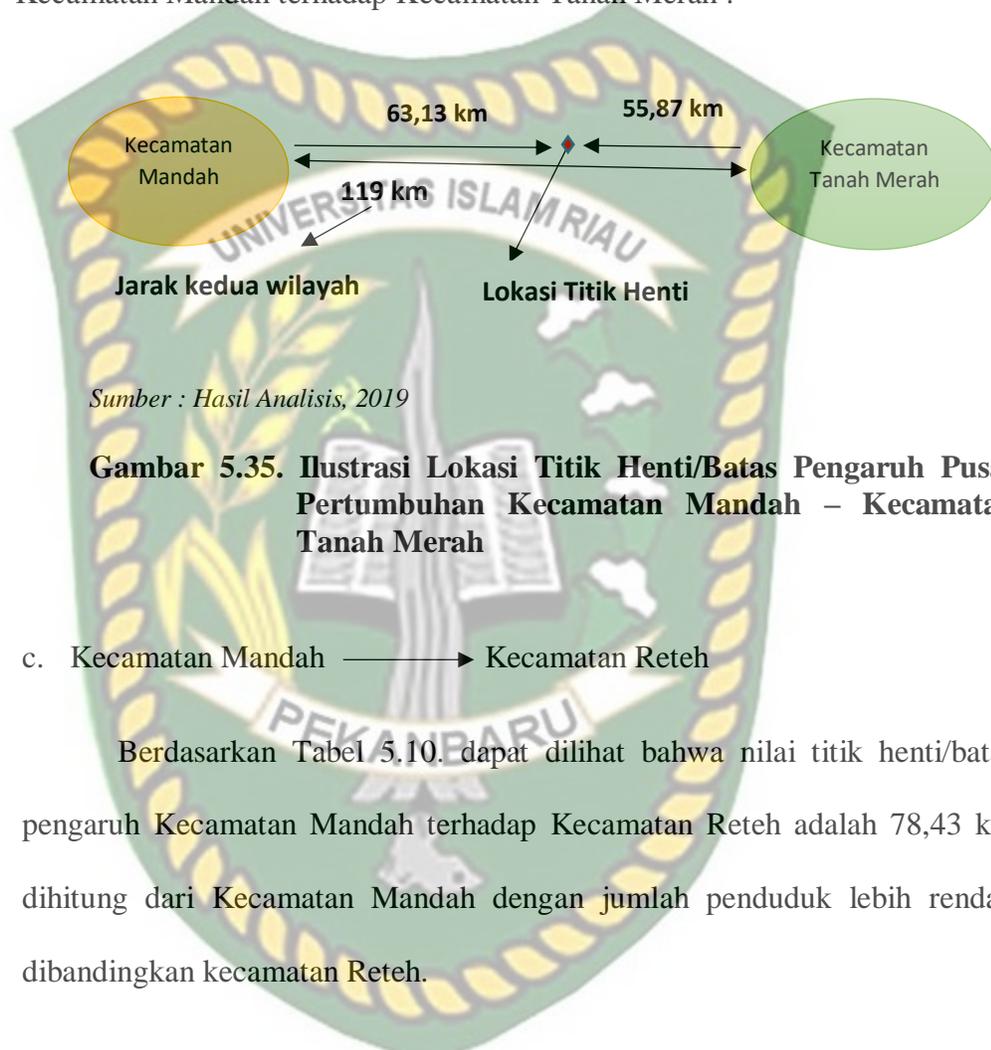
b. Kecamatan Mandah → Kecamatan Tanah Merah

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Tanah Merah adalah 55,87 km dihitung dari Kecamatan Tanah Merah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 119 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Tanah Merah yakni 55,87 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 63,13 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Tanah Merah lebih

di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Tanah Merah :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.35. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Tanah Merah**

c. Kecamatan Mandah —————> Kecamatan Reteh

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Reteh adalah 78,43 km dihitung dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan kecamatan Reteh.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 160 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Mandah yakni 78,43 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 81,57 km jika diukur dari Kecamatan Reteh. Dengan demikian batas pengaruh

antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Reteh lebih di dominasi oleh Kecamatan Reteh dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Reteh :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.36. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Reteh**

d. Kecamatan Mandah —————> Kecamatan Concong

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Concong adalah 14,76 km dihitung dari Kecamatan Concong dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 40 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Concong yakni 14,76 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 25,24 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas

pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Concong lebih di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Concong :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.37. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Concong**

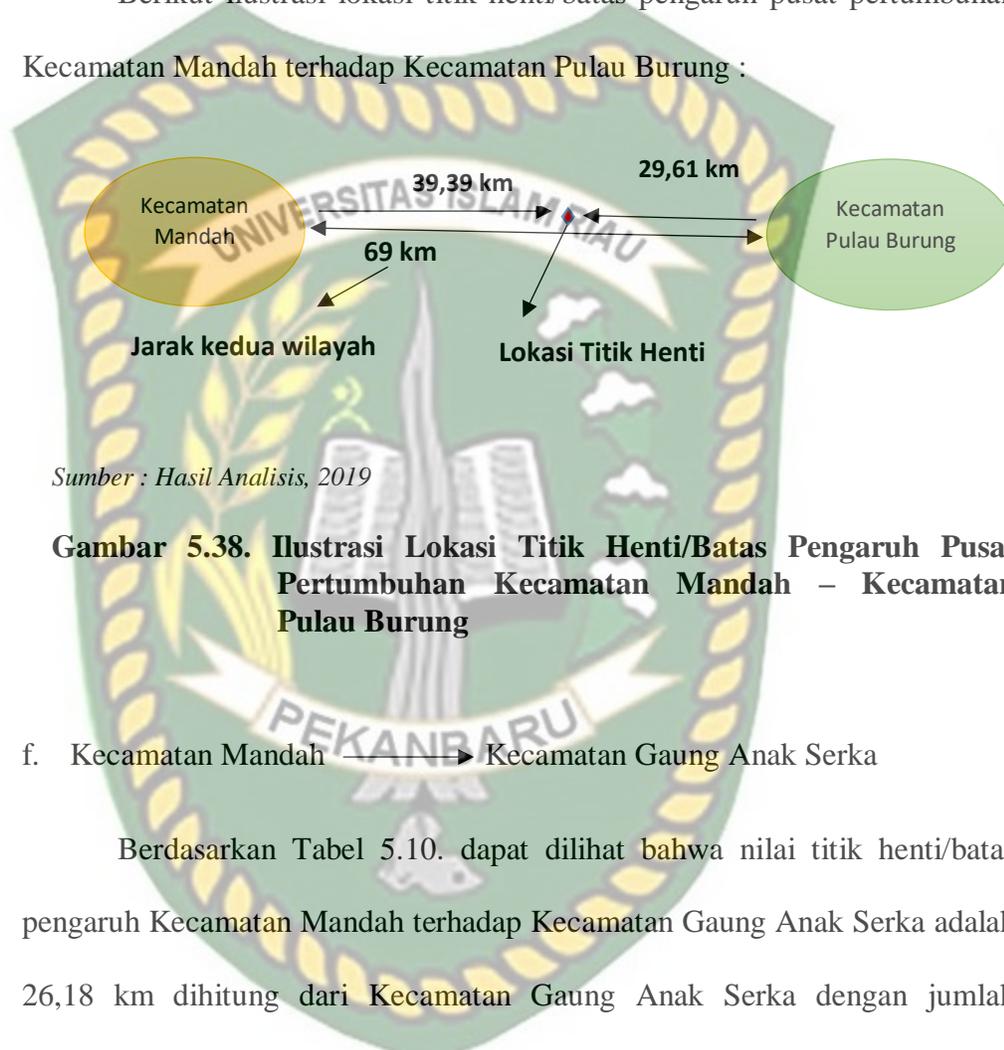
e. Kecamatan Mandah —————> Kecamatan Pulau Burung

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Pulau Burung adalah 29,61 km dihitung dari Kecamatan Pulau Burung dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 69 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Pulau Burung yakni 29,61 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 39,39 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas

pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Pulau Burung lebih di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Pulau Burung :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.38. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Pulau Burung**

f. Kecamatan Mandah → Kecamatan Gaung Anak Serka

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka adalah 26,18 km dihitung dari Kecamatan Gaung Anak Serka dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 61 km dengan nilai titik henti yang diukur

dari Kecamatan Gaung Anak Serka yakni 26,18 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 34,82 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka lebih di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Gaung Anak Serka :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.39. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Gaung Anak Serka**

g. Kecamatan Mandah → Kecamatan Kuala Indragiri

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Kuala Indragiri adalah 34,30 km dihitung dari Kecamatan Kuala Indragiri dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 83 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Kuala Indragiri yakni 34,30 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 48,18 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Kuala Indragiri lebih di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Kuala Indragiri :



Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.40. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Kuala Indragiri**

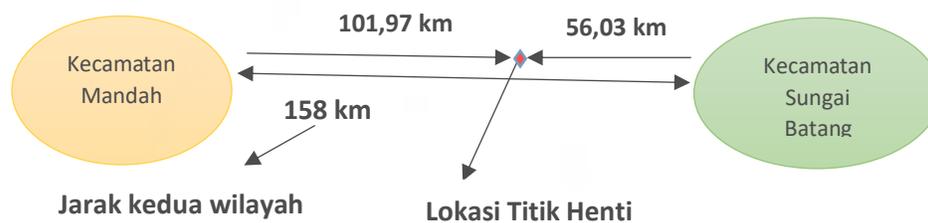
h. Kecamatan Mandah —————> Kecamatan Sungai Batang

Berdasarkan Tabel 5.10. dapat dilihat bahwa nilai titik henti/batas pengaruh Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Sungai Batang adalah 56,03 km dihitung dari Kecamatan Sungai Batang dengan jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan Kecamatan Mandah.

Jika nilai titik henti diukur dari Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi maka dapat dilakukan dengan mengurangi nilai jarak antara kedua wilayah yaitu 158 km dengan nilai titik henti yang diukur dari Kecamatan Sungai Batang yakni 56,03 km, maka hasil yang di dapatkan adalah 101,97 km jika diukur dari Kecamatan Mandah. Dengan demikian batas pengaruh antara Kecamatan Mandah Terhadap Kecamatan Sungai Batang lebih di dominasi oleh Kecamatan Mandah dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi.

Berikut ilustrasi lokasi titik henti/batas pengaruh pusat pertumbuhan Kecamatan Mandah terhadap Kecamatan Sungai Batang :





Sumber : Hasil Analisis, 2019

**Gambar 5.41. Ilustrasi Lokasi Titik Henti/Batas Pengaruh Pusat Pertumbuhan Kecamatan Mandah – Kecamatan Sungai Batang**

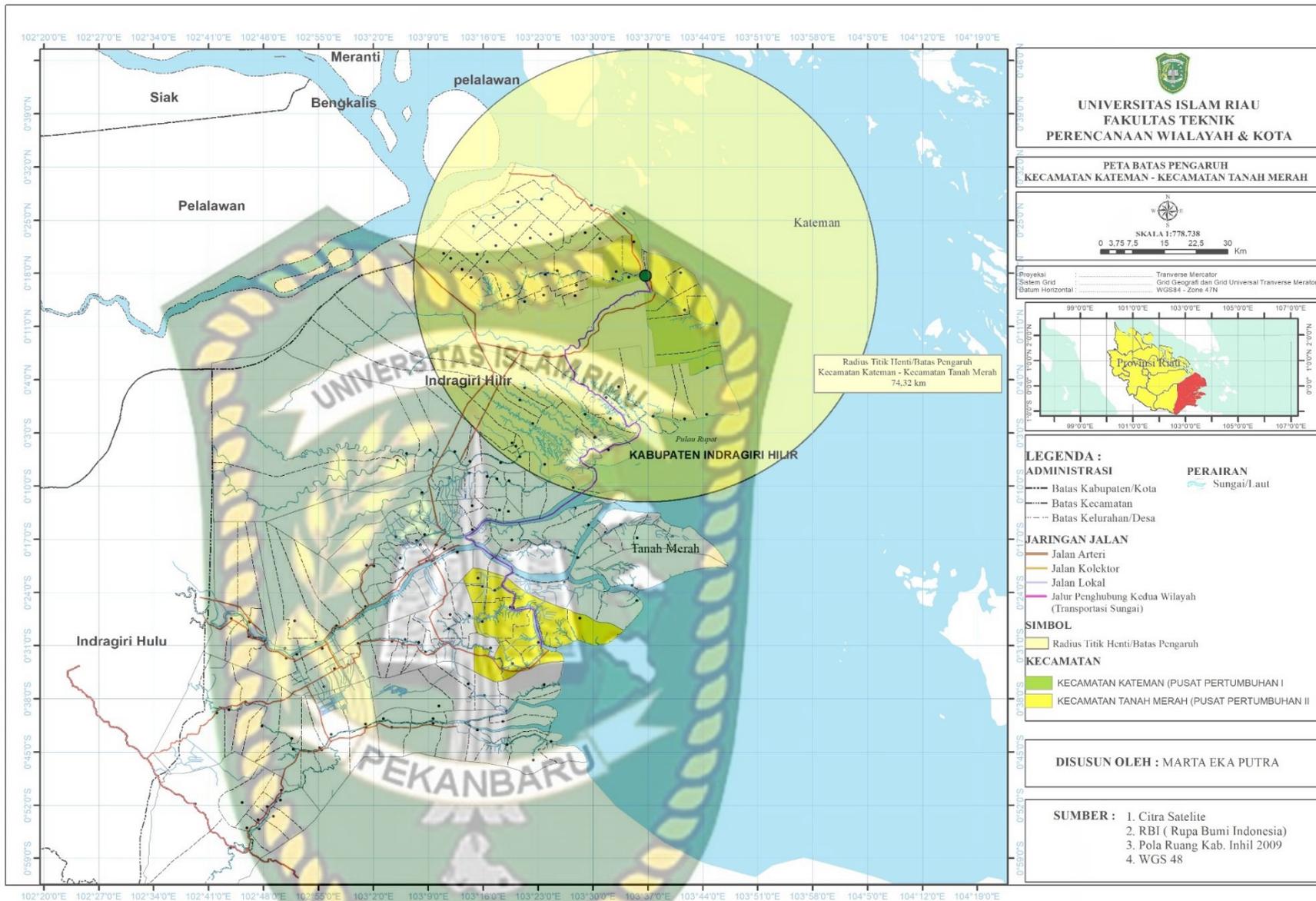
Berdasarkan penjelasan batas pengaruh dari masing-masing pusat pertumbuhan terhadap wilayah hinterlandnya diatas, maka dapat dilihat batas pengaruh atau titik henti dari tiap pusat pertumbuhan ke wilayah hinterlandnya, dimana masing-masing pusat pertumbuhan memiliki batas pengaruh yang berbeda-beda terhadap wilayah hinterlandnya. Batas pengaruh sangat bergantung kepada jumlah penduduk dan jarak tempuh pada masing-masing wilayah. Semakin besar daya tarik suatu wilayah (jumlah penduduk), maka semakin jauh batas pengaruh atau titik hentinya.

Dengan demikian, bila diperhatikan pada hasil analisis, maka diketahui Pusat Pertumbuhan Kecamatan Kateman yang merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar diwilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kecamatan dengan batas pengaruh terluas terhadap wilayah hinterlandnya, kemudian disusul oleh Kecamatan Reteh dengan total jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kecamatan Kateman, selanjutnya Kecamatan Mandah dengan total jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Kecamatan Reteh, dan terakhir adalah Kecamatan Tanah Merah. Gambaran mengenai batas pengaruh dari masing-masing pusat pertumbuhan terhadap

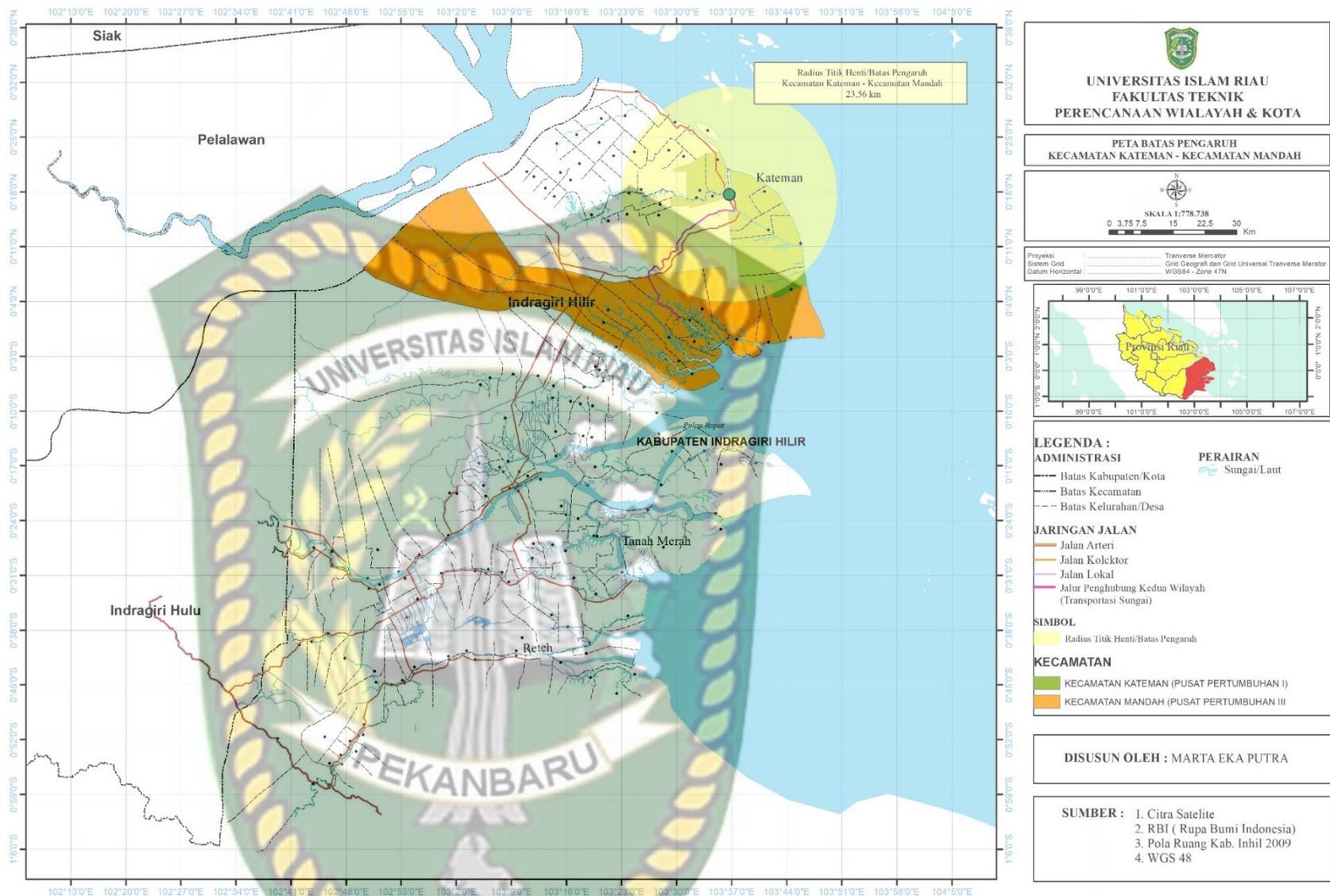
wilayah hinterlandnya dapat dilihat melalui ilustrasi gambar sebagaimana yang telah dijelaskan pada masing-masing pembahasan diatas.

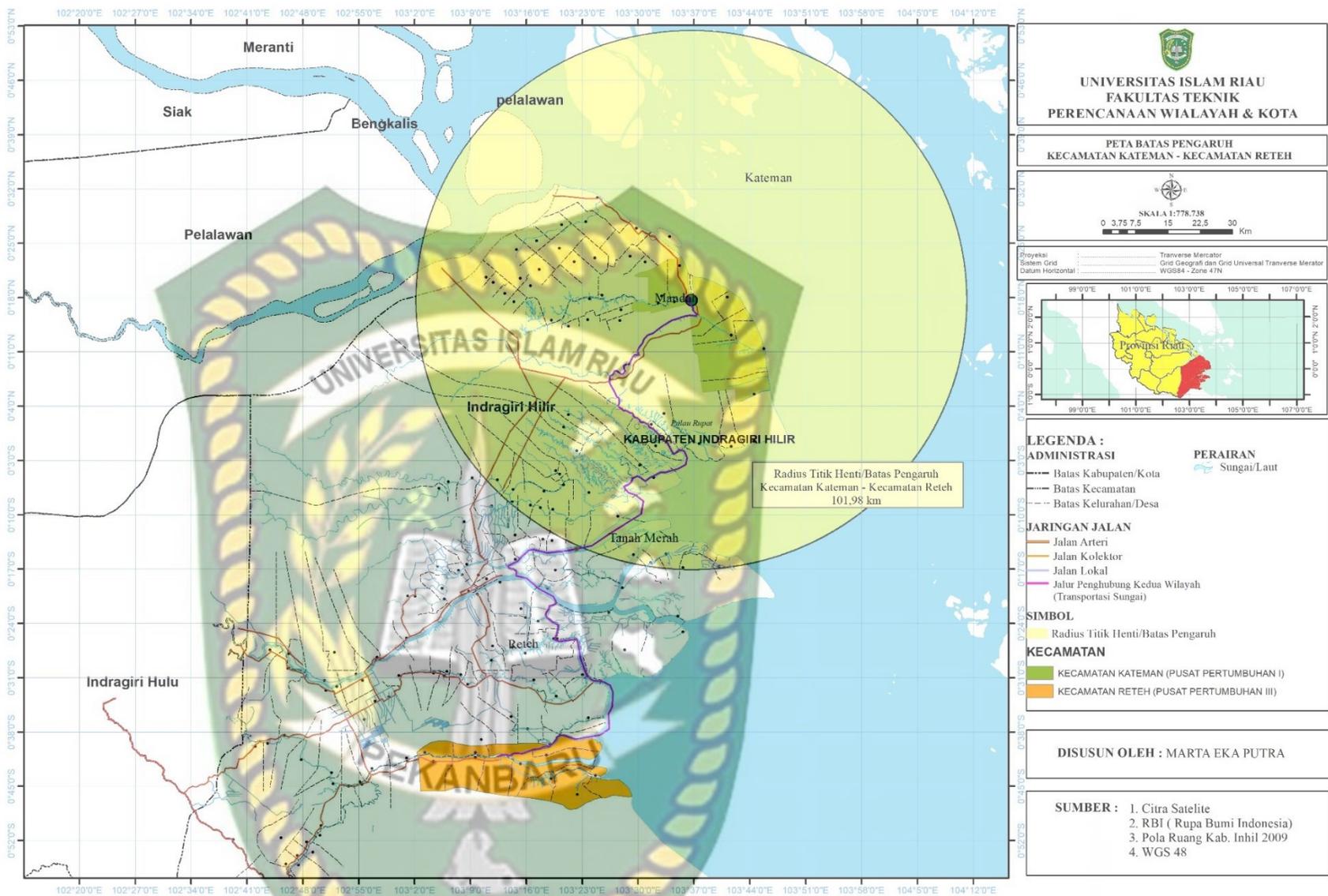
Untuk menginterpretasikan hasil analisis titik henti diatas kedalam sebuah informasi spasial berupa peta maka peneliti memetakan batas pengaruh masing-masing pusat pertumbuhan terhadap pusat pertumbuhan lainnya sebagai berikut :



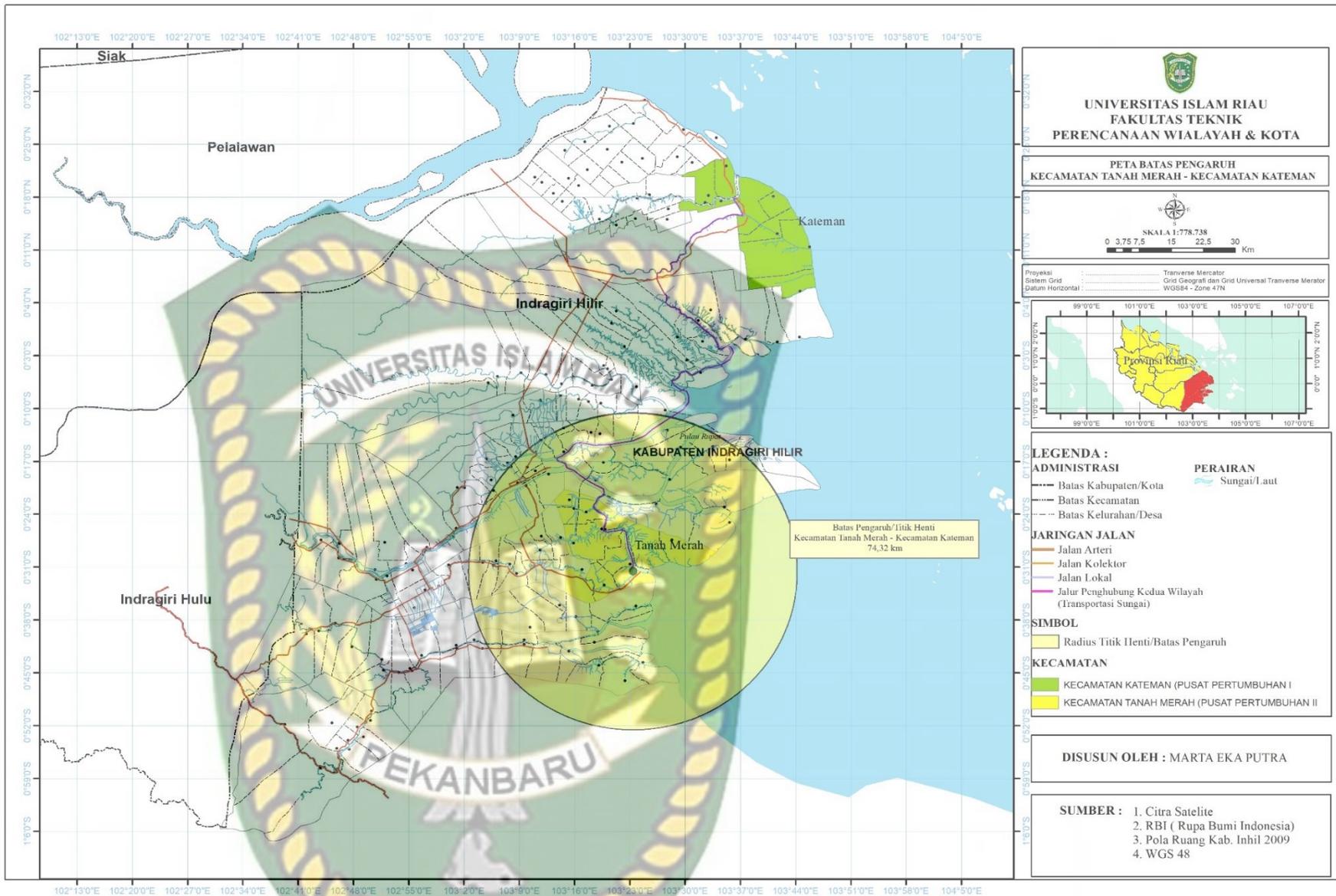


GAMBAR 5.42 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN KATEMAN - KECAMATAN TANAH MERAH

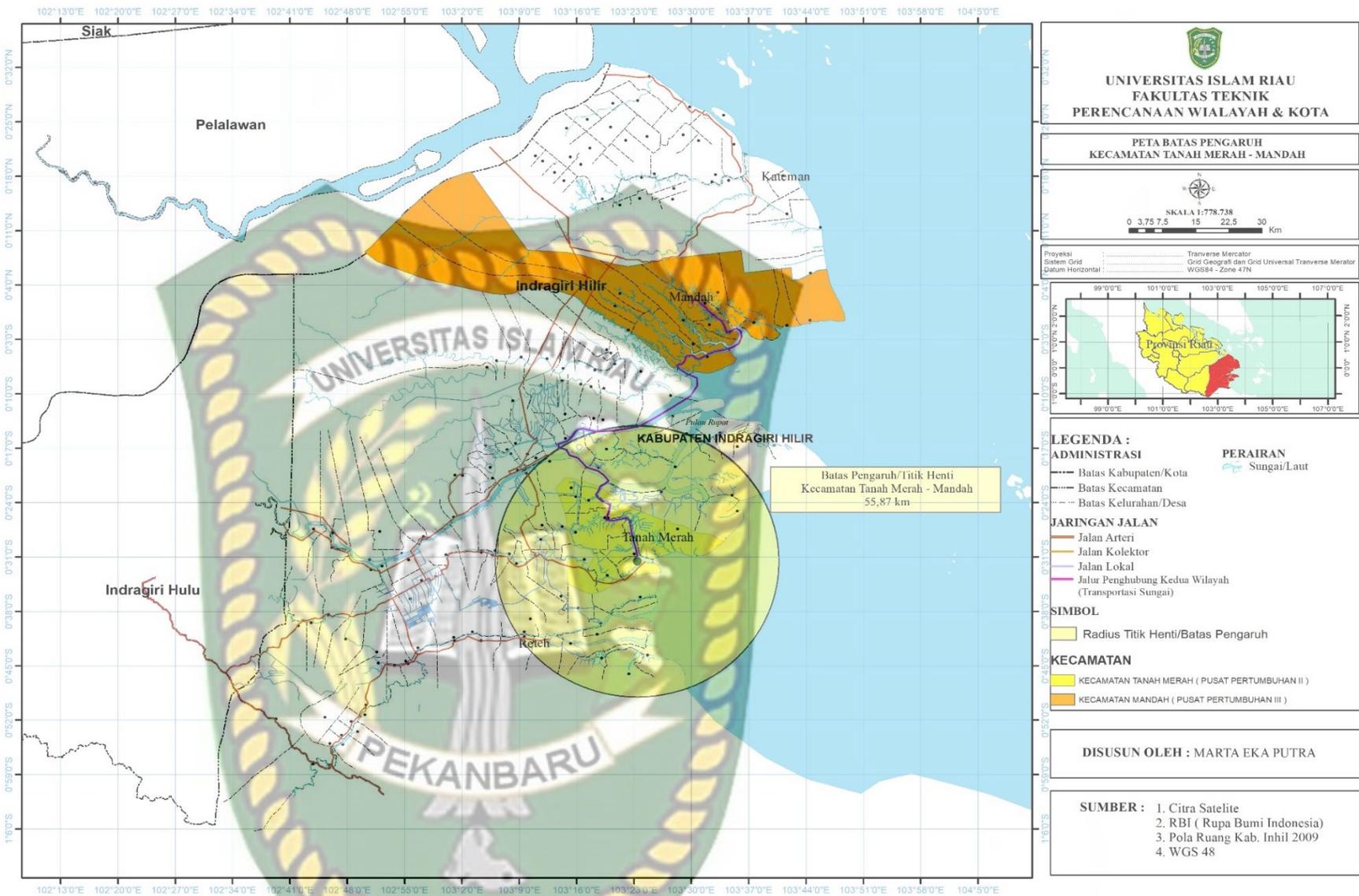


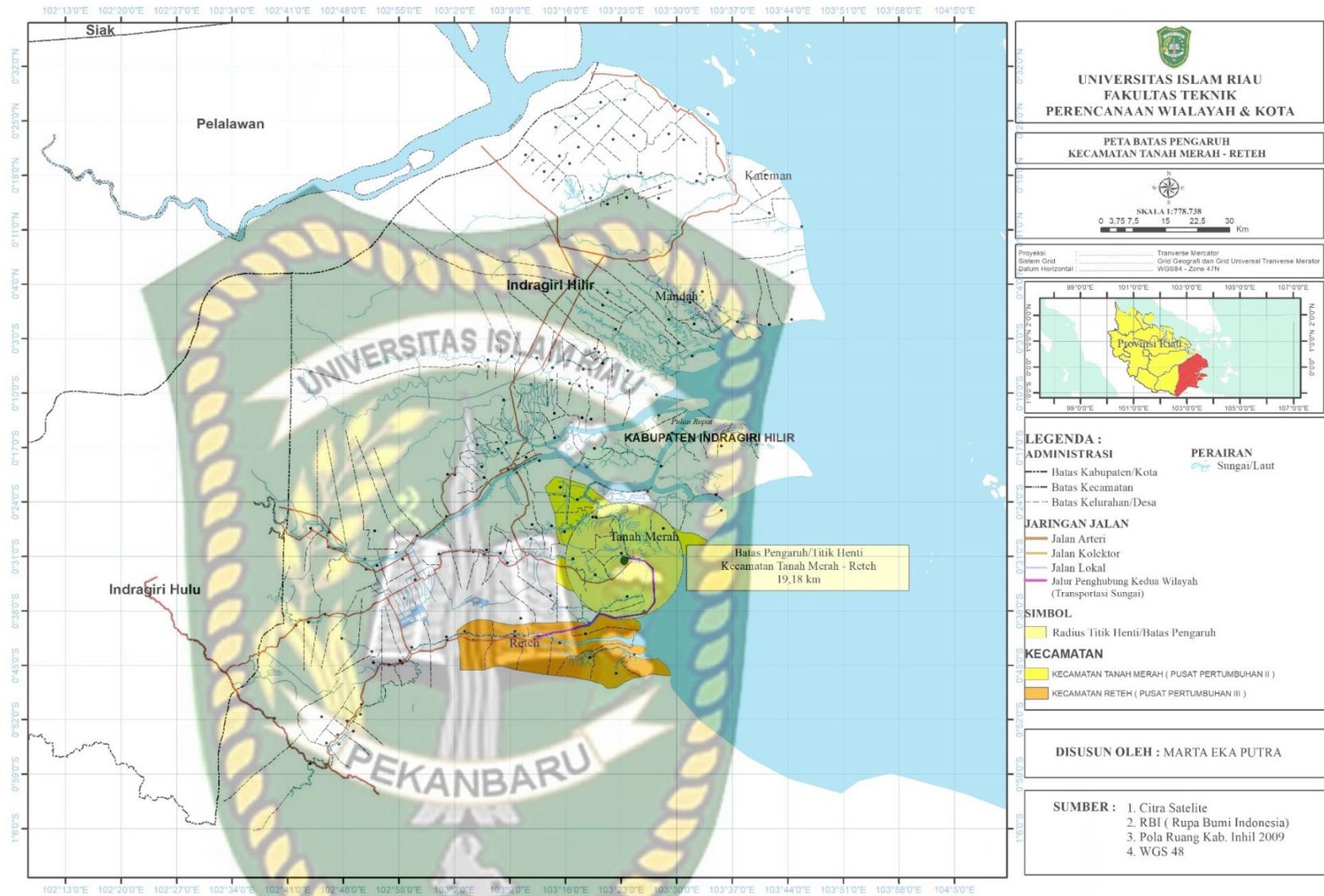


GAMBAR 5.44 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN KATEMAN - KECAMATAN RETEH

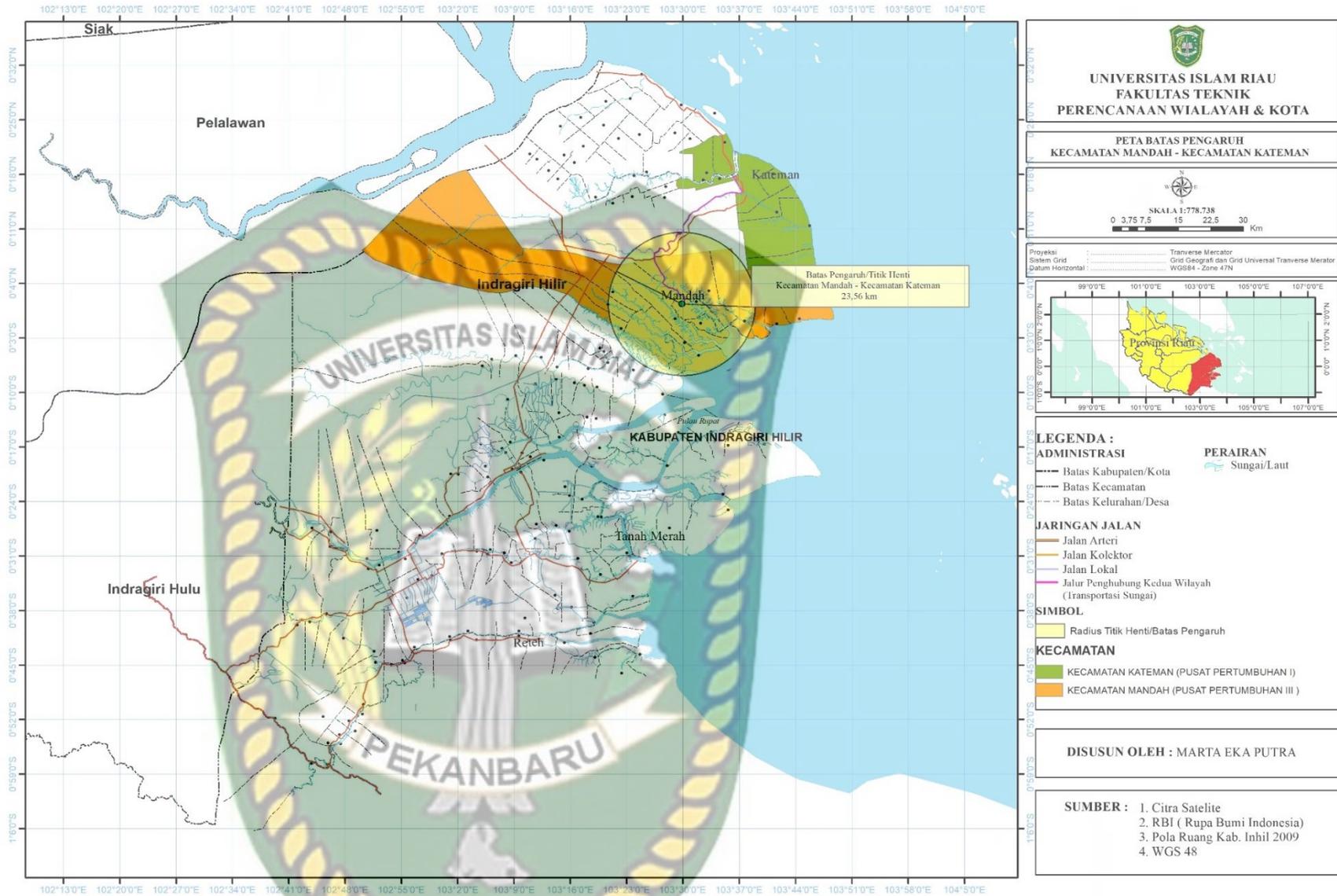


GAMBAR 5.45 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN TANAH MERAH - KECAMATAN KATEMAN

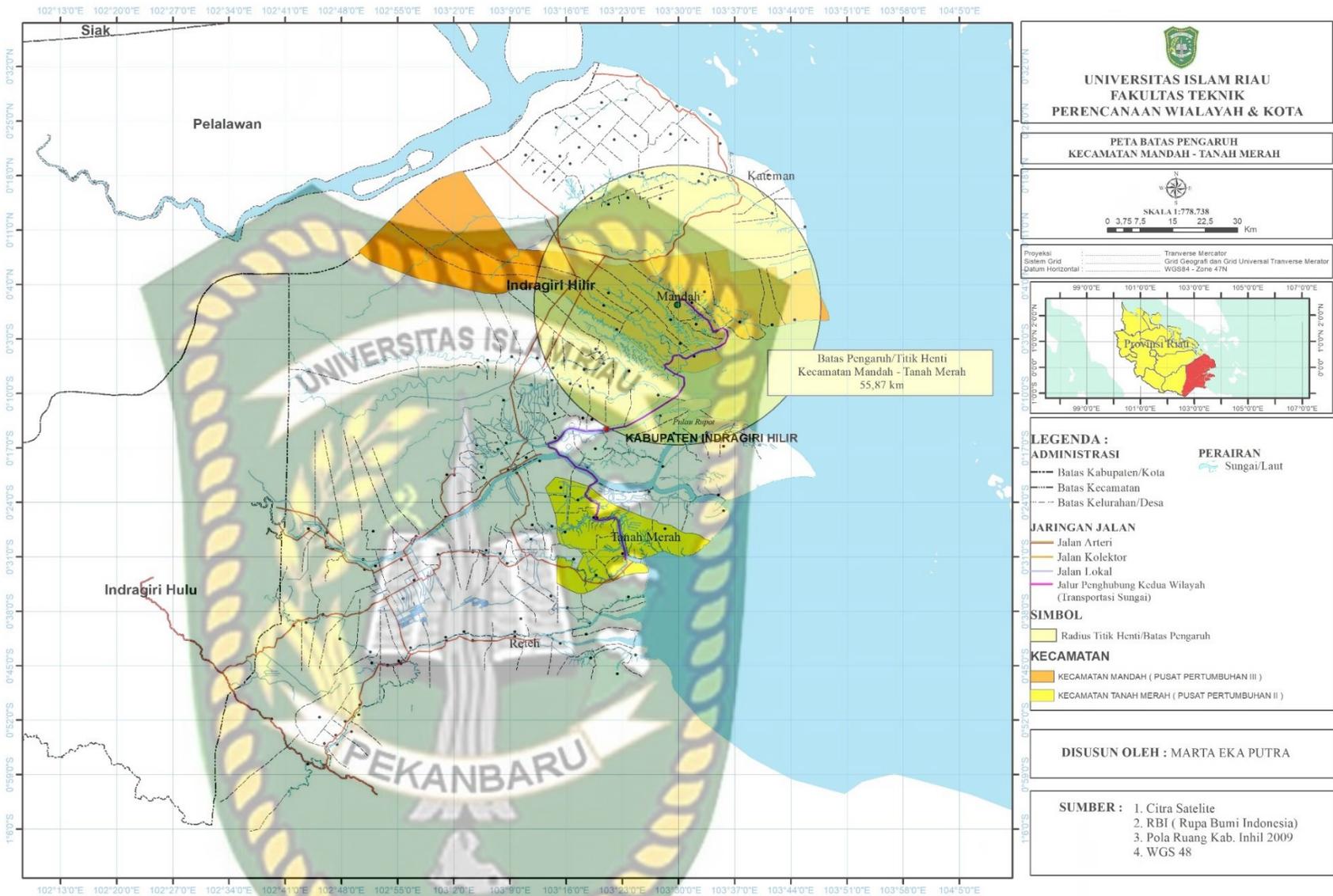




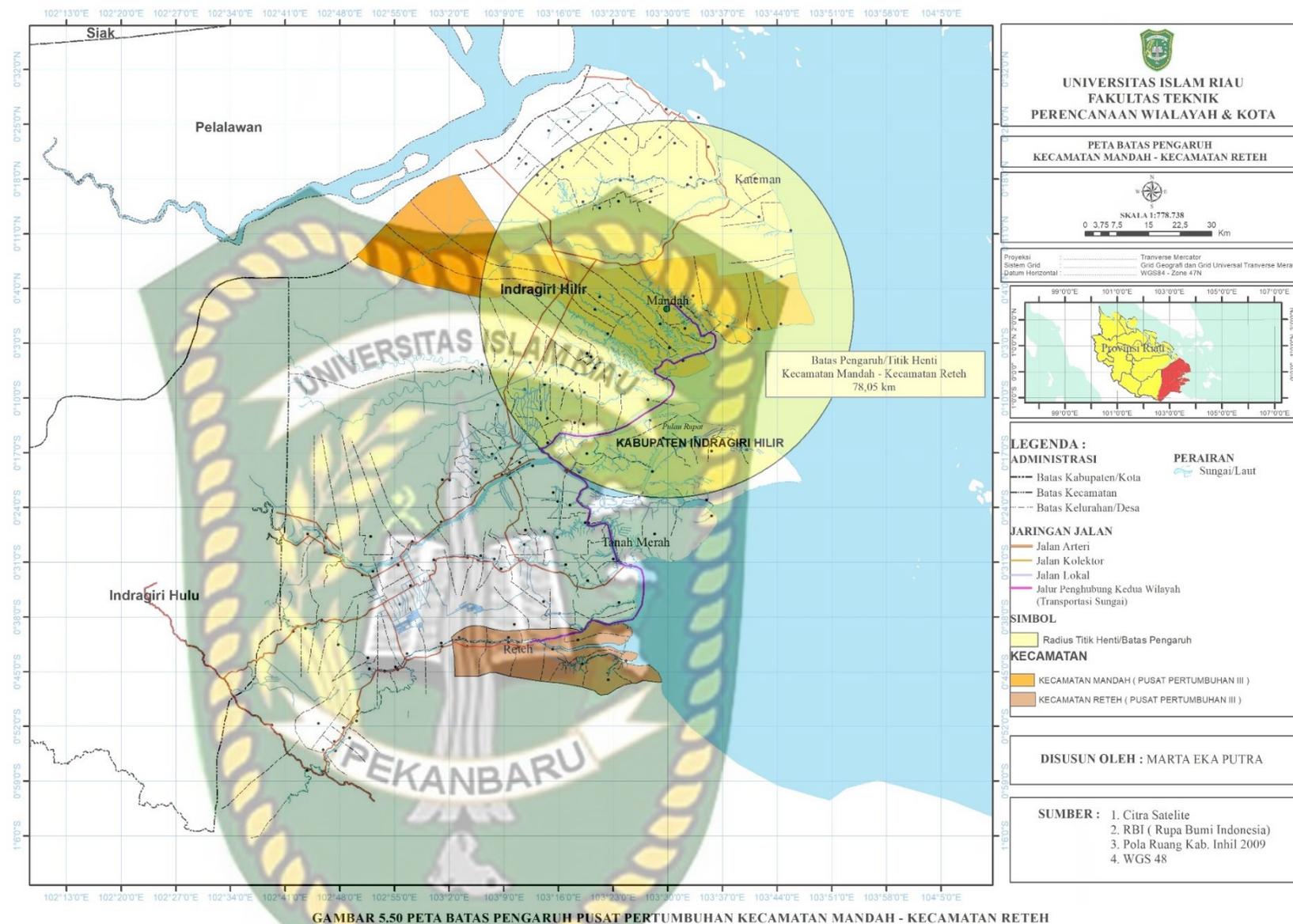
GAMBAR 5.47 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN TANAH MERAH - KECAMATAN RETEH

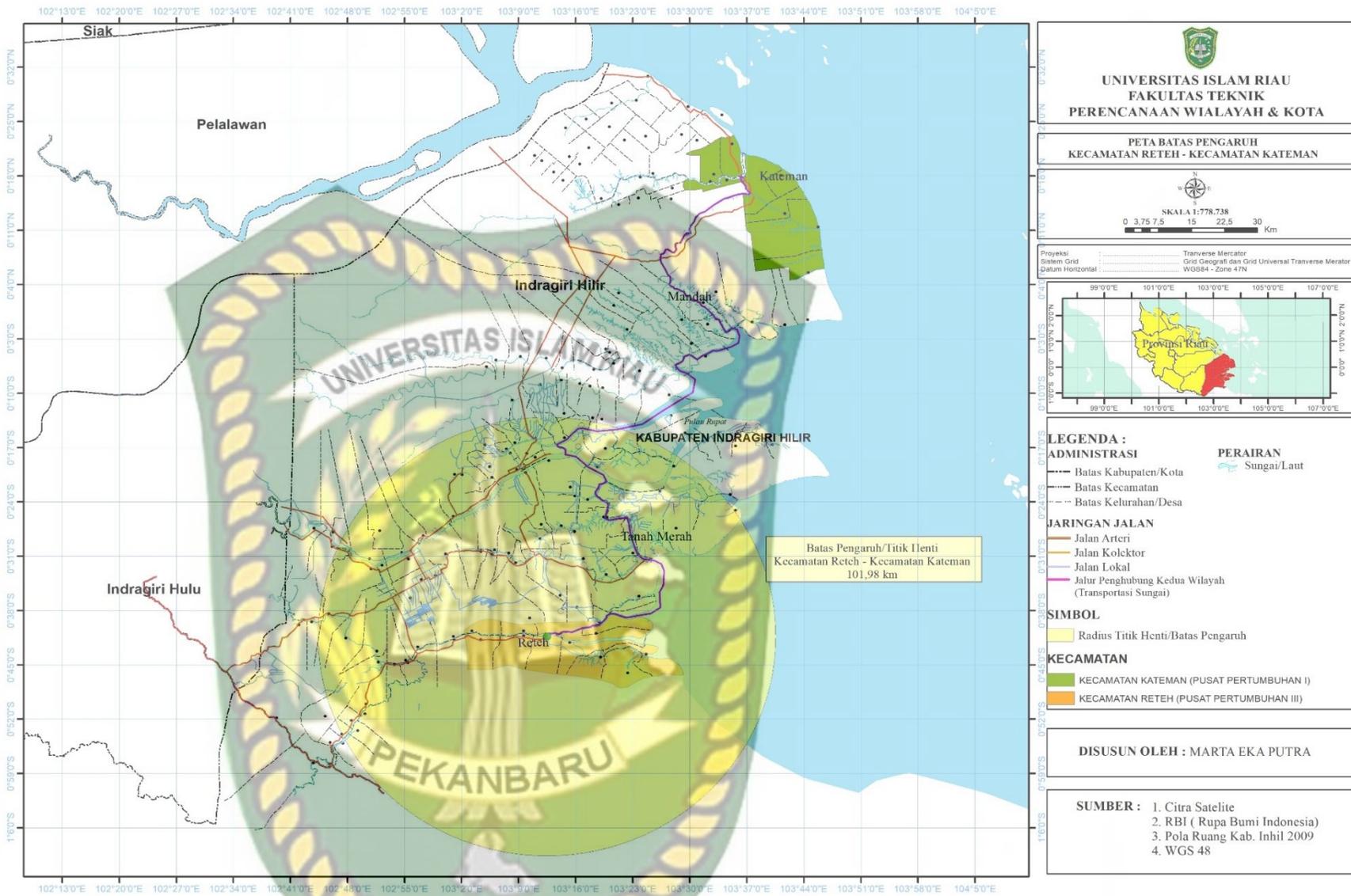


GAMBAR 5.48 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN MANDAH - KECAMATAN KATEMAN

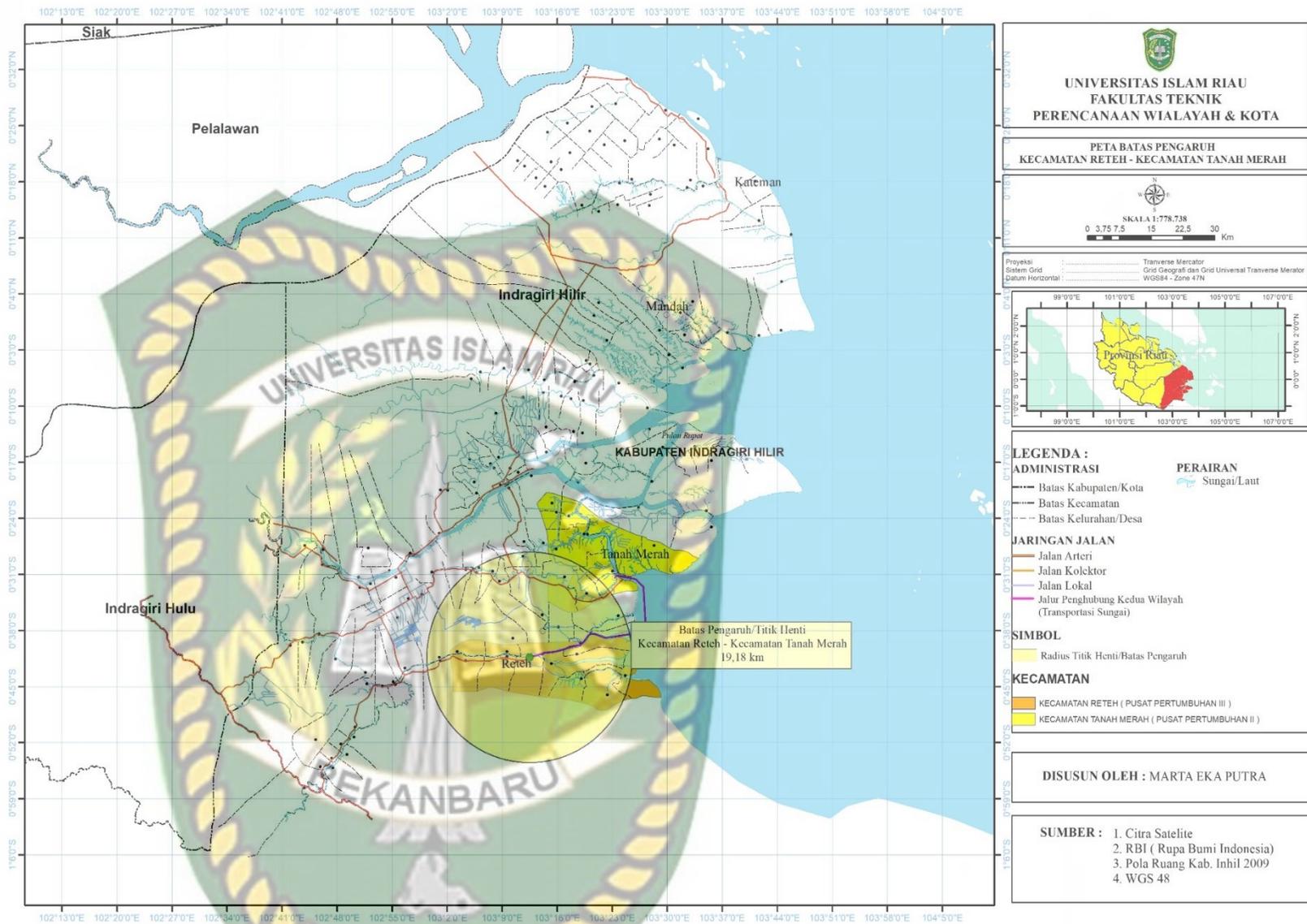


GAMBAR 5.49 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN MANDAH - KECAMATAN TANAH MERAH

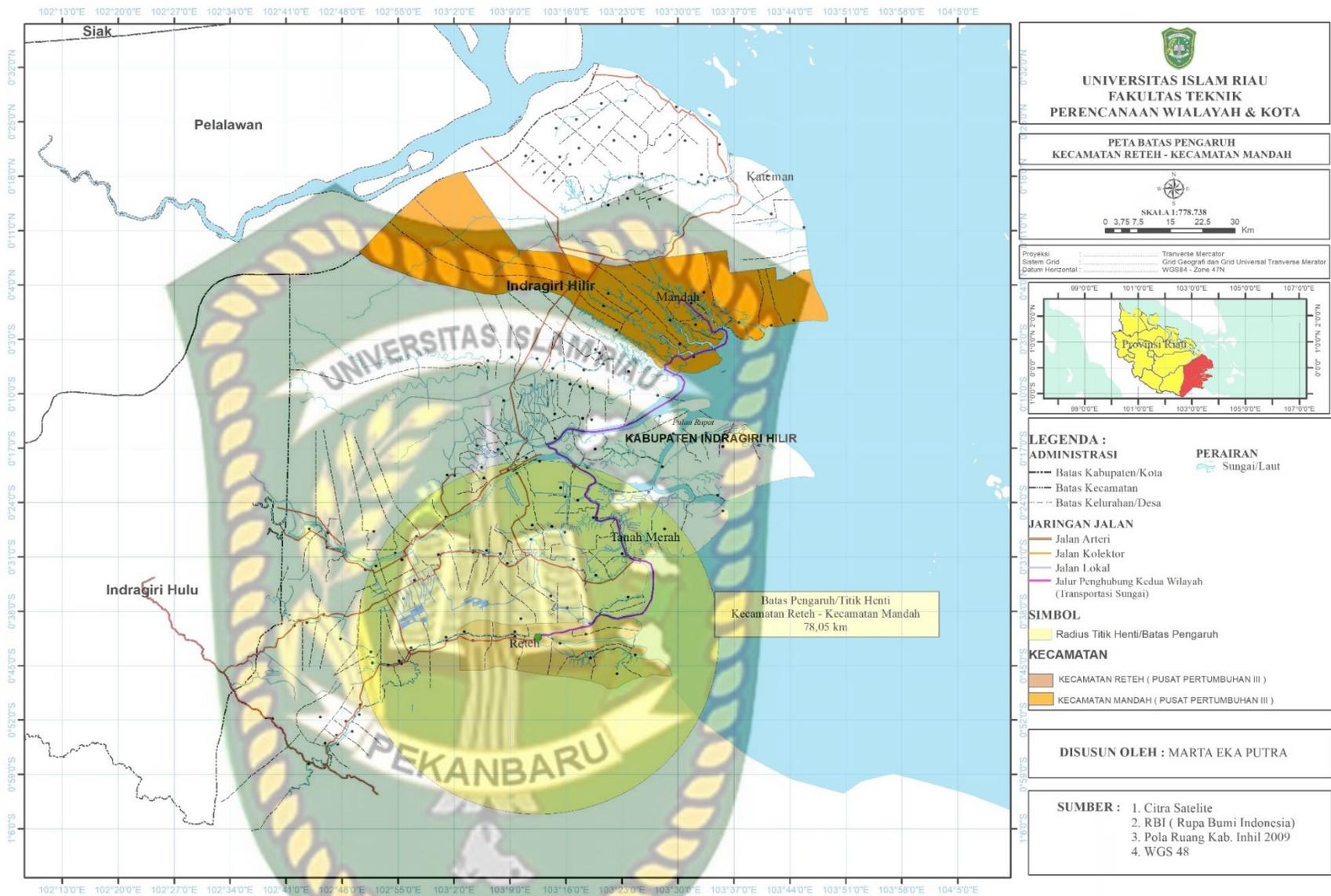




GAMBAR 5.51 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN RETEH - KECAMATAN KATEMAN



GAMBAR 5.52 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN RETEH - KECAMATAN TANAH MERAH

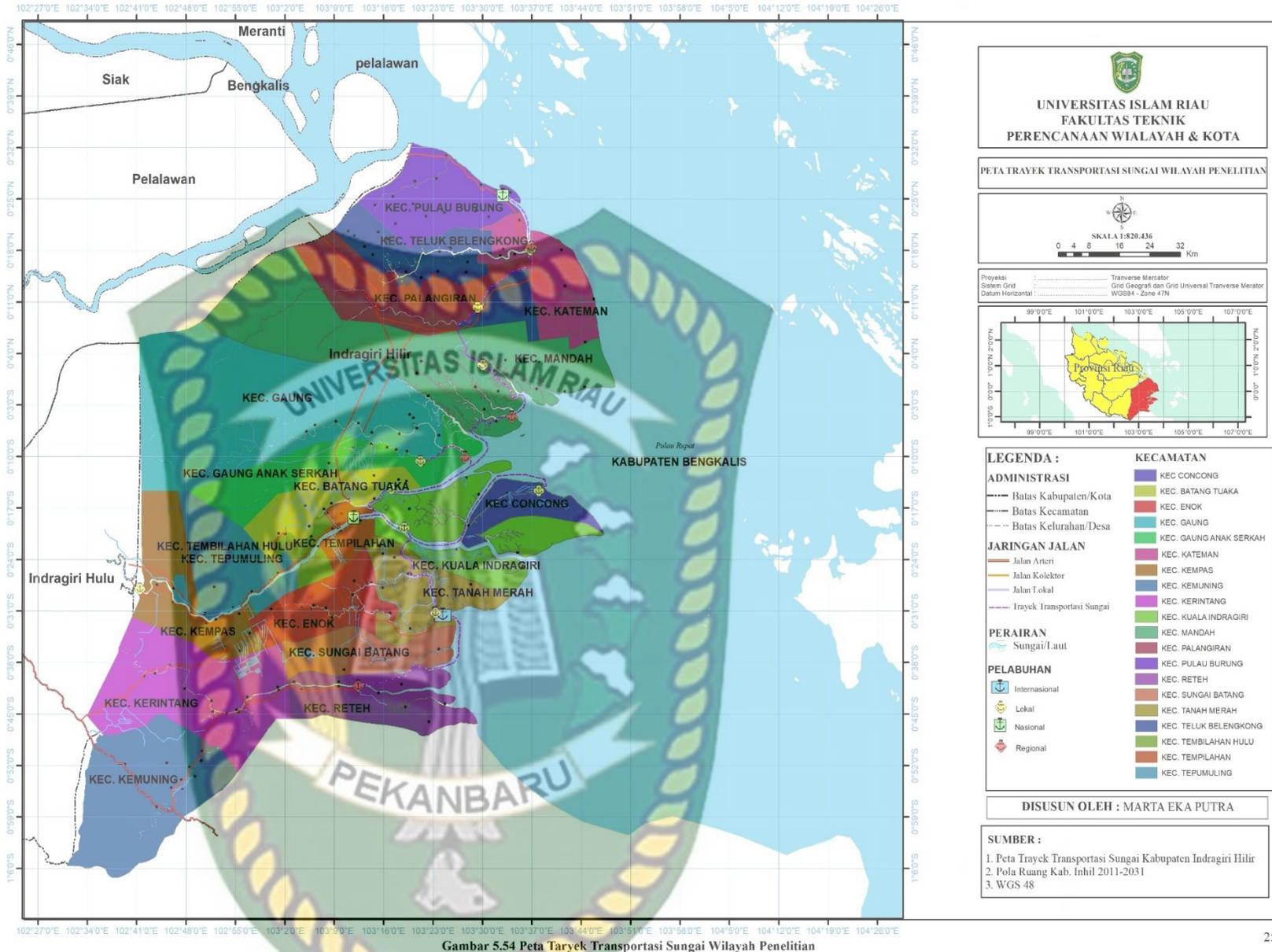


GAMBAR 5.53 PETA BATAS PENGARUH PUSAT PERTUMBUHAN KECAMATAN RETEH - KECAMATAN MANDAH

### 5.3. Analisis Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Pesisir Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui tingkat konektivitas antar wilayah dalam penelitian ini digunakan analisis indeks sentralitas berdasarkan nilai *konig* dan *shimbell*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai strategis atau tingkat konektivitas suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan pada wilayah penelitian berdasarkan aspek lokasi geografis, dimana wilayah tersebut dicirikan dengan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang mengumpul pada wilayah tersebut. Analisis ini menggunakan formula *Konig* (K) dan *Simbel* (S), dengan data yang digunakan adalah jumlah keterhubungan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jumlah keterhubungan suatu wilayah tersebut merupakan jalur transportasi darat maupun sungai sesuai dengan kondisi geografis suatu wilayah yang diteliti. Semakin rendah nilai *Konig* dan *Shimbel* maka semakin strategis wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah trayek transportasi sungai, hal ini karena mayoritas moda transportasi yang digunakan masyarakat Indragiri Hilir untuk menjangkau satu wilayah ke wilayah lainnya adalah transportasi sungai berupa *speedboat*. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, berikut peta trayek transportasi sungai yang menghubungkan masing-masing wilayah pesisir yang menjadi pusat pertumbuhan ke wilayah *hinterland*-nya di kabupaten Indragiri Hilir :



Gambar 5.54 Peta Taryek Transportasi Sungai Wilayah Penelitian

Mengacu pada peta trayek transportasi sungai diatas, maka dapat dianalisis nilai *Konig* dan *Shimbel* pada masing-masing kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut (Lihat Tabel 5.13) :

**Tabel 5.11. Hasil Perhitungan Nilai Konig dan Shimbel Pada Kecamatan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Kecamatan Pusat Pertumbuhan	Kecamatan Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir									Konig	Shimbel
		Kateman	Tanah Merah	Mandah	Reteh	Concong	Pulau Burung	Gaung Anak Serka	Kuala Indragiri	Sungai Batang		
1	Kateman	-	4	2	5	4	1	4	4	5	5	29
2	Tanah Merah	4	-	2	1	2	5	2	1	1	5	18
3	Mandah	2	2	-	3	2	3	2	2	2	3	18
4	Reteh	5	1	3	-	3	6	3	2	1	6	24

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan Tabel 5.13. diatas maka diketahui pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat konektivitas tertinggi adalah Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah dengan nilai *Konig-Shimbel* terendah, berdasarkan hal tersebut maka dua kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat strategis diantara wilayah pusat pertumbuhan lainnya. Sedangkan Kecamatan Kateman menduduki nilai *Konig-Shimbel* tertinggi dan merupakan daerah yang tingkat konektivitasnya rendah.

Namun demikian, jika mengacu pada hirarki wilayah pada analisis sebelumnya, terdapat kondisi yang terbalik antara Kecamatan Kateman dengan Kecamatan Mandah dan Tanah Merah. Pada penentuan hirarki, Kecamatan Kateman menempati hirarki I, maka seharusnya memiliki nilai *Konig-Shimbel* paling rendah. Sementara itu Kecamatan Tanah Merah dan Mandah menempati hirarki II dan III yang seharusnya memiliki nilai *Konig-Shimbel* yang tinggi.

Berdasarkan keunikan fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini perlu ditekankan bahwa dalam penentuan letak startegis, semua kecamatan diwilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir saling terkait satu sama lain dan terkoneksi dengan cukup baik. Berkenaan dengan Kecamatan Kateman sebagai hirarki I adalah berdasarkan variabel pada analisis sebelumnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang menunjukkan Kecamatan Kateman merupakan kecamatan dengan ketersediaan sarana prasarana yang sangat kompleks dan lengkap dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Sementara itu, terkait nilai *Konig-Shimbel*, ketersediaan sarana dan prasarana bukanlah menjadi penentu dalam perhitungan lokasi strategis, akan tetapi variabel yang digunakan adalah jumlah keterhubungan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya yang menunjukkan Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah adalah wilayah yang paling mudah dijangkau.

Faktor lain yang mendukung wilayah Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah sebagai wilayah dengan tingkat konektivitas tertinggi diantaranya adalah letak geografis dari dua kecamatan ini yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh kecamatan-kecamatan pesisir lainnya, sehingga dengan moda transportasi sungai

untuk menuju ke wilayah kecamatan lainnya di pesisir kabupaten Indragiri Hilir mayoritas akan singgah dan melewati kedua wilayah tersebut. Dengan demikian untuk menjangkau kedua wilayah ini yaitu Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah tidak ada kendala yang berarti atau sangat mudah dijangkau.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Tabel 5.12. Rekapitulasi Hasil Masing-Masing Analisis**

No.	Kecamatan	Hasil Analisis			
		Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall	Gravitasi	Titik Henti	Indeks Sentralitas Berdasarkan Nilai Konig dan Shimbell
1	Kateman	Pusat Pertumbuhan Utama (Hirarki I)	Peringkat Interaksi I	Batas Pengaruh Terjauh Dengan Peringkat Jumlah Penduduk Tertinggi	Peringkat Konektivitas III
2	Reteh	Pusat Pertumbuhan Kedua (Hirarki II)	Peringkat Interaksi 2	Batas Pengaruh Terjauh Kedua Dengan Peringkat Jumlah Penduduk Tertinggi Kedua	Peringkat Konektivitas II
3	Tanah Merah	Pusat Pertumbuhan Kedua (Hirarki II)	Peringkat Interaksi 4	Batas Pengaruh Terjauh Keempat Dengan Peringkat Jumlah Penduduk Tertinggi keempat	Peringkat Konektivitas I
4	Mandah	Pusat Pertumbuhan Ketiga (Hirarki III)	Peringkat Interaksi 3	Batas Pengaruh Terjauh Ketiga Dengan Peringkat Jumlah Penduduk Tertinggi Ketiga	Peringkat Konektivitas I

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dari Tabel 5.12 diatas dapat dilihat rekapitulasi hasil dari masing-masing analisis yang dilakukan. Secara umum, suatu wilayah yang memiliki hirarki yang tinggi dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall akan memiliki daya Tarik atau nilai interaksi, batas pengaruh, dan tingkat konektivitas yang tinggi pula. Namun, Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 5.12 diketahui terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tanah Merah yang berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall merupakan pusat pertumbuhan kedua dimana seharusnya memiliki nilai kekuatan interaksi dan batas pengaruh yang tinggi pada analisis gravitasi dan titik henti tetapi berada pada peringkat nilai kekuatan interaksi dan batas pengaruh keempat atau terendah diantara kecamatan pusat pertumbuhan lainnya. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan membandingkan masing-masing variabel dan intepretasi yang digunakan pada ketiga teknik analisis tersebut yaitu skalogram atau indeks sentralitas Marshall, gravitasi, dan titik henti. Pada analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall variabel penentu suatu wilayah untuk menjadi sebuah pusat pertumbuhan adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, dimana semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki suatu wilayah maka wilayah tersebut akan memiliki nilai sentralitas yang tinggi dan berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan, berbeda dengan analisis gravitasi dan titik henti dimana variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk dan jarak, semakin tinggi jumlah penduduk dan semakin kecil jarak maka akan semakin tinggi nilai interaksi dan batas pengaruhnya.

- b. Pada nilai tingkat konektivitas wilayah dimana Kecamatan Kateman dan Kecamatan Reteh yang merupakan pusat pertumbuhan pertama dan kedua justru memiliki tingkat konektivitas yang rendah, yakni pada peringkat ketiga dan kedua. Sedangkan Kecamatan yang memiliki peringkat konektivitas tertinggi adalah Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah. Hal ini terjadi juga karena perbedaan variabel yang digunakan dalam masing-masing teknik analisis, dimana dalam menentukan suatu wilayah yang memiliki tingkat konektivitas yang tinggi variabel yang digunakan adalah jumlah keterhubungan antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, yang ditandai dengan nilai Konig dan Shimbel dengan interpretasi bahwa semakin rendah nilai konig dan shimbel maka akan semakin mudah untuk menjangkau wilayah tersebut sehingga semakin tinggi nilai konektivitasnya. Selain itu, faktor lain yang mendukung wilayah Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah sebagai wilayah dengan tingkat konektivitas tertinggi diantaranya adalah letak geografis dari kedua kecamatan ini yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh kecamatan-kecamatan pesisir lainnya, sehingga dengan moda transportasi sungai untuk menuju ke wilayah kecamatan lainnya di pesisir kabupaten Indragiri Hilir mayoritas akan singgah dan melewati kedua wilayah tersebut. Dengan demikian untuk menjangkau kedua wilayah ini yaitu Kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah tidak ada kendala yang berarti atau sangat mudah dijangkau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap masing-masing tujuan yang ingin dicapai, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari sembilan kecamatan pesisir yang ada di kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall diketahui sebanyak empat kecamatan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan, yaitu kecamatan dengan ketersediaan sarana prasarana yang paling lengkap dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Empat kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Kateman sebagai pusat pertumbuhan utama dengan total nilai indeks Sentralitas 494, Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah sebagai pusat pertumbuhan kedua dengan total nilai indeks sentralitas 369 dan 361, sedangkan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ketiga adalah Kecamatan Mandah dengan total nilai indeks sentralitas 336.
- b. Berdasarkan hasil analisis gravitasi dan titik henti maka diketahui kekuatan interaksi dan batas pengaruh masing-masing wilayah pusat pertumbuhan sebagai berikut :

i. Analisis Gravitasi

Diketahui Kecamatan Kateman adalah pusat pertumbuhan yang memiliki nilai interaksi terbesar terhadap wilayah belakangnya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, yakni dengan total nilai interaksi sebesar 4.687.151 satuan interaksi. Selanjutnya kecamatan pusat pertumbuhan dengan nilai interaksi terbesar kedua terhadap wilayah belakangnya setelah Kecamatan Kateman adalah Kecamatan Reteh dengan total nilai interaksi adalah 2.338.701 satuan interaksi, kemudian disusul Kecamatan Mandah dengan total nilai interaksi sebesar 1.944.391 satuan interaksi, dan yang terakhir kecamatan pusat pertumbuhan dengan nilai interaksi terendah adalah Kecamatan Tanah Merah dengan total nilai interaksi sebesar 1.904.590 satuan interaksi

ii. Analisis Titik Henti

Hasil analisis titik henti menunjukkan masing-masing pusat pertumbuhan memiliki batas pengaruh yang berbeda-beda. Besar atau kecilnya daya tarik masing-masing wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk dan jarak, semakin tinggi jumlah penduduk maka mengindikasikan semakin besarnya daya tarik pada wilayah tersebut. Dari hasil analisis titik henti, wilayah pusat pertumbuhan dengan batas pengaruh tertinggi adalah kecamatan Kateman. Kecamatan Kateman juga merupakan wilayah pusat pertumbuhan utama dengan hirarki satu di wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dengan peringkat jumlah penduduk tertinggi.

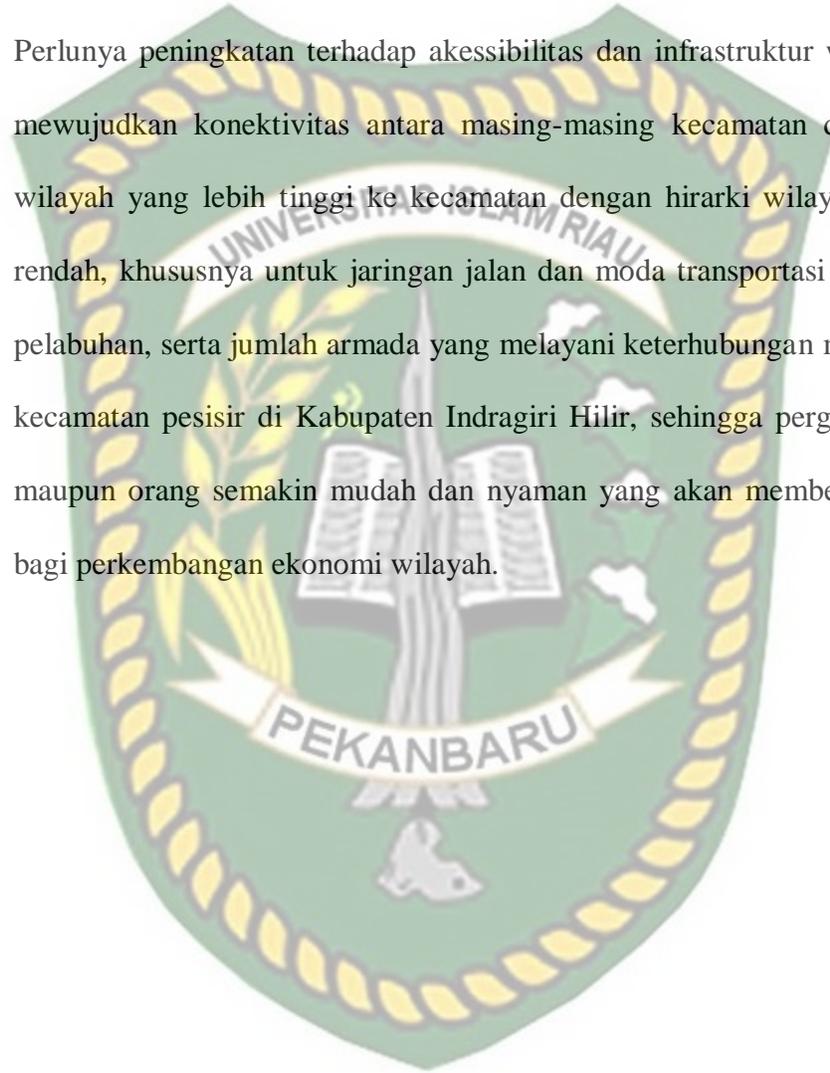
- c. Berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas melalui nilai *Konig* dan *Shimbel*, diketahui pusat pertumbuhan di wilayah pesisir kabupaten Indragiri Hilir dengan tingkat konektivitas tertinggi adalah kecamatan Mandah dan Kecamatan Tanah Merah dengan nilai *Konig-Shimbel* terendah, yaitu Kecamatan Mandah dengan nilai *Konig* = 3 dan *Shimbel* = 18 sedangkan Kecamatan Tanah Merah dengan nilai *Konig* = 5 dan *Shimbel* = 18. Berdasarkan hal tersebut maka dua kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat strategis diantara wilayah pusat pertumbuhan lainnya.

## 6.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menyajikan informasi-informasi terkait potensi masing-masing wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama dalam penetapan wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Namun, dalam penelitian ini tentunya juga terdapat berbagai kekurangan dengan keterbatasan variabel yang diteliti, oleh karena itu perlu adanya penelitian yang lebih mendalam dan lebih kompleks mengenai potensi sosial ekonomi pada masing-masing wilayah diseluruh kecamatan pesisir yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan perekonomian antar pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan belakangnya.

- b. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya dapat memprioritaskan perencanaan penyediaan fasilitas secara lebih tepat dan efisien, yakni dengan mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki hirarki yang lebih tinggi yang membutuhkan fasilitas yang lebih besar dan lebih bervariasi.
- c. Perlunya peningkatan terhadap aksesibilitas dan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan konektivitas antara masing-masing kecamatan dengan hirarki wilayah yang lebih tinggi ke kecamatan dengan hirarki wilayah yang lebih rendah, khususnya untuk jaringan jalan dan moda transportasi sungai seperti pelabuhan, serta jumlah armada yang melayani keterhubungan masing-masing kecamatan pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga pergerakan barang maupun orang semakin mudah dan nyaman yang akan memberikan dampak bagi perkembangan ekonomi wilayah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti P, Dinata A, Sari A. 2017. *Model Keterkaitan Dampak Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar*. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017. Halaman 31.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2018*. BPS : Tembilahan. 2018.
- Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. “*Al-Qur’an Tentang Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan*”. <http://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2016/06/al-qur-tentang-tata-ruang-dan.html>. (di akses pada tanggal 8 Januari 2019)
- Daldjoeni, N. 1992. *Geografi Baru : Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Dewi, NK. 2008. *Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian di Kabupaten Ponorogo*. [Skripsi]. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Edisi X. Bandung : Sukses Publishing.
- Farida, I., dan Zulfa Emalia. 2018. *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Iteraksi Spasial di Provinsi Lampung*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 19 Nomor 1, Halaman 61-65.
- Ginting, AR. Nurlina. 2018. *Analisis Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Volume 9 Nomor 1, Halaman 60-62.
- Hartono. 2007. *Geografi : Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. Bandung: Citra Raya.
- Hasan, MH. 2017. *Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Pesisir di Kabupaten Bantaeng*. [Skripsi]. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Irwan. 2018. *Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi Banjara Banjir di Kota Bima Kecamatan Rasanae Timur*. [Skripsi]. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Jahid, Jamaluddin. 2012. *Kapita Selekta Perencanaan Wilayah*. Makassar : Alauddin University Pres.

- Latuconsina YMZ, Rustiadi E, Sahara. 2018. *An Analysis Of The Level Of Development in Malang Regency Based on a Typology Of Development Regions. Journal Of Regional and City Planning*, Vol 29 No.1. Halaman 2-3
- Marfa'i, Aris. 2013. *Bencana Banjir ROB : Studi Pendahuluan Banjir Pesisir Jakarta*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marfa'I, Aris. 2015. *Analisis Spasio-Temporal Banjir Genangan Akibat Kenaikan Muka Air di Wilayah Kepesisiran Kabupaten Jepara (Studi Kasus Kecamatan Kedung, Tahunan dan Jepara)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muta'ali, Luthfi. 2013. *Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif dan Teknis)*. Yogyakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE), Universitas Gadjah Mada.
- Muta'ali, Luthfi. 2015. *Teknik Analisis Regional. Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE), Universitas Gadjah Mada.
- Muljarijadi, B., 2000. *Pembangunan Pertanian Daerah di Indonesia : Paradigma Baru Menghadapi Era Desentralisasi. Makalah dalam Semiloka Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Nawawi, Imam. 2016. "Menjadi Pemimpin Adil dan Bijaksana". <http://m.hidayatullah.com/kajian/gayahidupmuslim/read/2017/01/04/109128/109128.html> (di akses pada tanggal 9 Januari 2019).
- Nursyam, AS. 2013. *Struktur Tata Ruang Wilayah dan Kota*. Makassar : Alauddin University Press.
- Nurhadi, Ancik ZW. 2018. *Kajian Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Klaten*. Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi kegeografian. Volume 16 Nomor 1, Halaman 16.
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, 2013. *RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018*. Tembilahan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Jakarta : Republik Indonesia.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Priyadi, U., dan Eko Atmadji. 2017. *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Hinterland di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Journal Innovation and Interpreneurship, Volume 02 Nomor 02, Halaman 194-201.
- Putra, SH. 2012. *Dinamika Proses Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008-2010*. [Skripsi]. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Grestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rif'an AA, Rijanta, Mardiatno D. 2017. *Banjir ROB Pemodelan, Dampak, dan Strategi Adaptasi*. Malang : Intimedia.
- Sari, DAW. 2016. *Penentuan Pusat Pertumbuhan Baru Berdasarkan Potensi dan Daya Saing Wilayah*. [Skripsi]. Surabaya : Institut Teknologi Sepuluh November.
- Saruhian, Aryan. 2006. *Identifikasi dan Analisis Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung*. [Tesis]. Jakarta : Universitas Indonesia
- Setiawan, Maruf. 2013. *"Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah"*. <http://referensigeography.blogspot.com/2013/05/konektivitas-dan-aksesibilitas-wilayah.html?m=1> (diakses pada tanggal 13 february 2019).
- Sukirno, Sadono. 1982. *Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sjafrizal, 2008. *Ekoomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduose Media.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandaung : PT Alfabet.
- Sukesi, dan Sugiyanto. 2010. *Penelitian Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamandau*. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Volume 1 Nomor 2, Halaman 202-204.

Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Yulianto, RA. 2015. *Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes*. [Skripsi]. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Zulfahmi. 2016. *Analisis Dampak Sedimentasi Sungai Tallo Terhadap Kerawanan Banjir di Kota Makassar*. [Skripsi]. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

